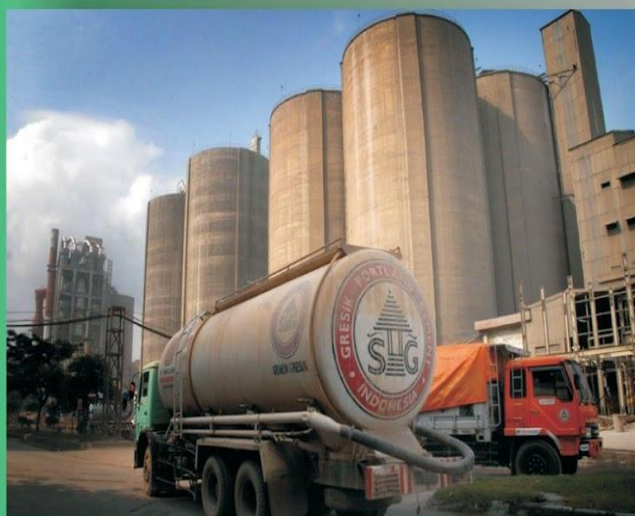




RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 - 2015





Daftar Isi

BAB I	
.....	
.....- 4 -	
PENDAHULUAN	- 4 -
1.1 LATAR BELAKANG	- 4 -
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	- 5 -
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	- 7 -
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	- 28 -
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN	- 29 -
BAB II	
.....	
.....- 31 -	
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	- 31 -
2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS	- 31 -
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT	- 37 -
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	- 65 -
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH	- 85 -
BAB III	
.....	
.....- 88 -	
3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU	- 88 -
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	- 90 -
3.3 KERANGKA PENDANAAN	- 95 -
BAB IV	
.....	
.....- 107 -	
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	- 107 -
4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	- 107 -



4.2. ISU-ISU STRATEGIS	- 116 -
BAB V	
.....- 125 -	
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	- 125 -
5.1. VISI	- 125 -
5.2. MISI	- 126 -
5.3. TUJUAN DAN SASARAN	- 129 -
BAB VI	
.....- 134 -	
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	- 134 -
6.1 Strategi Pembangunan Daerah	- 139 -
6.2 Arah Kebijakan	- 141 -
BAB VII	- 142 -
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	- 142 -
7.1. KEBIJAKAN UMUM	- 142 -
7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	- 146 -
BAB VIII	- 154 -
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN	- 154 -
8.1 Program Prioritas	- 155 -
8.1 Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan	- 163 -
BAB IX	
.....- 166-	
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	-166-
9.1 Indikator Kinerja daerah	
..... -166-	



BAB X

.....

..... -203-

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

..... -203-

10.1. PEDOMAN TRANSISI

..... -203-

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN

..... -203-



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam masa kepemimpinan Bupati terpilih untuk lima tahun mendatang, Kabupaten Gresik tentu akan menghadapi tantangan pertumbuhan dan perkembangan, juga menghadapi persaingan global yang makin meningkat, jumlah penduduk yang makin banyak, dan dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam. Oleh karena itu, janji Visi dan Misi Bupati pada masa kampanye, perlu dirumuskan dalam suatu *guidance* perwujudan cita-cita Pembangunan Daerah untuk jangka lima tahun tersebut dalam suatu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2011 - 2015.

Konsep pembangunan jangka menengah daerah diperlukan agar hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai dan belum tercapai dalam kepemimpinan yang lalu, permasalahan yang sedang dihadapi dan tantangannya ke depan dapat terjamin keberlanjutannya secara sistematis. Karenanya rencana jangka menengah yang dimaksud harus mencakup berbagai aspek penting kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan daerah, yang akan menuntun proses menuju tatanan kehidupan masyarakat dan taraf pembangunan yang hendak dicapai bisa lebih baik.

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan di bawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam



Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 tersebut diarahkan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) memuat visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan dalam substansi Strategi Pembangunan Daerah, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Arah Kebijakan Umum Daerah dan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan, Analisis Isu-isu Strategis, Program Prioritas Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Anggaran serta Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJM Kabupaten Gresik 2011-2015 ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan perundangan yang berlaku:
 - a. Landasan idiil Pancasila
 - b. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
2. Landasan operasional sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara



- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan
- d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- f. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- g. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014
- n. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009, tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014



- o. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur 2005 – 2020
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Keterkaitan antar dokumen perencanaan yang berlaku di Kabupaten Gresik ini mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2010-014 dan RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025, serta mengintegrasikan rencana tata ruang daerah. Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama

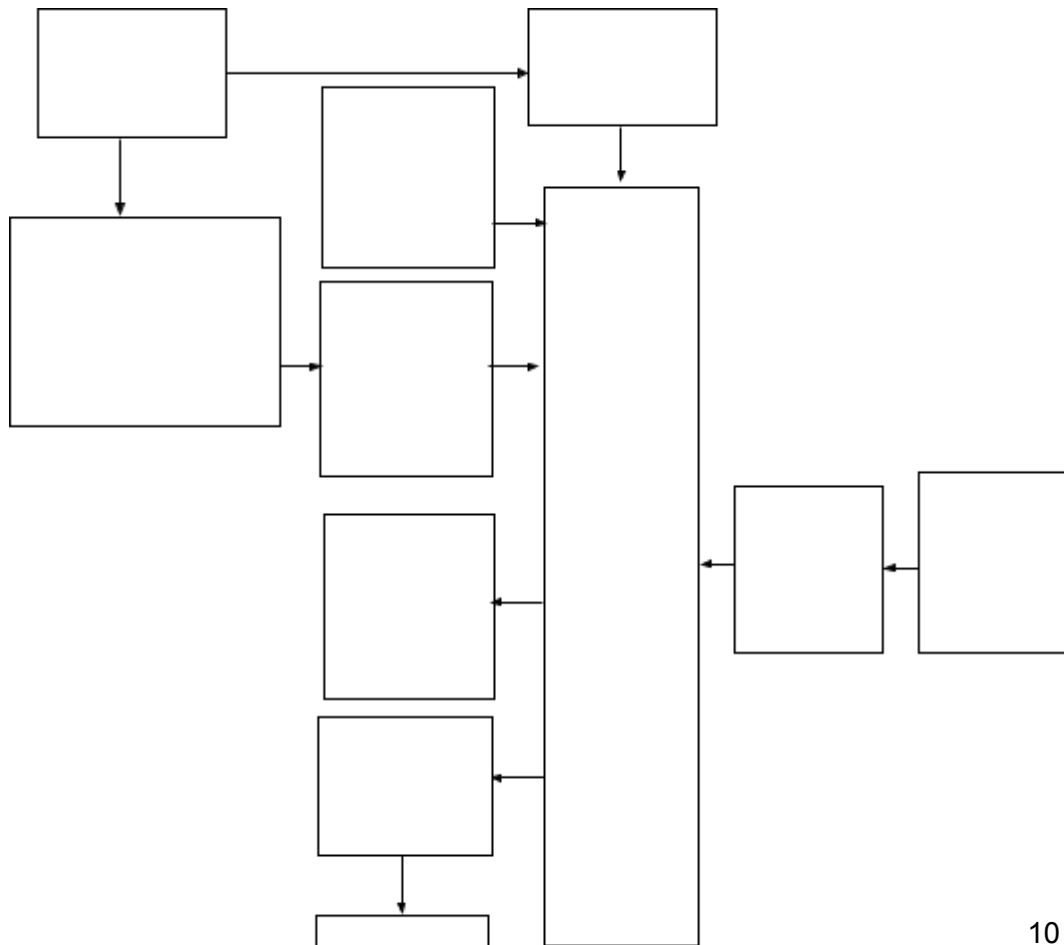


penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.

2. RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah memuat gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, penetapan indikator kinerja daerah serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
3. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Propinsi yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4. Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Sederhananya hubungan antar dokumen dapat dilihat pada gambar berikut ini :





1.3.1 Analisis RPJMN dan RPJMD Provinsi

1.3.1.1 RPJM Nasional

Dalam RPJM Nasional Tahun 2010-2014, disebutkan bahwa visi Indonesia tahun 2010 -2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Misi yang ditetapkan antara lain; 1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, 2) memperkuat pilar-pilar demokrasi, 3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Demi mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemerintah menentukan lima (5) agenda pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat
2. Perbaikan tata kelola pemerintahan
3. Penegakan pilar demokrasi
4. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
5. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Visi dan Misi Pemerintah Indonesia yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memuat 11 prioritas nasional, diantaranya adalah :

Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan Publik yang ditopang



oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan data kependudukan yang baik.

Oleh karena itu, substansi inti dari reformasi birokrasi dan tata kelola adalah sebagai berikut

1. Struktur Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementrian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN). Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, seperti di bidang keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan.
2. Otonomi daerah: Penataan ekonomi daerah melalui 1) penghentian/pembatasan pemekaran wilayah; 2) peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah dan 3) penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
3. Sumber daya manusia : penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011;
4. Regulasi : Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang – undnagan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, diantaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011;
5. Sinergi antara pusat dan daerah : Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Penegakan Hukum : Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan apart hukum;



7. Data Kependudukan : Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya pada 2011.

Prioritas 2 : Pendidikan

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan : 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Akses pendidikan dasar-menengah: Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014 dan APM Pendidikan setingkat SMP dari 73% menjadi 76% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA dari 69% menjadi 85%; Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan penyediaan sambungan internet bercontent pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar;
2. Akses pendidikan tinggi: peningkatan APK pendidikan tinggi dari 18% di 2009 menjadi 25% di 2014;



3. Metodologi: Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014;
4. Pengelolaan: Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten;
5. Kurikulum: Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model link and match);
6. Kualitas: Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah, melalui:
 - 1) program remediasi kemampuan mengajar guru;
 - 2) penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar;
 - 3) sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014;
 - 4) membuka luas kerja sama PTN dengan lembaga pendidikan internasional;
 - 5) mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014;
 - 6) memastikan perbandingan guru:murid di setiap SD & MI sebesar 1:32 dan di setiap SMP & MTs 1:40; dan
 - 7) memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.



Prioritas 3 : Kesehatan

Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

Oleh karen itu, substansi inti program aksi bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Program kesehatan masyarakat: Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu yang meliputi pemberian imuniasi dasar kepada 90% balita pada 2014; Penyediaan akses sumebr air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum 2014; Penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan dari 307 per 100.000 kelahiran pada 2008 menjadi 118 pada 2014, serta tingkat kematian bayi dari 34 per 1.000 kelahiran pada 2008 menjadi 24 pada 2014;
2. Program KB : Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014;
3. Sarana kesehatan : ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada 2012 dan 5 kota pada 2014;
4. Obat : Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010.



5. Asuransi Kesehatan Nasional : Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara 2012-2014.

Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial Terpadu: Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik yang bersifat insidental atau kepada kelompok marginal, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan program keluarga harapan diperluas menjadi program nasional mulai 2011-2012.
2. PNPM Mandiri: Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp. 10,3 triliun pada 2009 menjadi Rp. 12,1 triliun pada 2010, pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp. 3 miliar per kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin di pedesaan, dan integrasi secara selektif PNPM Pendukung;
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011;
4. Tim Penanggulangan Kemiskinan: Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Wakil Presiden, penggunaan unified database untuk penetapan sasaran program mulai



2009-2010 dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran.

Prioritas 5 : Ketahanan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

1. Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian: Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar;
2. Infrastruktur: Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya.
3. Penelitian dan Pengembangan: Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi;
4. Investasi, Pembiayaan dan Subsidi: Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem



subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah dan terjangkau;

5. Pangan dan gizi: Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan;
6. Adaptasi Perubahan Iklim: Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

Prioritas 6 : Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang infrakstruktur adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan tata ruang: Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu.
2. Jalan: Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua sepanjang total 19.370 km pada 2014;
3. Perhubungan: Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pda 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini;



4. Perumahan Rakyat: Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 twin block berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012;
5. Pengendalian banjir: penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum 2012 dan penanganan secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo sebelum 2013;
6. Telekomunikasi: Penuntasan pembangunan jaringan serta optik di Indonesia bagian timur sebelum 2013 dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat;
7. Transportasi perkotaan: Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail) selambat-lambatnya 2014.

Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Usaha

Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang iklim investasi dan iklim usaha adalah sebagai berikut :

1. Kepastian hukum: reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangnya yang tidak menimbulkan ketidak jelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya;
2. Penyederhanaan prosedur: Penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPSIE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda



- bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Logistik nasional: Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi;
 4. Sistem informasi: Beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor (sebelum Januari) 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama Custom Advanced Trade System (CATS) di dry port Cikarang.
 5. KEK: Pengembangan KEK di 5 (lima) lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012;
 6. Kebijakan ketenagakerjaan: Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja.

Prioritas 8 : Energi

Penciptaan ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang energi adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan: Pengambilan kewenangan atas kebijakan energi ke dalam Kantor Presiden untuk memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional;
2. Restrukturisasi BUMN: Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 dan diikuti oleh BUMN lainnya;
3. Kapasitas energi: Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup



- 62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,01 juta barrel per hari mulai 2014;
4. Energi alternatif: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro, serta nuklir secara bertahap;
 5. Hasil ikutan dan turunan minyak bumi/gas: Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya;
 6. Konversi menuju penggunaan gas: Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010; penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya dan Denpasar.

Prioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Bencana

Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana adalah sebagai berikut:

1. Perubahan iklim: Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluar 500,000 ha per tahun dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi;



2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan: Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun dan penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014; Pengehentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya;
3. Sistem Peringatan Dini: Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013;
4. Penanggulangan bencana: Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: 1) penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi dan 2) pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik

Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan , terluar dan pascakonflik ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca konflik dengan substansi inti sebagai berikut :

1. Kebijakan: Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011;



2. Kerjasama internasional: Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan;
3. Keutuhan wilayah: Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste dan Filipina pada 2010;
4. Daerah tertinggal: Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 Kabupaten paling lambat 2014.

Prioritas 11 : Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni dan ilmu serta apresiasinya untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi adalah sebagai berikut :

1. Perawatan: Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011;
2. Sarana: Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012;
3. Penciptaan: Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas;
4. Kebijakan: Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya;



5. Inovasi teknologi: Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan dan antisipasi perubahan iklim dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.

1.3.1.2 RPJMD Provinsi Jawa Timur

Visi RPJM Daerah Jawa Timur 2009-2014 adalah "Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dalam mewujudkan visi tersebut, Provinsi Jawa Timur berfokus pada satu misi, "Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik Melalui APBD untuk Rakyat."

Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan sembilan agenda utama selama lima tahun ke depan, antara lain:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin
2. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat
3. Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri (agrobisnis), serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan
4. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang
5. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik



6. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial
7. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga
8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia
9. Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.



1.3.2 Analisis RPJMD Daerah Lain

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	Kota Surabaya	2011-2015	1. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial melalui penguatan kelembagaan dalam upaya menurunkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), masyarakat miskin dan kaum rentan sosial;	
			2. Meningkatkan jaminan pemerataan kesempatan pendidikan, pengembangan kecerdasan, minat, dan bakat anak didik;	
			3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta pengembangan lingkungan sehat dan perilaku sehat.	
			4. Peningkatan kapasitas SDM aparatur;	
			5. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan untuk menjamin	



			ketersediaan data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu;	
			6. Melakukan penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil;	
			7. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan;	
			8. Meningkatkan jumlah dan kualitas guru sehingga mampu mengembangkan kompetensi dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan tugas pengajaran;	
			9. Melakukan penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil;	
2	Kab. Sidoarjo	2011-2015	1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	
			2. Peningkatan pertumbuhan ekonomikontribusi sektor UMKM dan koperasi, pariwisata, industry perdagangan, jasa, dan pertanian	



			pada PDRB melalui peningkatan daya saing.	
			3. Pengembangan budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan, dan bebas korupsi	
			4. Pengembangan pengelolaan SDM pemerintahan berbasis kompetensi	
			5. Pengembangan data dan sistem IT pendukung pelayanan umum	
			6. Optimalisasi pelestarian dan kualitas lingkungan hidup	
			7. Peningkatan ketertiban masyarakat melalui penegakan supremasi hukum secara konsisten dan berkelanjutan	
3	Kab. Lamongan	2011-2015	1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan	
			2. Meningkatkan pemerataan dan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, terutama dengan membebaskan biaya pemeriksaan di puskesmas untuk penduduk miskin	
			3. Meningkatkan pemerataan dan pelayanan kesehatan kepada seluruh	



			masyarakat, terutama dengan membebaskan biaya pemeriksaan di puskesmas untuk penduduk miskin	
			4. Mengembangkan jaringan pemasaran produk pertanian	
			5. Meningkatkan produksi perikanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap perairan umum, kolam, laut dan tambak	
			6. Mengembangkan komoditas perkebunan, melalui kimbun (kawasan industri masyarakat perkebunan)	
			7. Mendokumentasikan, mengembangkan dan menyebarkan informasi hasil-hasil pembangunan	
			8. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan	
			9. Menjadikan perpustakaan sebagai sarana penambah pengetahuan	
			10. Meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi (TI).	
			11. Meningkatkan pengelolaan pertanahan	



			12. Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan pengelolaan arsip daerah	
			13. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS dengan peningkatan rehabilitasi dan bantuan dasar kesejahteraan sosial	



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I** : **PENDAHULUAN**, yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan.
- BAB II** : **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**, yang berisi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.
- BAB III** : **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**, yang berisi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan
- BAB IV** : **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**, yang berisi Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis.
- BAB V** : **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**, yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015.
- BAB VI** : **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, yang berisi Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015.
- BAB VII** : **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**, yang berisi hubungan antara kebijakan umum berdasarkan strategi yang dipilih dengan program pembangunan daerah sesuai target capaian indikator kinerja.
- BAB VIII** : **INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN**, yang berisi indikasi rencana program prioritas



berdasarkan urusan yang menjadi tanggung jawab SKPD disertai kebutuhan pendanaan.

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH, yang berisi penetapan indikator-indikator kinerja daerah dari setiap urusan pemerintahan.

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN, yang berisi pedoman transisi, dan kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 ini disusun dengan maksud mencari pemecahan solustif antisipatif terhadap kebutuhan daerah untuk masa lima tahun mendatang. Lebih konkrit RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 disusun sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik yang berlaku jangka satu tahunan yang memuat kerangka ekonomi daerah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja serta pendanaannya. RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 ini merupakan upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk terlibat di dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 ini ditujukan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Gresik.
2. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah daerah dan pusat.



3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kabupaten Gresik.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kabupaten Gresik yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Gresik yang dilaksanakan per- lima tahunan.

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 ini menjabarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kabupaten Gresik, ke dalam kegiatan indikatif yang mampu merealisasikan Visi, Misi, Kebijakan dan Program yang sudah ditetapkan.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

2.1.1. Letak Astronomis

Kabupaten Gresik berada di antara 7 derajat dan 8 derajat Lintang Selatan serta antara 112 derajat dan 113 derajat Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 212 meter di atas permukaan laut kecuali sebagian kecil di bagian utara (Kecamatan Panceng), yang mempunyai ketinggian sampai 25 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Gresik mempunyai wilayah kepulauan, yaitu Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Luas wilayah Gresik seluruhnya 1.191,25 Km², terdiri dari 993,83 Km² luas wilayah daratan ditambah sekitar 197,42 Km² luas Pulau Bawean. Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80 Km² yang sangat potensial dari subsektor perikanan laut.

Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 140 Km meliputi Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Ujungpangkah, Sidayu dan Panceng, serta Kecamatan Tambak dan Sangkapura yang berada di Pulau Bawean. Batas-batas administratif Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya
- Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan



2.1.2. TOPOGRAFI

Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah dan Litosol. Curah hujan di Kabupaten Gresik adalah relatif rendah, yaitu rata-rata 2.245 mm per tahun.

Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

- a. Kabupaten Gresik bagian Utara (meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, Manyar) adalah bagian dari daerah pegunungan Kapur Utara yang memiliki tanah relatif kurang subur (wilayah Kecamatan Panceng). Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujungpangkah. Daerah hilir Bengawan solo tersebut sangat potensial karena mampu menciptakan lahan yang cocok untuk industri, perikanan, perkebunan, dan permukiman. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.
- b. Kabupaten Gresik bagian Tengah (meliputi wilayah; Duduk Sampeyan, Balong Panggang, Benjeng, Cerme, Gresik, Kebomas) merupakan kawasan dengan tanah relatif subur. Di wilayah ini terdapat sungaisungai kecil, antara lain Kali Lamong, Kali Corong, Kali Manyar, sehingga di bagian tengah wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perikanan.
- c. Kabupaten Gresik bagian Selatan (meliputi Menganti, Kedamean, Driyorejo dan Wringin Anom) adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian selatan wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk industri, permukiman dan pertanian. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial



terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.

- d. Wilayah kepulauan Kabupaten Gresik berada di Pulau Bawean dan pulau kecil sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Potensi bahanbahan galian di wilayah ini cukup potensial dengan adanya jenis bahan galian mineral non logam spesifik (batu onyx).

Sebagai wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan besar, maka Kabupaten Gresik memiliki akses perdagangan regional dan nasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Gresik sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal.

Keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal.

Pola aliran sungai di Kabupten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini mempunyai sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri



oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik mempunyai dataran tinggi diatas 25 meter diatas permukaan laut, mempunyai kelerengan 2 – 15 %, serta adanya faktor pembatas alam berupa bentuk-bentuk batuan yang relatif sulit menyerap air (tanah clay) yang terdapat di Kecamatan Bungah dan Kecamatan Dukun. Kondisi diatas merupakan lahan kritis dan lahan yang sangat peka terhadap bencana – bencana alam.

Melihat kondisi di atas diindikasikan beberapa kawasan mempunyai kecenderungan terjadinya erosi akibat dari gerusan air, terutama air hujan. Daerah-daerah yang terkena bencana erosi sebagian besar wilayah Kabupaten Gresik, untuk DAS Kali Lamong meliputi Kecamatan Balongpanggang, Cerme, Benjeng, Kedamean, dan Menganti. Untuk DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Dukun, Manyar, Bungah, Sidayu, dan Ujung Pangkah. Sedangkan DAS Kali Surabaya meliputi Kecamatan Wringinanom dan Driyorejo.

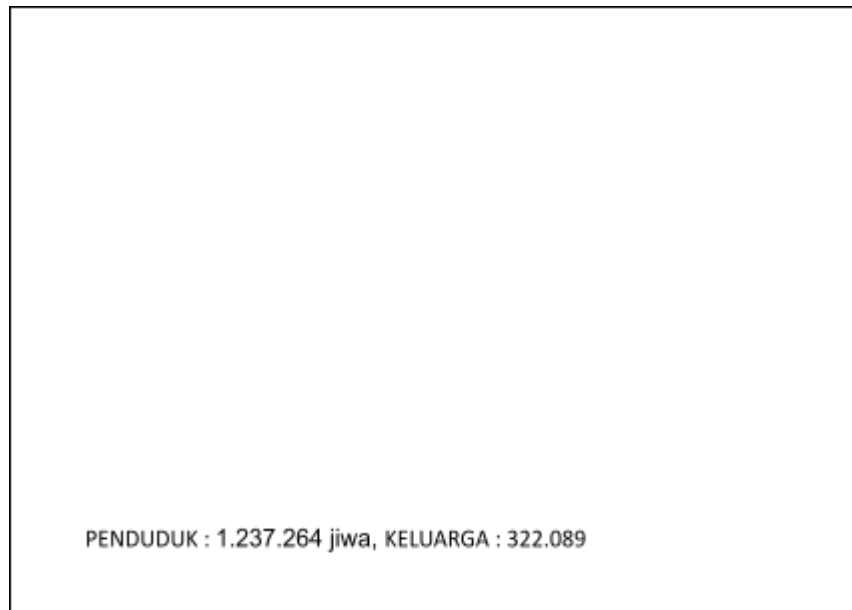
Sebagian kawasan pantai terdapat kawasan yang terabrasi dan intrusi air laut. Abrasi yang terjadi meliputi Kecamatan Bungah, Ujung Pangkah, Panceng, Sangkapura dan Tambak, Sedangkan Intrusi air laut terjadi di wilayah kecamatan Gresik, Kebomas, Manyar, Bungah, Sidayu dan Ujung Pangkah. Hal ini juga diperparah dengan adanya kawasan budidaya terbangun yang berbatasan langsung dengan garis pantai tanpa memperhatikan sempadan pantai yang semestinya bebas dari bangunan

2.1.3. ASPEK DEMOGRAFI

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik, hingga akhir tahun 2010 memiliki total penduduk sejumlah 1.237.264 jiwa dan terdiri dari 322.089 keluarga. Jumlah penduduk yang melebihi



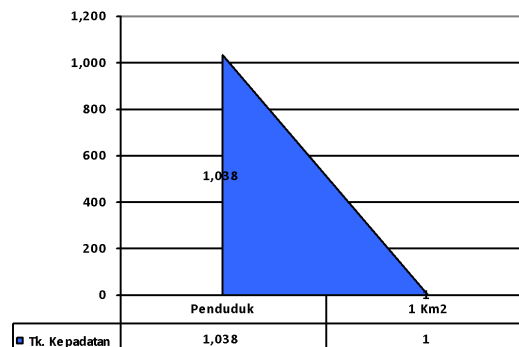
angka satu juta tersebut menghuni area wilayah seluas 1.191,25 Km², sehingga kemudian dapat dihitung ratio kepadatannya adalah sebesar 1.038 jiwa/km², dengan rata-rata per keluarga terdiri dari 4 orang.



(Sumber Data : Dispendukcapilsos, 2010)

Namun demikian, masalahnya bahwa tingkat kepadatan penduduk Gresik tersebut tidaklah merata pada keseluruhan wilayah.

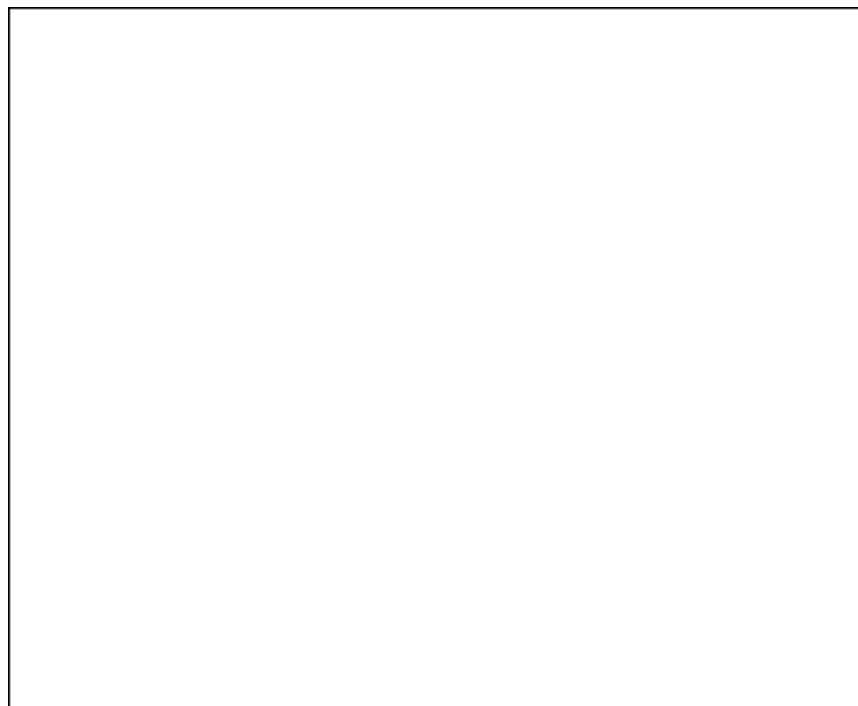




(Jiwa/1 Km2)

(Sumber Data : Dispendukcapilsos, 2010)

Wilayah perkotaan jauh dipadati penduduk sebesar 2,193 jiwa/km² dibandingkan wilayah pedesaan yang hanya dihuni 896 jiwa/km².





Kondisi empiris ini tentu harus direspon secara objektif oleh pemerintah daerah, terutama menyangkut alokasi fasilitas dasar kebutuhan penduduk.



Problematika lain adalah bahwa dari sejumlah 322.089 keluarga yang ada di Gresik, masih terdapat sejumlah 70.421 keluarga miskin atau sebanyak 241.514 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.237.264 jiwa, maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik tahun 2010 sebesar 19,52 %. Fakta ini tentu perlu direspon dengan kebijakan efektif, terutama perumusan prioritas program kebijakan penanggulangan kemiskinan bagi keluarga-keluarga miskin tersebut.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Produk Pemerintah Daerah yang paling utama adalah hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berdampak kepada kinerja sosial dan



ekonomi masyarakatnya. Secara alami kebijakan publik kurang dapat diukur secara langsung, namun lebih dapat diukur secara tidak langsung melalui salah satu diantaranya indikator ekonomi. Pembangunan daerah dilaksanakan pada berbagai aspek kehidupan, yang antara lain diupayakan dengan melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi.

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Pembangunan ekonomi mempunyai kedudukan yang amat penting, karena keberhasilan di bidang ekonomi dapat menyediakan sumber daya yang lebih luas bagi pembangunan di bidang lainnya. Untuk melakukan pembangunan diperlukan landasan yang kuat, yaitu pengambilan kebijakan yang tepat, akurat dan terarah, supaya hasil yang dicapai akan benar-benar sesuai dengan yang direncanakan.

2.2.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

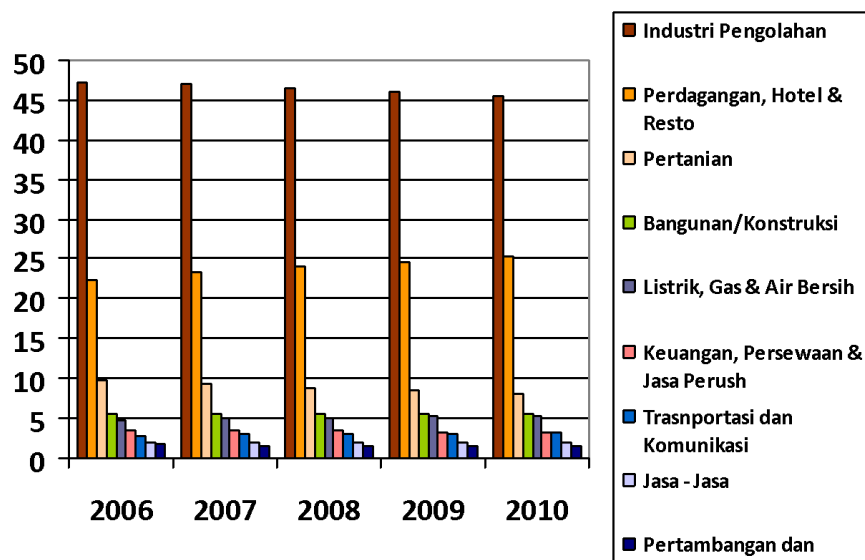
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk diatas garis kemiskinan, angka kriminalitas yang tertangani.

2.2.1.1 Struktur Ekonomi

Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ekonomi di Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun menunjukkan arah positif. Ditinjau dari struktur perekonomian yang ada, pilar utamanya adalah industri pengolahan. Terhadap sumbangannya pada PDRB, sektor industri pengolahan menyumbang 45,97 % dari seluruh

konstruksi ekonomi daerah Gresik. Dengan banyaknya industri tersebut akan ada kecenderungan semakin cepat berdiri industri baru yang merupakan mata rantai industri yang saling menunjang. Dengan demikian sektor Industri merupakan sektor yang bisa diharapkan memulihkan perekonomian kabupaten Gresik, karena sektor ini disamping menyerap banyak tenaga kerja juga menggerakkan perkembangan sektor-sektor yang lain.

STRUKTUR EKONOMI (ADHK) DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2006-2010 (%)



(Sumber Data : Buku PDRB Kab. Gresik, 2010)

Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor yang sangat erat dengan sektor Industri, sehingga mempunyai sumbangan di urutan kedua, yaitu sebesar 25,42 % pada tahun 2010 yang sebelumnya sebesar 24,73 % pada tahun 2009. Pembangunan infrastruktur yang menunjang sektor Industri merupakan kebutuhan utama, ini bisa dilihat dari perannya yang selalu naik dari tahun ke tahun yaitu: sektor Listrik, Gas dan Air Bersih yakni sebesar 5,26 % di tahun 2010 yang sebelumnya sebesar 5,19 % di tahun 2009.



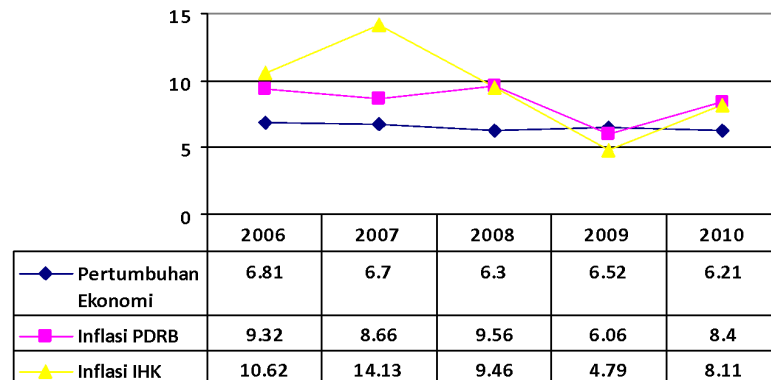
Wilayah kabupaten Gresik yang memanjang dari utara ke selatan atau dari kecamatan Panceng hingga kecamatan Wringinanom sejauh lebih dari 82 km, apalagi jika ditambah dengan kecamatan Tambak di pulau Bawean menjadi berjarak lebih dari 208 km, ternyata kabupaten Gresik masih memiliki potensi sektor Pertanian yang cukup besar. Sektor Pertanian mempunyai peranan di urutan ketiga yakni sebesar 8,15 % di tahun 2010.

Ketiga sektor tersebut di atas selalu menunjukkan kecenderungan menguat dari tahun ke tahun, oleh karena itu perlu terus didukung dengan kebijakan-kebijakan efektif menyangkut iklim usaha, sarana dan prasarana serta komitmen pengembangannya.

2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi

Secara nyata kemajuan ekonomi Kabupaten Gresik dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2006 hingga 2010 pertumbuhan ekonomi Gresik mengalami fluktuasi dari 6,81 % tahun 2006 hingga mencapai 6,21 % pada pertengahan tahun 2010, atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 5,01 % dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,50 %. Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu tersebut memang ada akselerasi pergerakan nyata ekonomi daerah yang cukup dinamis, sebab pertumbuhan daerah ini juga diiringi oleh kecenderungan inflasi PDRB yang menurun.





(Sumber Data : Buku PDRB Kab. Gresik, 2008 dan Buku RKPD Kab. Gresik, 2011)

Sektor Industri yang mendominasi struktur ekonomi hingga di atas 45 % menjadi salah satu penentu baik buruknya perekonomian wilayah ini, jika sektor Industri jatuh akan mempengaruhi sektor-sektor yang lain jatuh, sebaliknya jika sektor ini membaik, maka akan membaik pula sektor-sektor yang lain.

2.2.1.3 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita yang diukur dengan PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun dapat digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran suatu daerah. Biasanya makin meningkat angka PDRB perkapita, maka kemakmuran juga diharapkan makin tinggi.

Di tahun 2009 rata-rata pendapatan perkapita kabupaten Gresik kalau dihitung berdasarkan PDRB atas harga berlaku ialah sebesar Rp. 22.407.580,32, sedangkan kalau dihitung berdasarkan PDRB atas harga konstan 2000 nilainya sebesar Rp. 10.689.930,31. Kalau dibandingkan dengan PDRB perkapita tahun 2008, maka telah terjadi kenaikan sebesar 10,13 % kalau dihitung berdasarkan



PDRB atas harga berlaku dan 4,2 % kalau dihitung berdasarkan PDRB atas harga konstan 2000.

Pada gambar di bawah dapat dilihat perkembangan antara PDRB Perkapita atas harga berlaku dan atas harga konstan 2000, mulai tahun 2005 hingga tahun 2009. PDRB atas harga berlaku tampak lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB atas harga konstan 2000. Hal ini disebabkan PDRB atas harga berlaku masih dipengaruhi dengan perubahan harga atau inflasi yang terjadi selama satu tahun.

Perlu perhatian dalam membaca angka pendapatan perkapita sebagai indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah, karena masih mengandung beberapa kelemahan. Diantaranya adalah PDRB perkapita tidak memperhatikan distribusi pendapatan dan kepemilikan faktor produksi.



(Sumber Data : Buku PDRB Kab. Gresik, 2010)

Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, kenaikan pendapatan perkapita tersebut memiliki makna sebagai kenaikan status ekonomi masyarakat pula. Dengan lain kata, kondisi empiris tersebut, mengindikasikan bahwa



perekonomian daerah Kabupaten Gresik memang mengalami pergerakan positif hingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduknya.

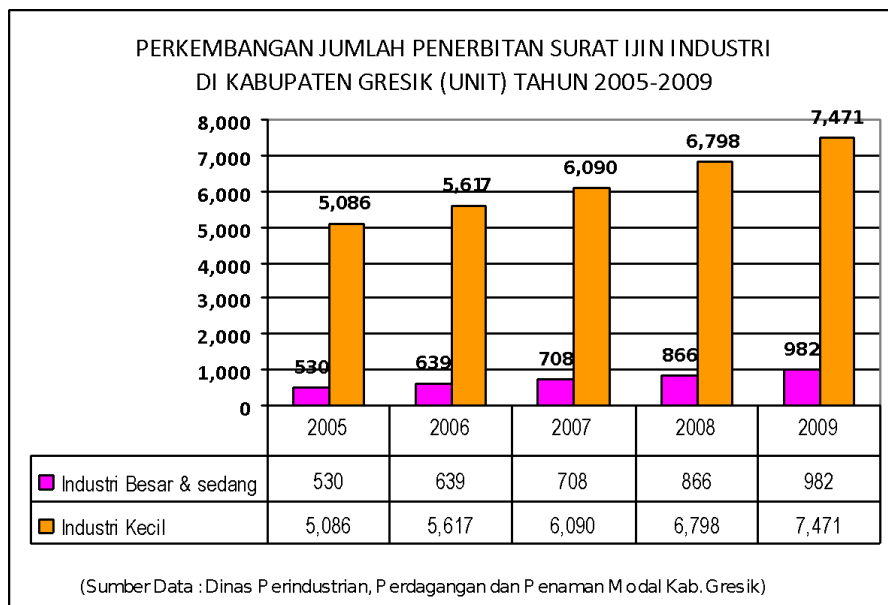


Struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan inflasi PDRB merupakan ukuran global tentang kondisi perekonomian di suatu wilayah. Untuk mendapatkan gambaran lebih rinci, maka diperlukan tinjauan sektoral / lapangan usaha.

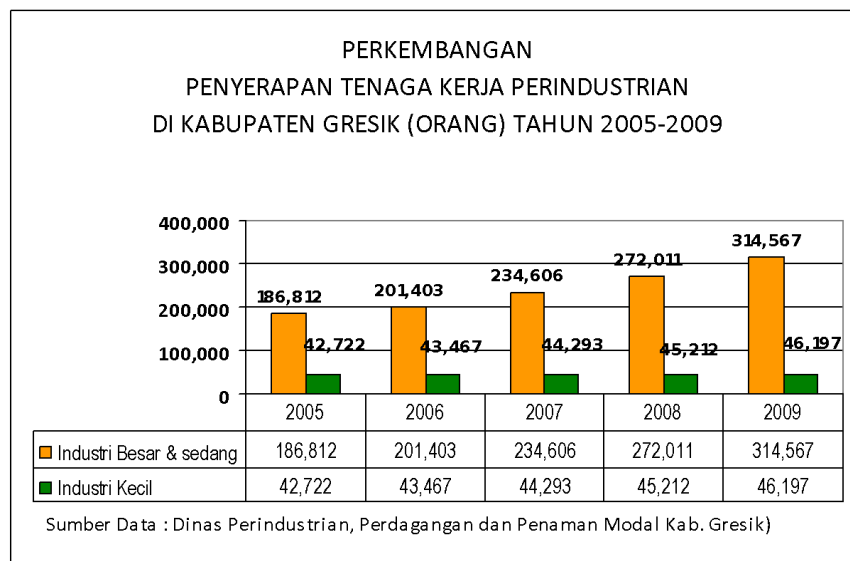
2.2.1.4 Industri

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Gresik saat ini masih tergantung dari semakin meningkatnya peran sektor Industri yakni 47,27 % di tahun 2006, 46,89 % di tahun 2007, 46,43 % di tahun 2008 dan 45,97 di tahun 2009. Sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Gresik.

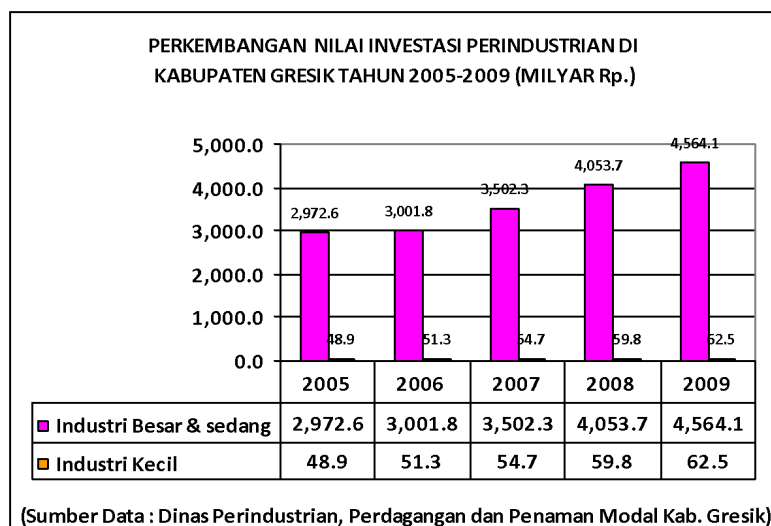
Industri kecil, sedang dan besar rata-rata tercatat mengalami kenaikan signifikan pada periode tahun 2005 hingga tahun 2009. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, industri kecil kecil bertambah 2.385 unit, dari 5.086 unit menjadi 7.471 unit, sedangkan industri sedang dan besar juga mengalami pertumbuhan tak kurang dari 452 unit, yaitu dari 530 unit menjadi 982 unit.



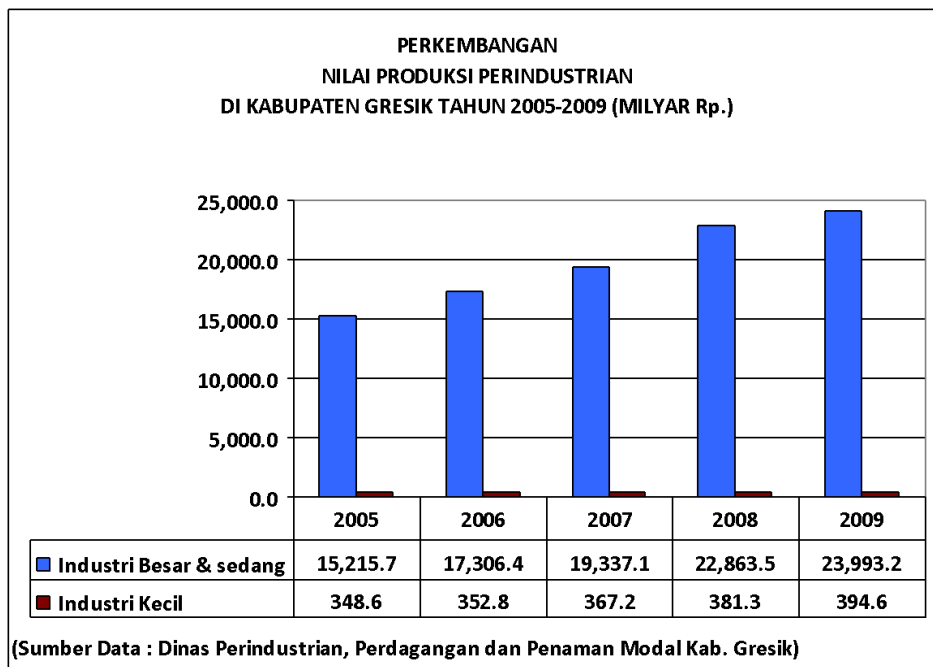
Produksinya disamping memenuhi kebutuhan lokal juga mempunyai pangsa pasar nasional maupun internasional. Sektor ini juga diharapkan mengatasi masalah pengangguran, karena sektor ini banyak menyerap tenaga kerja. Untuk industri kecil penyerapan tenaga kerja pada tahun 2005 sebanyak 42.722 orang bertambah menjadi 46.197 orang pada tahun 2009. Sedangkan pada industri besar dan sedang sampai dengan tahun 2009 mampu menyerap 314.567 orang tenaga kerja, walaupun tidak seluruh tenaga kerja yang terserap adalah penduduk kabupaten Gresik.



Perkembangan nilai investasi perindustrian di Kabupaten Gresik juga terus mengalami peningkatan berarti selama lima tahun terakhir. Hal ini terlihat pada industri besar dan sedang, dari sebesar 2.972,6 milyar rupiah nilai investasinya di tahun 2005 berkembang menjadi 4.564,1 milyar rupiah pada tahun 2009. Sedangkan pada industri kecil, dari 48,9 milyar rupiah di tahun 2005, nilainya bertambah menjadi 62,5 milyar rupiah pada tahun 2009.



Keberhasilan pembangunan industri di Kabupaten Gresik juga terlihat dari perkembangan nilai produksi perindustrian selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan positif. Pada industri besar dan sedang, dari nilai produksi sebesar 15.215,7 milyar rupiah di tahun 2005 meningkat menjadi 23.993,2 milyar rupiah pada tahun 2009. Sedangkan pada industri kecil, dari nilai produksi sebesar 348,6 milyar rupiah di tahun 2005 meningkat menjadi 394,6 milyar rupiah pada tahun 2009.



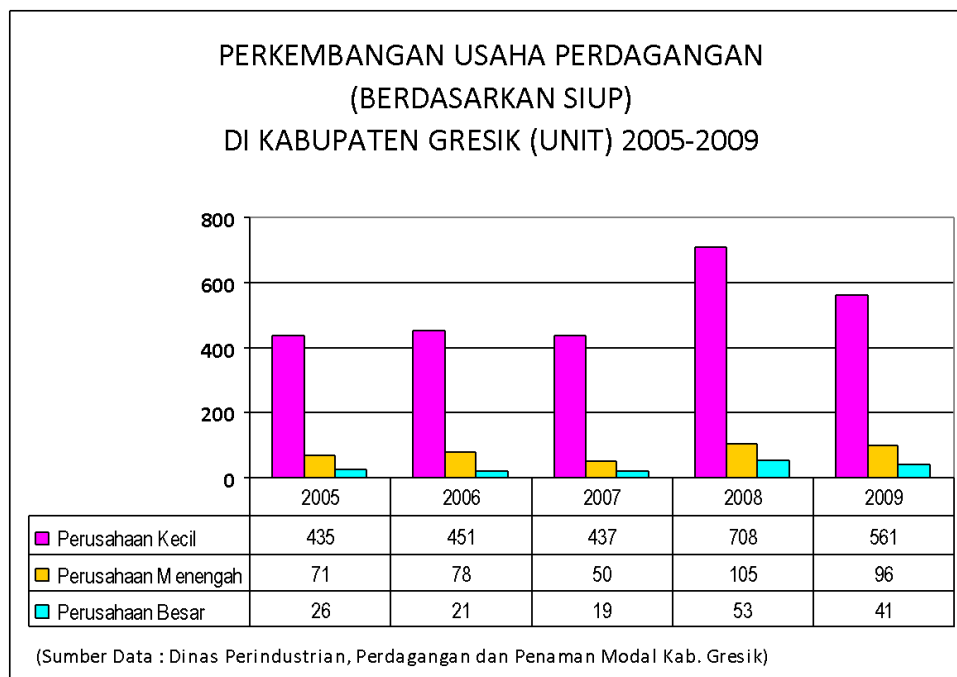
Prospek sektor ini cukup cerah, oleh sebab itu debirokratisasi diharapkan lebih digalakkan pemerintah, dengan memberi kemudahan para investor untuk menanamkan modalnya, memberi keamanan dan kepastian hukum, sehingga dapat memacu pertumbuhan sektor ini.

Sumbangan terbesar sub sektor di sektor Industri pada tahun 2009 adalah sub sektor Industri Kayu dan sejenisnya yaitu 10,35 %, kemudian sub sektor Industri Kimia, Minyak Bumi, Karet dan Plastik sebesar 14,48 %, sub sektor

Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit sebesar 8,06 %. Sementara itu, sub sektor Industri Barang dari Logam, Mesin dan Peralatan sebesar 6,77 %, serta sub sektor Industri Pengolahan Logam Dasar mengalami pertumbuhan paling kecil sebesar 2,19 %.

2.2.1.5 Perdagangan, Hotel dan Restoran

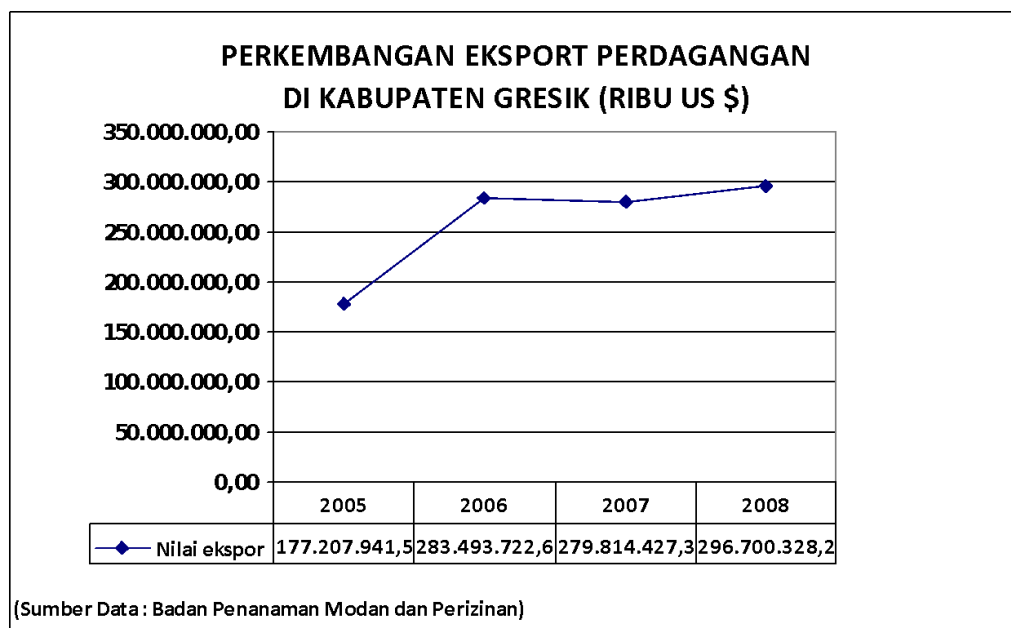
Mengingat struktur ekonomi kabupaten Gresik terbesar disumbang oleh Industri, dimana Industri merupakan sektor yang menghasilkan produk barang, maka Perdagangan, Hotel dan Restoran berperan sebagai penunjang kegiatan tersebut sehingga wajar sektor ini menempati urutan kedua di dalam pembentukan PDRB.



Pada tahun 2006 sumbangan sektor perdagangan pada PDRB adalah sebesar 22,47 %, kemudian sedikit menurun pada tahun 2007 sebesar 23,30 %,

tahun 2008 sebesar 24,05 % dan di tahun 2009 naik kembali menjadi sebesar 24,66 %.

Dilihat dari perkembangan usaha perdagangan (berdasarkan SIUP), nampak bahwa ketiga jenis perusahaan perdagangan yang ada (perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar) menunjukkan berangsur naik sejak tahun 2007 sampai dengan 2008. Tercatat "hanya" ada 437 unit usaha dagang kecil di tahun 2007 tumbuh menjadi 708 unit di tahun 2008. Demikian pula, untuk jenis usaha dagang berskala menengah dan besar juga mengalami kenaikan jumlah unit usahanya. Perusahaan dagang menengah dicatat ada 50 unit di tahun 2007 menjadi 105 unit usaha di tahun 2008. Sedangkan perusahaan dagang besar juga bertambah dari "hanya" 19 unit usaha di tahun 2007 menjadi 53 unit usaha dagang di akhir tahun 2008.





Sementara itu, perkembangan nilai ekspor perdagangan mencatat angka fantastis pada tahun 2008. Setelah turun dari 283.493.722,61 US\$ di tahun 2006 menjadi 279.814.427,39 US\$ di tahun 2007, pada tahun 2008 meningkat drastis menjadi 296.700.328,21 US\$.

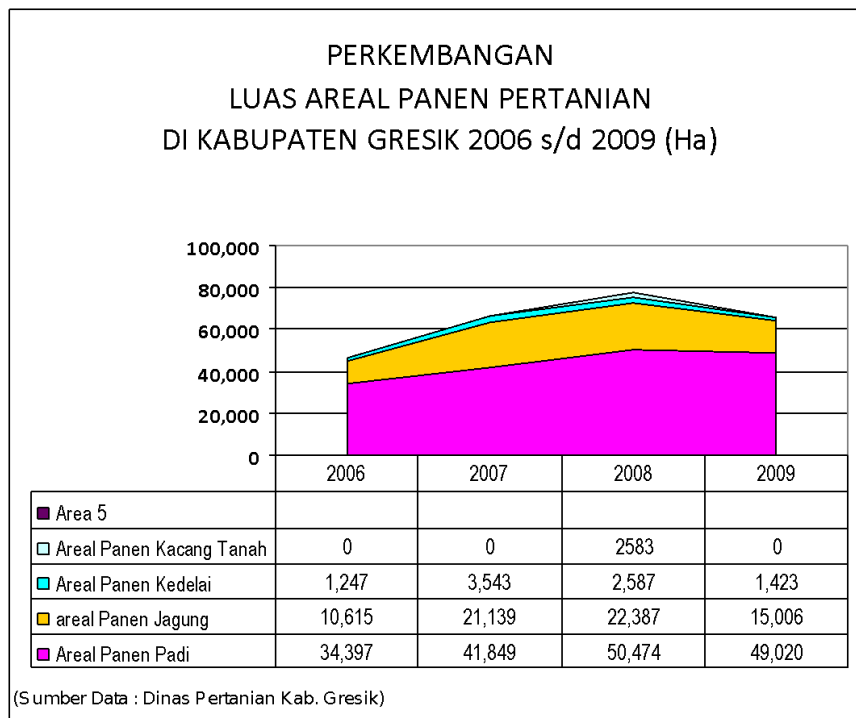
2.2.1.6 Pertanian

Sektor Pertanian dalam pembentukan struktur ekonomi menempati urutan ketiga setelah sektor Industri dan Perdagangan, yaitu sebesar 8,86 % di tahun 2008 dan 8,57 % di tahun 2009.



Di tahun 2007 peranan sektor ini sebesar 9,25 %, ini berarti di tahun 2008 turun menjadi 8,86 % dan kemudian turun terus hingga tahun 2009 menjadi 8,57 %. Walaupun produksi dan harga bisa ditingkatkan dari tahun ke tahun, sektor ini

perannya akan semakin mengecil dan digeser oleh sektor-sektor yang lain. Hal ini disebabkan kenaikan sektor ini tidak akan secepat sektor Industri, Perdagangan dan sektor-sektor yang lain. Kejadian lain yang tidak bisa dihindari adalah lahan pertanian yang ada semakin banyak berubah menjadi lahan selain Pertanian, seperti Perumahan dan Industri. Oleh sebab itu, walaupun segala upaya intensifikasi menggunakan teknologi terapan, produksi tidak begitu saja naik.



Deskripsi lebih mendetail, sub sektor Tanaman Bahan Makanan mempunyai peranan 3,78 %, Perikanan 3,49 %, Peternakan dan hasilnya 1,47 % dan Tanaman Perkebunan sebesar 0,12 %. Pertumbuhan sektor Pertanian di tahun 2008 sebesar 1,86 %, angka ini 0,47 % lebih kecil dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,39 %. Sub sektor Perikanan di tahun 2008 mempunyai pertumbuhan paling tinggi di sektor ini yaitu sebesar 2,94 %, kemudian sub sektor Perkebunan 1,06 %, sub sektor Tanaman Peternakan sebesar 4,17 % dan sub sektor Tanaman Bahan Makanan turun sub sektor Tanaman Bahan Makanan



turun sebesar 0,47 %, sub sektor Tanaman Perkebunan sebesar 0,23 %, sub sektor Peternakan naik sebesar 0,25 % dan sub sektor Perikanan naik sebesar 1,32 %.

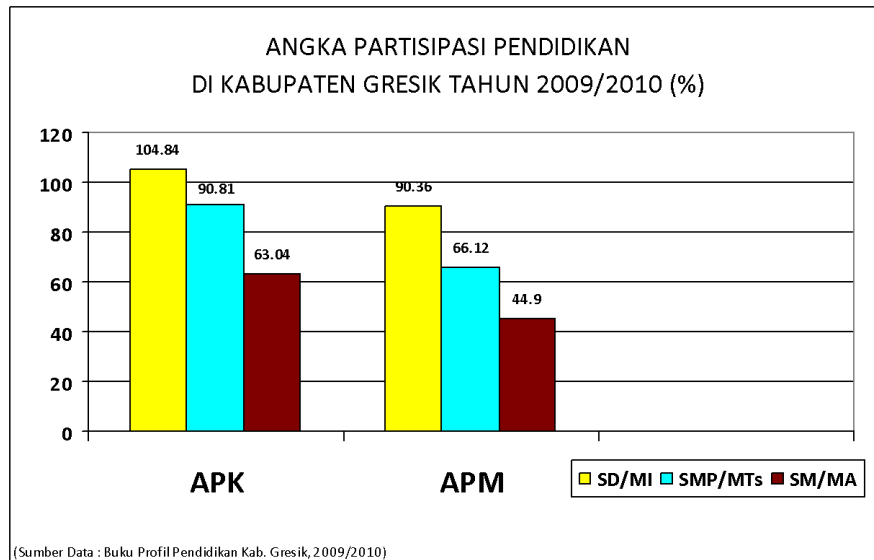
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Pendidikan

Berdasarkan data yang terdapat dalam Buku Profil Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2009/2010, gambaran umum terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Gresik dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan, seperti pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi internal pendidikan.

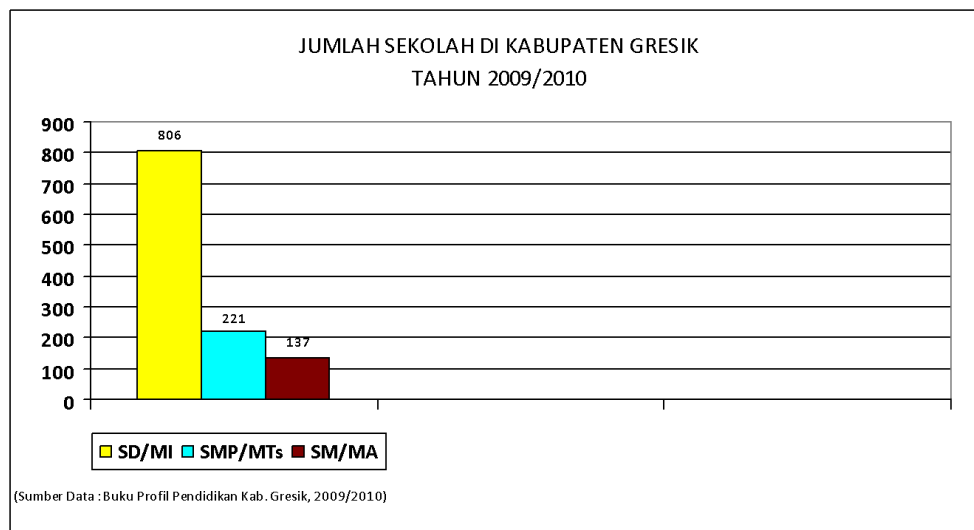
2.2.2.1.1 Pemerataan Pendidikan

Pemerataan yang dimaksud diukur dengan beberapa indikator yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) perbandingan antar jenjang, rasio pendidikan, angka melanjutkan, tingkat pelayanan sekolah. Berdasarkan APK, maka angka yang tertinggi adalah pada jenjang SD, dilanjutkan dengan jenjang SMP dan jenjang SM pemerataannya yang paling rendah. Rendahnya pemerataan pada tingkat SM ini adalah akibat dari keadaan ekonomi sebagian masyarakat yang belum memadai.



Sesuai dengan besarnya APK, maka besarnya APM juga mengikuti, yaitu makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah nilai APMnya.

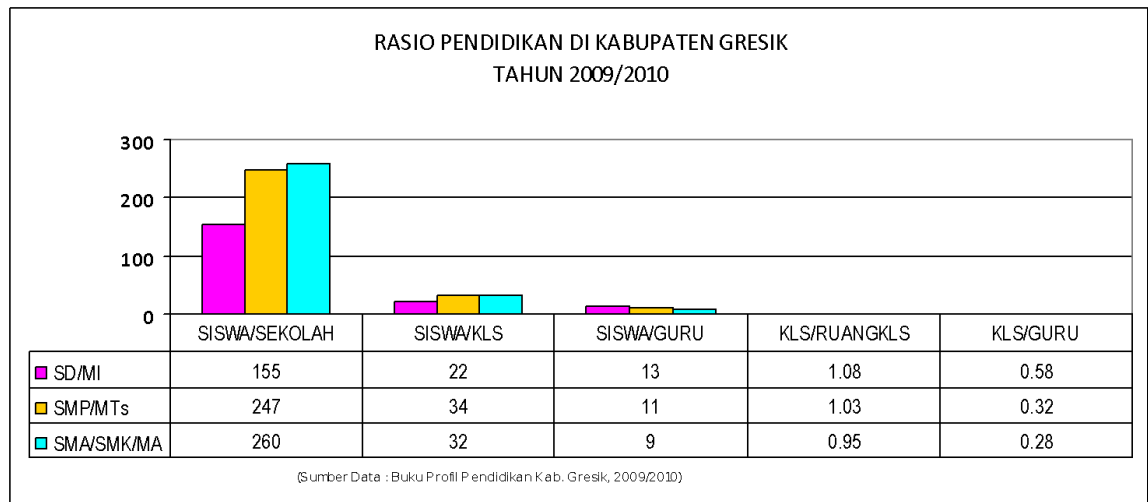
Bila dilihat perbandingan antar jenjang, maka masih terjadi ketimpangan antara sekolah tingkat SD dengan tingkat SMP apalagi untuk tingkat SM. Bila tingkat SMP harus sama dengan tingkat SD maka diperlukan tambahan sekolah sebesar 585 lembaga. Demikian juga untuk jenjang SM perlu 669 lembaga.



Indikator berikutnya membicarakan tentang rasio siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas, dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah terpadat di tingkat SM/MA dengan angka 260 dan terjarang terdapat di tingkat SD dan MI dengan angka 155. Hal itu menunjukkan bahwa sekolah di daerah ini sangat heterogin. Keheteroginan sekolah juga terlihat dari adanya tipe sekolah, yaitu type A, B, C dan kecil. Siswa perkelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 38 anak ternyata pada kenyataannya juga sangat bervariasi. Rasio siswa perkelas terpadat terdapat di tingkat SMP/MTs yaitu 34 dan terjarang terdapat di tingkat SD/MI yaitu 22.

Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar terdapat pada tingkat SD/MI yaitu 13 dan terendah terdapat pada SM dan MA yaitu 9. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di tingkat pendidikan tersebut. Sebaliknya rasio terkecil menunjukkan cukupnya guru di tingkat tersebut. Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah pada tingkat SD dan MI, yaitu sebesar 1,08. Hal itu berarti bahwa pada tingkat tersebut masih memerlukan ruang kelas tambahan, jika diharapkan jumlah ruang kelas sama

dengan jumlah kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Sebaliknya terdapat ruang kelas yang tidak digunakan, ini terlihat pada rasio di bawah 1 yang terdapat di SMTP dan MTs.



Sejalan dengan perbandingan antara sekolah di tingkat SLTP dan SD yang cukup tinggi, maka angka melanjutkan ke tingkat SMP juga cukup tinggi yaitu 99,92. Diharapkan bila jumlah tingkat SMP di tingkatkan maka angka melanjutkan juga akan meningkat. Sebaliknya angka melanjutkan ke tingkat SM lebih kecil yaitu 94,69 dengan melanjutkan ke tingkat SMP. Salah satu sebab rendahnya angka melanjutkan ini karena perbandingan sekolah tingkat SM dan SMP juga rendah.





2.2.2.1.2 Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu dimaksud diukur dengan berbagai indikator, yaitu persentase lulusan TK/RA/BA, angka mengulang, angka putus sekolah, angka lulusan, angka kelayakan guru mengajar, persentase kondisi ruang kelas, persentase fasilitas sekolah, angka partisipasi dari biaya dan satuan biaya sekolah.

Khusus untuk SMP dan SMA ditambah dengan indikator kesesuaian Guru mengajar menurut bidang studi. Siswa baru SD dan MI yang berasal dari TK/RA/BA adalah sebesar 94.30%. Angka mengulang yang terbesar terdapat pada tingkat SD yaitu 1.60%, sedangkan angka putus sekolah yang terbesar terdapat pada tingkat SMK, yaitu 0.62% dan angka lulusan terbesar terdapat pada tingkat SMK, yaitu 98,45%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat SD dan MI perlu ditangani lebih lanjut karena memiliki nilai negatif yang berarti mutunya kurang.

Indikator kelayakan mengajar guru, ternyata di tingkat guru yang layak mengajar paling besar terdapat pada tingkat SMK yaitu 97,73% dan yang paling rendah pada tingkat SD yaitu 52.75%. Kondisi ruang kelas terbaik terdapat pada tingkat SMK dan sebaliknya yang kondisinya rusak berat terbanyak terdapat pada tingkat SD. Dari fasilitas sekolah yang ada, masih ada sekolah yang belum memiliki perpustakaan. Demikian juga dengan lapangan olahraga dan ruang UKS, masih ada beberapa sekolah belum memiliki.

Pada kenyataan, angka partisipasi dari segi biaya lebih banyak terdapat berasal dari Pemerintah Daerah pada tingkat SD. Jika dibandingkan dengan orangtua/wali murid atau pemerintah daerah pusat. Pada tingkat SMP, partisipasi terbesar berasal dari Pemerintah Pusat, sedangkan pada tingkat SM, partisipasi yang terbesar berasal dari orangtua.



Indikator Mutu Pendidikan

Tahun 2009/2010

NO	INDIKATOR	SD+MI	SMP+MTS	SMA+SMK+MA
1	Persentase lulusan TK/RA/BA	94.52		
2	Angka Mengulang	1.29	0.07	0.17
3	Angka putus Sekolah	0,03	0.23	0.30
4	Angka Lulusan	100,00	100,00	100,00
5	Angka Kelayakan Mengajar			
	a. Layak	65,65	82,85	95,57
	b. Tidak Layak		17,15	4,43
6	Presentase Kesesuaian Guru Mengajar SMP/SMA		SMP	SMA
	a. PPKN		6,36	5,41
	b. Pendidikan Agama		15,98	9,14
	c. Bahasa Indonesia		10,23	7,94
	d. Bahasa Inggris		9,46	8,41
	e. Sejarah dan Sej. Budaza		-	4,15
	f. Pendidikan Jasmani		5,09	4,93
	g. Matematika		10,81	8,78
	h. IPA		11,81	
	1. Fisika		-	6,37
	2. Kimia		-	5,89
NO	INDIKATOR	SD+MI	SMP+MTS	SMA+SMK+MA
	3. Biologi		-	6,13



	i. IPS		10,38	
	1. Ekonomi		-	5,65
	2. Sosiologi		-	3,43
	3. Geografi		-	3,73
	j. Seni Budaya		2,82	3,31
	k. Muatan Lokal		5,02	2,59
	l. Tata Negara		-	-
	m. Antropologi		-	0,30
	n. Pendidikan seni		-	-
	o. Bahasa Asing		-	3,01
	p. Bimb. dan Penyuluhan		4,13	3,79
	Q. Lain-lain		-	
7	Persentase Kondisi Rng kelas	SD/MI	SMP/MTs	SM/MA
	a. Baik	55,10	77,16	84,84
	b. Rusak Ringan	28,36	23,31	12,53
	c. Rusak Berat	16,54	11,90	2,63
8	Persentase Fasilitas Sekolah			
	a. Perpustakaan	65,76	85,00	65,69
	b. Lapangan Olah Raga	69,46	64,55	68,61
	c. Unit Kesehatan Sekolah	7,22	49,55	64,23
	d. Laboratorium	-	10,00	42,11
	e. Keterampilan	-	-	27,01
	f. Bimbingan dan penyuluhan	-	-	74,45
	g. Serba Guna	-	-	38,69
	h. Bengkel	-	-	113,33



	i. Ruang Praktek	-	-	70,00
9	Angka Partisipasi (Persentase)			
	a. Pemerintah Pusat	26,87	27,10	2,67
	b. Orang Tua	8,67	20,95	45,69
	c. Pemerintah daerah	58,20	49,00	5,14
10	Satuan Biaya (000 Rp)	1190	1929	1723

(Sumber Data : Buku Profil Pendidikan Kab. Gresik, 2009/2010)

2.2.2.1.3 Relevansi Pendidikan

Relevansi di SD ternyata muatan lokal yang paling relevan dengan sektor mata pencaharian adalah Sektor industri (Industri rumah tangga) dengan mata pelajaran yang dikembangkan adalah ketrampilan. Relevansi di SMA ditunjukkan dengan penjurusan yang dilakukan ternyata SMA telah menggunakan gabungan antara prestasi dan bakat/minat. Kelompok SMK yang paling relevan dengan sektor lapangan kerja adalah kelompok teknologi dan industri.

2.2.2.1.4 Efisiensi Internal

Efisiensi internal diukur dari jumlah keluaran tahun - siswa, putus sekolah, mengulang, lama belajar, tahun siswa terbuang, tahun masukan, kelulusan, dan rasio keluaran/masukan. Berdasarkan jumlah keluaran, ternyata yang paling tinggi adalah MI dan yang paling rendah adalah SMK. Dari tahun - siswa yang paling tinggi pada tingkat SMP dan paling rendah pada tingkat SM.

Jumlah putus sekolah dan mengulang yang seharusnya 0, yang sangat efisien, ternyata yang paling mendekati adalah tingkat SD dan MI untuk putus sekolah dan tingkat SLTP / MTs untuk mengulang. Bila dilihat dari lama belajar lulusan, maka tingkat SD memiliki lama belajar yang paling tidak efisien yaitu 6,10. Sedangkan lama belajar putus sekolah untuk tingkat SMP dan lama belajar

kohort adalah SMP. Dalam kaitan dengan tahun siswa terbangun, ternyata yang terbesar pada tingkat SD dan terendah pada tingkat MA.

Bila dikaitkan dengan satuan biaya per sekolah, maka tingkat SD yang paling boros biayanya yang paling tidak boros adalah MA. Untuk melihat efisien tidaknya suatu sekolah juga dapat diukur dari tahun masukan per lulusan dan rasio keluaran/masukan, angka terbesar terdapat pada tingkat SMP dan terendah terdapat pada SMA.

Angka Melek Huruf adalah prosentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari.

Persentase Angka Melek Huruf Kabupaten Gresik

Tahun 2006-2009

Tahun	Jumlah
2006	48
2007	45
2008	37
2009	65

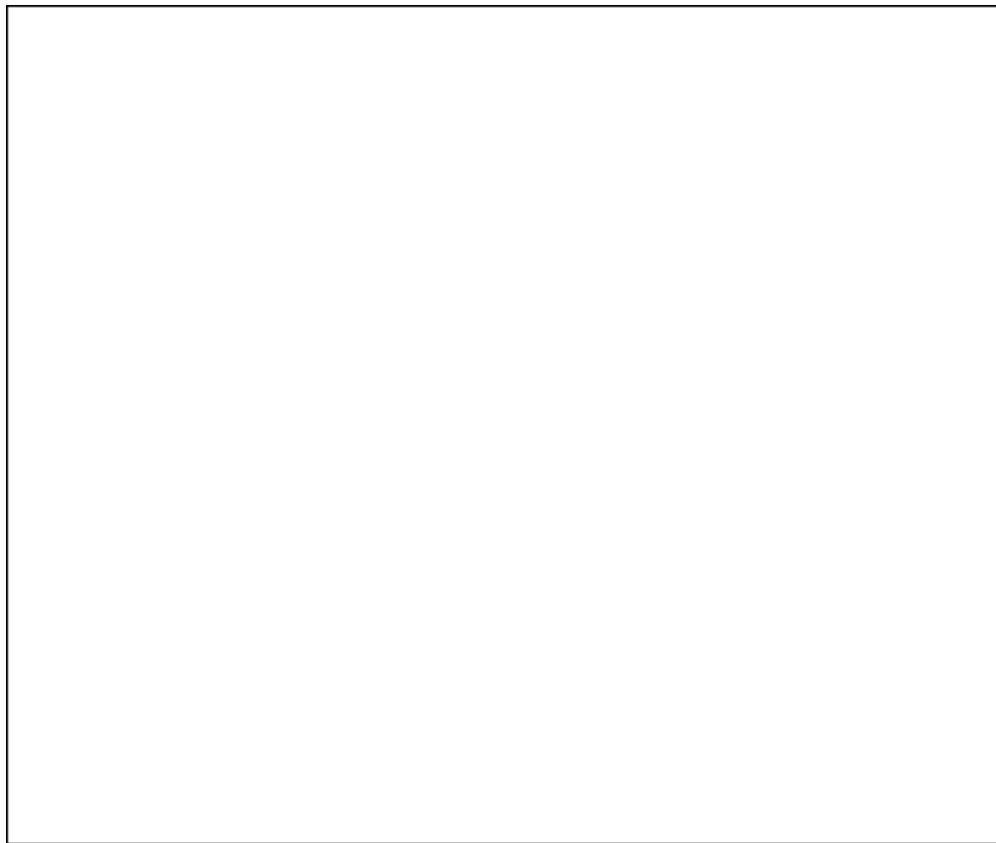
Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Gresik, 2010

2.2.2.2 KESENIAN DAERAH

Kabupaten Gresik memiliki khasanah kesenian daerah, tradisional dan modern yang cukup kaya serta variatif. Jenis kesenian yang ada sebagian bersifat modern, seperti Band (15 group) dan terbanyak Orkes melayu (sebanyak 154 group). Sedangkan jenis kesenian yang bercorak tradisional juga sangat banyak dan variatif, seperti; karawitan (1), ludruk (14), Kuda Kencak (7), reog (2), wayang kulit (27), Mocopat (1), sandur madura (1) dan pelandang (1).



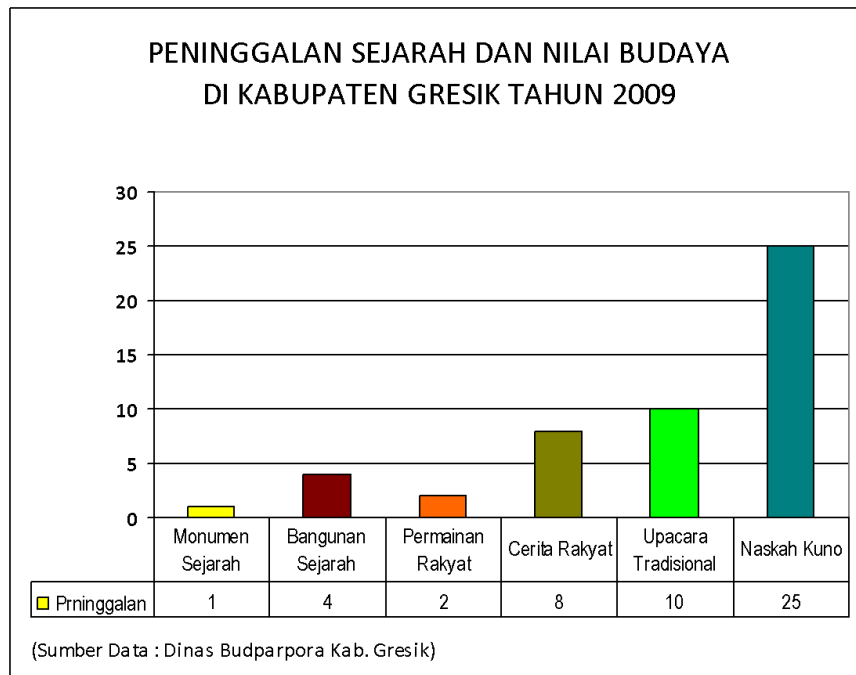
Secara endemik juga terdapat unit kesenian yang berkarakteristik keagamaan seperti; samroh (2), hadrah rodan dan qosidah (19). Kekayaan kesenian daerah yang banyak dan variatif ini merupakan produk kebudayaan dan peradaban masyarakat yang heterogen dan kreatif. Di masa depan potensi ini perlu dilestarikan, didukung bahkan dikembangkan dengan kebijakan serta program-program pemerintah daerah yang tepat.



(Sumber Data : Buku Gresik Dalam Angka, 2009)

Ditinjau dari sejarah dan nilai budaya yang ada di kabupaten Gresik, ditemukan warisan yang cukup banyak dan karenanya perlu dilestarikan. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik

Tahun 2009 berhasil menginventarisir bahwa terdapat tidak kurang dari 25 naskah kuno, 10 jenis upacara tradisional, 8 cerita rakyat, 4 bangunan sejarah, 2 jenis permainan rakyat dan 1 buah monumen sejarah.



Data temuan bersejarah dan nilai budaya ini berkonsekuensi bahwa di masa depan perlu dilakukan upaya atau program pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

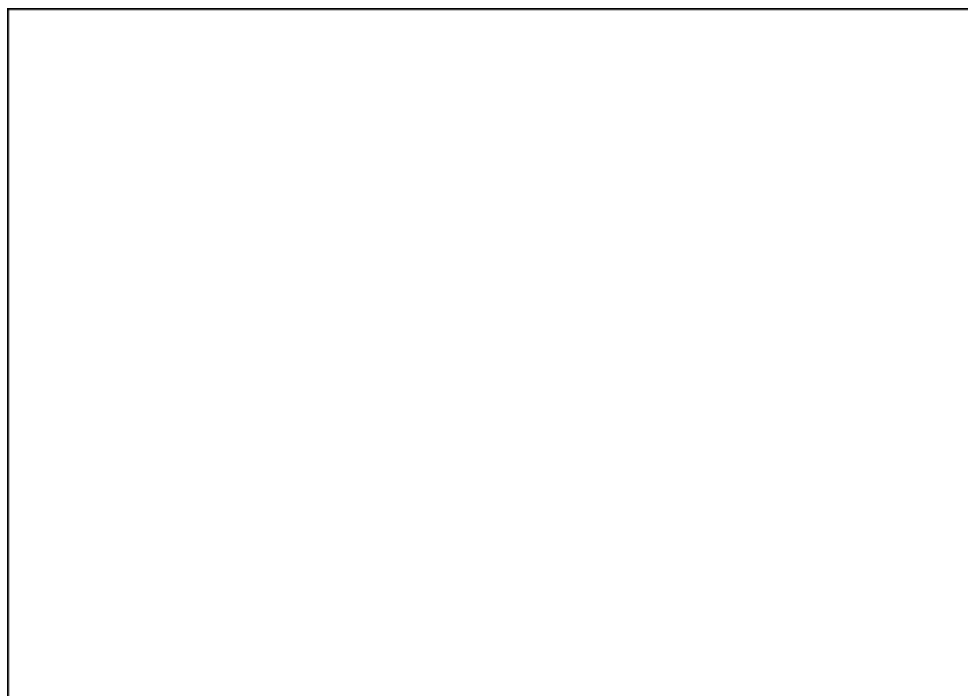
2.2.2.3 Kesehatan

Berdasarkan jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Gresik tahun 2009, tampak bahwa keseluruhan masyarakat cukup terlayani dengan fasilitas kesehatan baik rumah sakit maupun Puskesmas.

Secara keseluruhan terdapat 6 rumah sakit dan seluruh wilayah kecamatan terlayani oleh 32 Puskesmas yang juga didukung dengan 74 Puskesmas Pembantu



dan 34 Puskesmas keliling. Bagi ibu yang hendak melahirkan, selain terlayani dengan keberadaan rumah sakit juga terdapat rumah sakit bersalin sebanyak 10 unit. Kebutuhan obat bagi masyarakat luas juga cukup terpenuhi dengan keberadaan Balai Pengobatan (klinik) sebanyak 51 unit, yang lazimnya sekaligus juga menyediakan obat. Sedangkan jumlah apotik dan toko obat, masing-masing tercatat 88 unit dan 14 unit



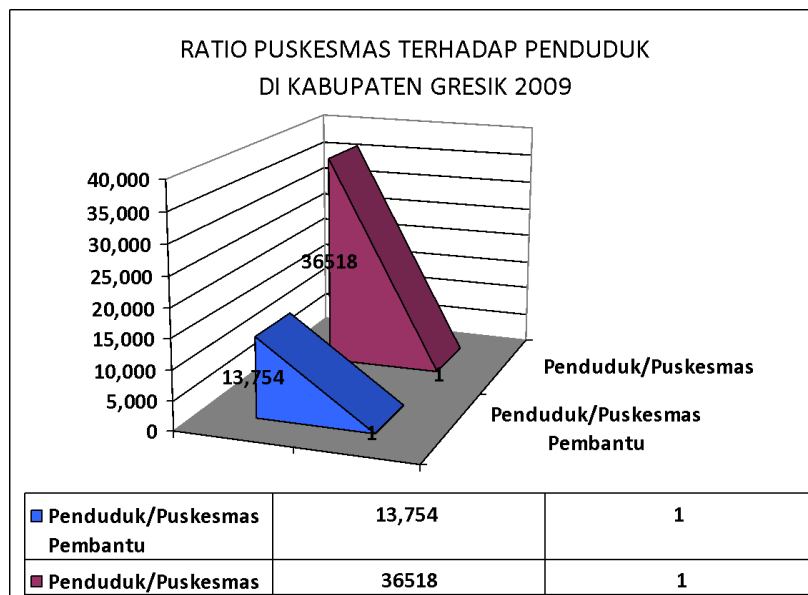
(Sumber Data : Buku Profil Kesehatan Kab. Gresik, 2009)

Kesehatan merupakan hak dan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Di Kabupaten Gresik, pada Tahun 2009, anggaran untuk pelayanan kesehatan telah menyedot lebih dari 8,33 % anggaran daerah (APBD), yaitu sebesar Rp. 86,928,764,119.00.



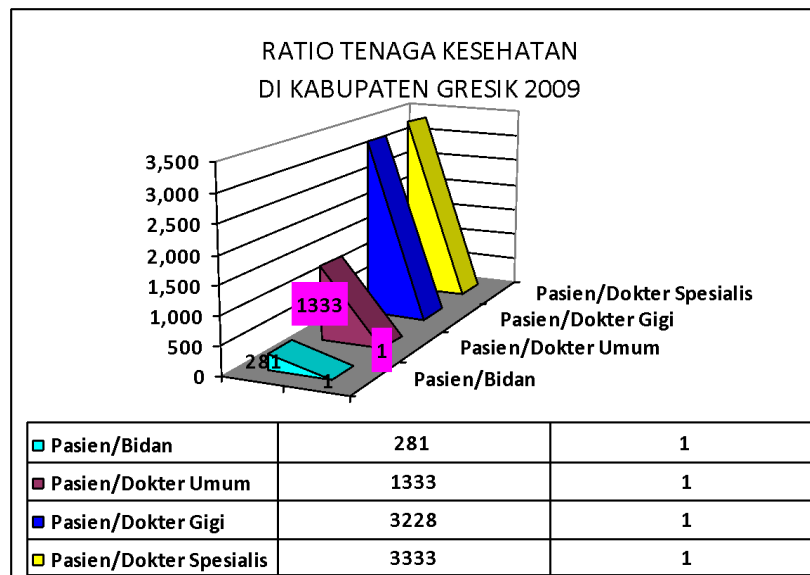
(Sumber Data : Buku APBD Kab. Gresik, 2010)

Selain itu, anggaran kesehatan di Kabupaten Gresik ini juga bersumber dari APBN dan Pinjaman/Hutang Luar Negeri (PHLN) serta sumber-sumber pemerintah lainnya, namun sumber yang berasal dari APBD selalu terbesar mencapai 88 %. Oleh karena itu, di masa datang, perlu diupayakan strategi kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada APBD ini dan perlu dicarikan sumber alternatif pendanaan lainnya.



Profil Kesehatan Kab. Gresik , 2009

Tingkat kecukupan sarana pelayanan kesehatan mulai rumah sakit dan puskesmas terhadap jumlah penduduk Gresik, kiranya masih memadai. Namun bila ditinjau dari ratio pasien terhadap dokter (umum, gigi, dan spesialis), maka masih menunjukkan kesenjangan yang sangat signifikan. Terungkap dalam statistik kesehatan bahwa 1 orang dokter umum di Gresik harus melayani 1.333 pasien. Ratio ini semakin membesar pada pasien-pasien yang hendak berobat pada dokter gigi (1 : 3228) dan Dokter spesialis (1:3333). Namun demikian, ketersediaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling pada setiap kecamatan menjadi sangat membantu, ditambah jumlah Bidan desa yang cukup banyak. Rationya 1 (satu) orang bidan bisa melayani 281 pasien (1 : 281).

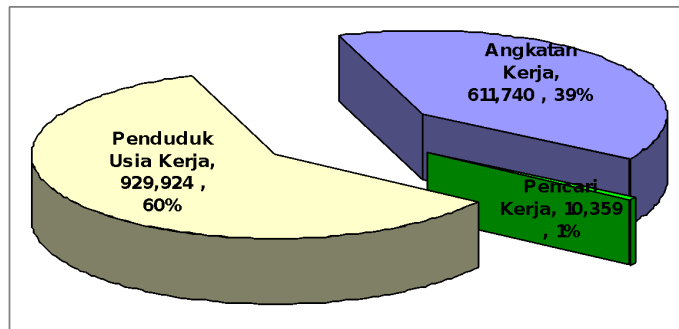


Profil Kesehatan Kab. Gresik, 2009

2.2.2.4 Ketenagakerjaan

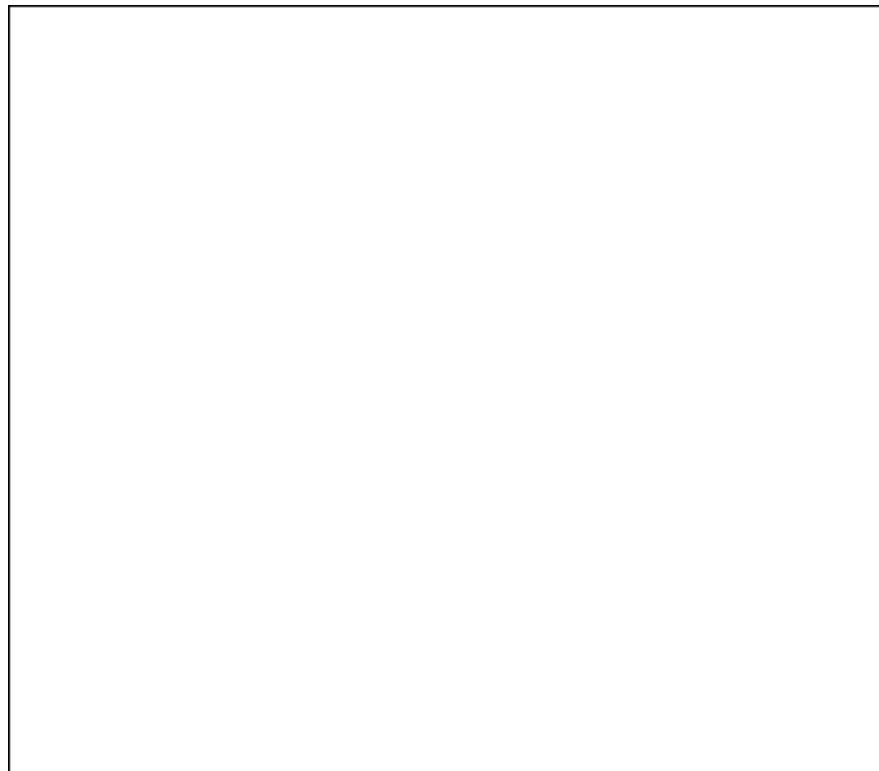
Sebagaimana kondisi nasional, Kabupaten Gresik juga mengalami problematika ketenagakerjaan. Jumlah pengangguran terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

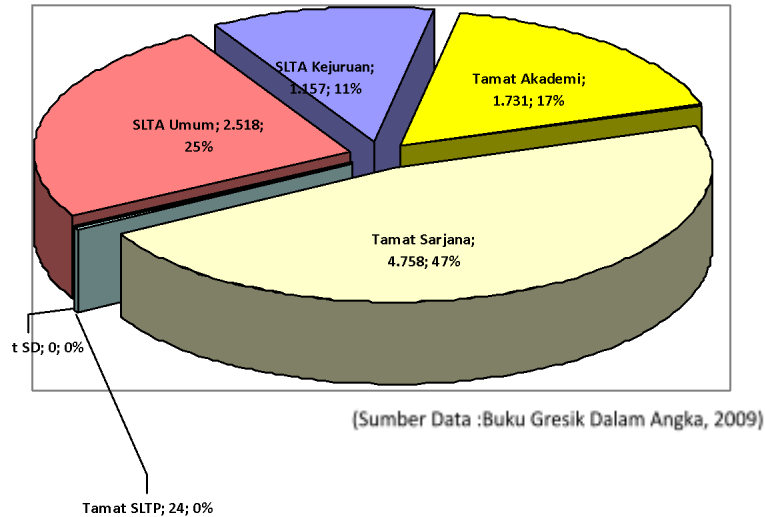




(Sumber Data : Disnaker, 2009)

Terlihat dalam catatan statistik bahwa dari sebanyak 929.924 penduduk yang berusia kerja, 611.740 orang merupakan angkatan kerja yang seharusnya produktif menafkahi diri atau keluarganya. Dari sejumlah angkatan kerja tersebut tercatat 10.359 orang sedang mencari pekerjaan.





Ditinjau dari tingkat pendidikannya, pencari pekerja tersebut hanya berkualifikasi SLTA umum (25 %), selebihnya SLTA kejuruan (11%) dan lulusan sarjana paling banyak, yaitu 4.758 orang atau 47%. Data angka pengangguran penduduk usia 15 sampai 24 tahun sebagai berikut :

Persentase Angka Pengangguran Kabupaten Gresik Tahun 2006-2009

TAHUN	JUMLAH
2006	11,17
2007	9,84
2008	11,32



2009	13,11
------	-------

Sumber Data : Disnaker Kab. Gresik, 2010

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Tujuan keberadaan pemerintah kabupaten adalah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Aspek pelayanan umum yang harus diberikan adalah sebagai berikut:

2.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

2.3.1.1 FOKUS URUSAN PENDIDIKAN

Pelayanan umum untuk urusan pendidikan yang telah dilaksanakan selama tahun 2010 adalah pelayanan kepada anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal.

Pelayanan pendidikan ini meliputi aspek kualitas pendidikan, akseptabilitas pendidikan dan manajemen pendidikan. Beberapa indikator yang telah dicapai selama tahun 2010 adalah:

Pelayanan Urusan Pendidikan Tahun 2010

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$(28.305 / 51.455) \times 100$ % = 55 %
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$(660.118 / 660.118) \times 100\%$ 100% = 100%
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$(101.682 / 119.534)$ 100% = 85,07%



4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	$(31.617 / 61.093) \times 100\% = 51,75\%$
5	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	$(37.917 / 59.419) \times 100\% = 62.89\%$
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$(43 / 124.991) \times 100\% = 0,03\%$
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$(120 / 54.263) \times 100\% = 0,23\%$
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	$(155 / 51.580) \times 100\% = 0,30\%$
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$(18.286 / 18.286) \times 100\% = 100\%$
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$(14.999 / 14.999) \times 100\% = 100\%$
11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	$(10.832 / 10.832) \times 100\% = 100\%$
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$(18.089 / 18.286) \times 100\% = 98,90\%$
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	$(14.114 / 14.912) \times 100\% = 94,65\%$
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$(14.406 / 18.749) \times 100\% = 77\%$

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Gresik, 2010

2.3.1.2 FOKUS URUSAN KESEHATAN

Pelayanan umum untuk urusan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten meliputi pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak,

penanggulangan penyakit menular, pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, serta pelayanan Keluarga berencana.

2.3.1.2.1 SARANA PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN TAHUN 2009-2010 GRESIK

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Gresik selama tahun 2009-2010 yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah terpenuhi sebagai berikut:

NO.	SARANA PELAYANAN	JUMLAH	
		2009	2010
1	RUMAH SAKIT UMUM	6	6
2	RUMAH SAKIT JIWA	-	-
3	RUMAH SAKIT BERSALIN	-	-
4	RUMAH SAKIT KHUSUS LAINNYA	-	-
5	PUSKESMAS	32	32
6	PUSKESMAS PEMBANTU	74	74
7	PUSKESMAS KELILING	34	34
8	POSYANDU	1435	1435
9	POLINDES	222	222
10	RUMAH BERSALIN	-	-
11	BALAI PENGOBATAN/KLINIK	51	51
12	APOTIK	88	88
13	TOKO OBAT	14	14
14	GFK	1	1

2.3.1.2.2 SARANA KESEHATAN DENGAN KEMAMPUAN GAWAT DARURAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2009-2010

Sarana kesehatan yang mempunyai fasilitas pelayanan gawat darurat di kabupaten Gresik tahun 2009-2010 adalah:

NO	URAIAN/KEGIATAN	JUMLAH	
		2009	2010
1.	Rumah Sakit Umum	5	5
2.	Rumah Sakit Khusus	1	1
3.	Puskesmas	32	32
4.	Sarana Kes.Lainnya	27	27

2.3.1.2.3 PENEMUAN DAN PENGobatan PENDERITA TB BTA (+), PNEMONIA BALITA, DIARE BALITA, KUSTA , HIV/AIDS DAN DBD DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2009-2010

Pelayanan atas pemberantasan penyakit menular yang terjadi di masyarakat telah dilaksanakan dengan baik. Seluruh temuan tersebut telah mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan.

NO.	URAIAN	PASIEIN	
		2009	2010
1.	Penemuan dan Pengobatan Penderita TB BTA (+)	701	828
2.	Penemuan dan Pengobatan penderita Peuominia Balita	8524	7896



3.	Penemuan dan Pengobatan Penderita Diare Balita	15919	18250
4.	Penemuan dan Pengobatan Penderita Kusta	180	151
5.	Penemuan dan Pengobatan Penderita HIV/AIDS	46	56
6.	Penemuan dan Pengobatan Penderita DBD	631	694

2.3.1.2.4 HASIL KEGIATAN CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL (K4), PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN, IBU HAMIL RISTI YANG DI RUJUK DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2009-2010

Capaian SPM untuk pelayanan kesehatan ibu hamil selama tahun 2009-2010 adalah:

NO	URAIAN	CAPAIAN	
		2009	2010
1	Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4	71,35%	86.22%
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes	86,40%	72.77%
3	Cakupan Ibu hamil risti yang dirujuk	95,21%	72.77%
4	Ibu hamil resiko tinggi/komplikasi yang ditangani	95,21%	96.31%
5	Neonatal Risti ditangani	27,70%	32.82%

2.3.1.2.5 HASIL KEGIATAN CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATUS DAN CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2009-2010

Capaian SPM untuk pelayanan kesehatan bayi selama tahun 2009-2010 adalah:



NO.	URAIAN	CAPAIAN	
		2009	2010
1.	Cakupan kunjungan neonatus	86,30%	32.82%
2.	Cakupan kunjungan bayi	86%	94.45%

2.3.1.2.6 HASIL KEGIATAN CAKUPAN KB AKTIF DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2009-2010

Capaian SPM untuk pelayanan Keluarga Berencana selama tahun 2009-2010 adalah:

NO.	URAIAN	CAPAIAN	
		2009	2010
1.	Cakupan KB aktif	76,40%	119.54%

2.3.1.2.7 JUMLAH POSYANDU, JUMLAH KADER DAN JUMLAH DESA SIAGA DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2009-2010

Capaian jumlah pelayanan posyandu dan penyehatan masyarakat yang dilaksanakan tahun 2009-2010 adalah:

NO.	URAIAN	CAPAIAN	
		2009	2010
1.	Jumlah Posyandu	1.435	1.447



	- Pratama	4,88 %	1.24 %
	- Madya	39,96 %	24.53 %
	- Purnama	53,73 %	66.49 %
	- Mandiri	4,18 %	7.74 %
2.	Jumlah Kader	7.010	7.222
	- Kader Dilatih	100 %	100 %
NO.	URAIAN	CAPAIAN	
		2009	2010
	- Kader Aktif	96,55 %	97.05 %
3.	Jumlah Desa Siaga	356	356
	- Bina	63,48 %	33.43 %
	- Tumbuh	28,37 %	38.77 %
	- Kembang	8,15 %	27.80 %

2.3.1.2.8 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT DI KAB. GRESIK TAHUN 2009-2010

Hasil pelaksanaan perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Gresik tahun 2009-2010 adalah:

NO.	URAIAN/KEGIATAN	CAPAIAN	
		2009	2010
1.	Kecamatan Bebas Rawan Gizi	88,89 %	88.89 %
2.	Balita BGM	2,51 %	1.83 %
3.	Balita Gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100 %	100 %
4.	Balita yang Berat badannya naik	73,93 %	73.71 %



5.	Balita Gakin dapata MPASI	71,26 %	84,09 %
6.	Desa dengan Garam beryodium yang baik	65,00 %	71,07 %
8.	Wanita Usia Subur dapat kapsul yodium	2,27 %	57,04 %
9.	Ibu Hamil dapat tablet tambah darah Fe 3	82,80	71,25 %
10.	Prevalensi Ibu hamil Anemia	6,04 %	5,28 %
11.	Prevalensi Ibu hamil KEK	1,77 %	1,98 %
12.	Keluarga yang mengkonsumsi garam beryodium	96,19 %	97,52 %
13.	Bayi dengan Asi Eksklusif	70,43	74,44 %
14.	Balita dengan Vitamin A 2 kali pertahun	79,69 %	93,79 %

2.3.1.2.9 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM KESEHATAN ANAK, REMAJA DAN USILA DI KAB.GRESIK TAHUN 2009-2010

Hasil pelayanan kesehatan anak, remaja dan usila Kabupaten Gresik tahun 2009-2010 adalah:

NO.	URAIAN/KEGIATAN	CAPAIAN	
		2009	2010
1	Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa kelas 1 dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil	97,16 %	95.81 %
2	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	31,95 %	70.27 %
3	Cakupan kesehatan Usila dan pra usila	43,77 %	64.62 %

2.3.1.3 FOKUS URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran urusan lingkungan hidup:

1. meningkatkan Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan indikator utama: Luas Lahan Kritis, Rasio Luas Kawasan lindung, Persentase jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara, dan Luas RTH Perkotaan.
2. Meningkatkan penanganan persampahan dengan indikator kinerja utama: Penanganan sampah, Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dan Pembangunan Pengolahan Sampah Terpadu (ERP)

Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2010

No.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
1.	Penanganan sampah	$(181.328,35 / 226.654,05) \times 100\%$ = 80%
2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	$(23 / 23) \times 100\% = \mathbf{100\%}$
3.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	$(324 / 1.239.338) \times 1000 = \mathbf{0,26}$
4.	Penegakan hukum lingkungan	$(5 / 5) \times 100 \% = \mathbf{100}$
5.	Rumah tangga pengguna air bersih	$(676.427 / 1.164.024) \times 100\% = \mathbf{58\%}$
6.	Lingkungan pemukiman kumuh	$(200.500 \text{ m}^2 / 1.191.250 \text{ m}^2) \times 100\% = \mathbf{17\%}$
7.	Rumah layak huni	$(247.163 / 286.986) \times 100\% = \mathbf{86\%}$

Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik, 2010

2.3.1.4 FOKUS URUSAN SARANA DAN PRASARANA UMUM

Pelayanan prasarana umum di bidang keagamaan adalah mewujudkan ketersediaan tempat ibadah bagi masyarakat. Tempat ibadah sebagai tempat untuk pembinaan pribadi dan perilaku masyarakat menjadi kebutuhan utama bagi terwujudnya perilaku masyarakat yang santun, damai dan kondusif.

Pelayanan Tempat Ibadah Tahun 2010

NO.	NAMA TEMPAT	JUMLAH
1.	Masjid	1.053
2.	Musholla	3.058
3.	Gereja	18
4.	Pura	4
5.	Wihara	1

Sumber Data : Bagian Adm. Kesra Setda Kab. Gresik, 2010

Sasaran urusan Pekerjaan Umum yang ingin dicapai adalah menyiapkan infrastruktur daerah dengan indikator kinerja utama: jalan kabupaten dalam kondisi baik, Jembatan kabupaten dalam kondisi baik, Jalan Poros Desa yang terbangun dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi: jaringan irigasi, saluran drainase perkotaan, serta terbangunnya Bendung Gerak Sembayat.

Pelayanan Prasarana Umum Tahun 2010

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
1.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	$(367,64 / 525,84) \times 100\% = 70\%$



2.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	$(8.220 / 16.286) \times 100\% = 50\%$
3.	Rumah Tangga Per Sanitasi	$(856.463 / 1.164.024) \times 100\% = 74\%$
4.	Kawasan Kumuh	$(60.378 / 1.191.125) \times 100\% = 5\%$

Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik, 2010

2.3.1.5 FOKUS URUSAN TATA RUANG

Penataan ruang di Kabupaten Gresik adalah untuk memberikan arahan Pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga lainnya dalam mengalokasikan ruang sebagai tempat kegiatan baik bersifat ekonomis, sosial maupun budaya.

Sasaran urusan penataan ruang adalah meningkatkan penataan kawasan daerah sesuai RTRW dengan indikator kinerja utama: Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah, keberadaan Perda RTRW, dan perubahan pemanfaatan fungsi kawasan RTRW.

Perda RTRW Kabupaten Gresik tahun 2010 - 2030 masih dalam proses penyelesaian dan diharapkan sebelum akhir tahun 2011 sudah selesai. Sebagai tindak lanjut dari RTRW ini maka akan dilakukan riview RTDR sekaligus proses perdanya.

Untuk keberadaan RTH di wilayah perkotaan, Pemerintah Kabupaten Gresik merencanakan Perluasan RTH sesuai dengan Permen PU.

Pelayanan Urusan Tata Ruang Tahun 2010

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
-----	-----------------	-----------



1.	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	$(8.323,11 / 28.808.11) \times 100\%$ $= \mathbf{28,89\%}$
----	---	--

Sumber Data : Dinas PU Kab. Gresik, 2010

2.3.1.6 FOKUS URUSAN PERHUBUNGAN

Sasaran urusan perhubungan adalah meningkatkan pelayanan transportasi daerah yang Aman, Lancar, dan Terjangkau dengan indikator kinerja utama: Persentase ketersediaan angkutan darat, Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas, Persentase angkutan umum darat dalam kondisi layak jalan, dan Ketersediaan angkutan laut (penyeberangan).

Pelayanan Urusan Perhubungan Tahun 2010

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
1.	Angkutan darat	$(12.317 / 410.150) \times 100\% = \mathbf{3\%}$

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Gresik, 2010

2.3.1.7 FOKUS URUSAN KOPERASI

Hasil dari pelaksanaan urusan koperasi dan UMKM adalah kemampuan daerah untuk menggerakkan usaha yang berbasis kepada koperasi, usaha mikro dan usaha kecil. Keberpihakan pemerintah kepada sektor ini akan mampu meningkatkan jumlah dan kemampuan usahanya. Pada tahun 2010 jumlah koperasi dan koperasi aktif serta jumlah usaha mikro dan kecil adalah:



Pelayanan Urusan Koperasi Tahun 2010

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
1.	Koperasi aktif	$(703 / 897) \times 100\% = 78,37\%$
2.	Usaha Mikro dan Kecil	$(34.194 / 36.000) \times 100\% = 95\%$

Sumber Data : Dinas Koperasi Kab. Gresik, 2010

2.3.1.8 FOKUS URUSAN KEPENDUDUKAN

Administrasi kependudukan merupakan amanat dari pemerintah pusat untuk mendapat perbaikan. Database kependudukan yang baik merupakan sumber data yang sangat diperlukan untuk segala keperluan. Pemerintah melalui program nasional telah membangun data kependudukan secara nasional melalui KTP nasional berbasis NIK. Selain itu pelayanan akta kependudukan juga menjadi prioritas pelayanan untuk masyarakat.

Pelayanan Urusan Kependudukan Tahun 2010

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
1.	Kepemilikan KTP	$(762.768 / 932.992) \times 100\% = 81,8\%$
2.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	$(132.196 / 1.239.338) \times 1000 = 106,67$
3.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah

Sumber Data : Dinas Kependudukan, Capil dan Sosial Kab. Gresik, 2010

2.3.1.9 FOKUS URUSAN TENAGA KERJA

Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten untuk memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memberikan kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Pemerintah kabupaten harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan baik melalui fasilitasi maupun pembangunan di daerah.

Pelayanan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2010

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	$(631.993 / 888,994) \times 100\% = 71,1\%$
2.	Pencari kerja yang ditempatkan	$(2.946 / 9.907) \times 100\% = 29,7\%$

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik, 2010

2.3.1.10 FOKUS URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk memberikan peluang yang sama kepada perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus memberikan perlindungan dari ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu peran serta perempuan dalam pembangunan harus selalu ditingkatkan.

Anak sebagai unsur masyarakat harus dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkatan usianya. Pemerintah kabupaten harus dapat memastikan tidak terjadi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Karena beberapa alasan masih sering dijumpai orang tua yang mempekerjakan anak-anak untuk membantu memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya.



Fokus Pelayanan Tahun 2010

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
1.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$(5.069 / 163.344) \times 100\% = 2,99\%$
2.	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	$(498.113 / 498.113) \times 100\% = 100\%$
3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$(163.344 / 196.285) \times 100\% = 86,28\%$

Sumber Data : Bappeda Kab. Gresik, 2010

2.3.1.11 FOKUS URUSAN KELUARGA BERENCANA

Hasil pelaksanaan urusan keluarga berencana difokuskan pada pelayanan kepada kepesertaan program Keluarga Berencana. Program ini oleh masyarakat sangat dirasakan manfaatnya karena mampu membantu mereka dalam merencanakan kehidupan keluarganya. Selain pelayanan program KB, yang dilaksanakan adalah melakukan pembinaan keluarga agar kualitas kehidupan dalam keluarga semakin baik. Masih tingginya keluarga miskin yang ada di masyarakat mendorong upaya yang lebih baik dari pemerintah untuk menguranginya.

Pelayanan Urusan Keluarga Berencana Tahun 2010

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
1.	Prevalensi peserta KB aktif	$(180.331 / 228.454) \times 100\% = 78,94\%$



2.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	$(97.676 / 306.597) \times 100\% = \mathbf{31,86\%}$
----	---	--

Sumber Data : Kantor KB dan PP Kab. Gresik, 2010

2.3.1.12 FOKUS URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Fokus pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika adalah menyediakan media informasi dan komunikasi oleh pemerintah sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Sarana komunikasi dan informatika diperlukan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat diminalisasikan kesenjangan informasi.

Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2010

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
1.	Web site milik pemerintah daerah	Ada
2.	Pameran/expo	2 kali

Sumber Data : Bagian PDTI Setda Kab. Gresik, 2010

2.3.1.13 FOKUS URUSAN PERTANAHAN

Sasaran urusan pertanahan adalah meningkatkan penanganan pertanahan dengan indikator utama Penyelesaian Kasus Tanah Negara, penyelesaian TKD, pembebasan lahan untuk kepentingan umum meliputi : penetapan lokasi,

sosialisasi, pematokan, pengukuran, appraisal, negosiasi harga, pendataan tanah, tanaman, bangunan, pemberkasan dan pembayaran.

Pelayanan Urusan Pertanahan Tahun 2010

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
1.	Luas lahan bersertifikat	$(33.707 / 119.513) \times 100\% = 28,20$
2.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	$(23 / 25) \times 100\% = 92\%$
3.	Penyelesaian Ijin Lokasi	$(35 / 35) \times 100\% = 100\%$

Sumber Data : Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Gresik, 2010

2.3.1.14 FOKUS URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dalam rangka memberdayakan masyarakat desa, masyarakat di Kabupaten Gresik telah dilibatkan secara penuh pada kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Gresik, Kebomas, Manyar, Menganti dan Driyorejo yang tersebar pada 103 Desa/Kelurahan serta PNPM Mandiri Pedesaan di 13 Kecamatan.

Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
1.	PKK aktif	$(19.105 / 24.178) \times 100\% = 79\%$
2.	Posyandu	$(1.412 / 1.435) \times 100\% = 98,4\%$



Sumber Data : Kantor Pemas Kab. Gresik, 2010

2.3.1.15 FOKUS URUSAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Hasil pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan diukur melalui pelayanan terhadap ketersediaan bahan bacaan pada perpustakaan umum maupun keberadaan perpustakaan sekolah dan desa. Keberadaan perpustakaan ini untuk meningkatkan minat baca masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Sedangkan urusan kearsipan ditujukan untuk membangun sistem kearsipan yang aman dan handal sehingga seluruh arsip pemerintah dapat terjamin keamanan dan keandalannya.

Pelayanan Urusan Perpustakaan dan Arsip Tahun 2010

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
1.	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	$(56/413) \times 100\% = 13,6\%$
2.	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	3 Kali
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$(12.084 / 75.312) \times 100\% = 16,05\%$
4.	Pengunjung perpustakaan	$(409.968 / 1.161.650) \times 100\% = 35,3\%$

Sumber Data : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Gresik, 2010

2.3.1.16 FOKUS URUSAN BUDAYA

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan urusan budaya adalah terpeliharanya seni dan budaya daerah sebagai kekayaan budaya daerah. Oleh karena itu festival seni yang secara rutin dilaksanakan serta sarana budaya yang mencukupi menjadi

perhatian yang utama bagi pemerintah kabupaten. Selain itu benda-benda cagar budaya yang ada juga harus senantiasa dijaga dan dilestarikan.

Pelayanan Urusan Budaya Tahun 2010

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	16 kali
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3 buah
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	$(367 / 367) \times 100\% = 100\%$

Sumber Data Dinas Budparpora Kab. Gresik, 2010

2.3.1.17 FOKUS URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan urusan pemuda dan olah raga adalah meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda di daerah. Peningkatan prestasi olahraga harus didukung dengan pembinaan dan penyediaan sarana olahraga yang memadai. Sedangkan untuk pembinaan pemuda diharapkan pemerintah kabupaten dapat menyediakan aktivitas yang positif bagi pemuda yang ada.

Pelayanan Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2010

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
1.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	$(3 / 1.239.338) \times 1000 = 0,0024$
2.	Lapangan olahraga .	$(74 / 1.239.338) \times 1000 = 0,06$

Sumber Data : Dinas Budparpora Kab. Gresik, 2010

2.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.3.2.1 FOKUS URUSAN PENANAMAN MODAL

Hasil dari pelaksanaan urusan penanaman modal adalah meningkatnya nilai penanaman modal di daerah. Penanaman modal di daerah terdiri dari penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal setempat/lokal. Ketiga jenis penanaman modal ini akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat kabupaten secara keseluruhan.

Pelayanan Urusan Penanaman Modal Tahun 2010

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
1.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	$((700.5 - 690.2) / 690.2) \times 100\% = 1,49\%$

Sumber Data : Badan Perizinan dan PM Kab. Gresik, 2010

2.3.2.2 FOKUS URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengelola dan mengeksplorasi laut bagi kemakmuran masyarakat. Upaya untuk meningkatkan produksi perikanan baik perikanan budidaya, perairan umum maupun kelautan akan menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Meningkatnya produksi perikanan ini akan meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan gizi masyarakat.

Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2010

1.	Produksi perikanan	$(52.689,7 / 49.847,9) \times 100\% = 105\%$
2.	Konsumsi ikan	$(24,87 / 26,5) \times 100\% = 93,85\%$

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gresik, 2010

2.3.2.4 FOKUS URUSAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Urusan pertanian dan kehutanan dikelola untuk meningkatkan produksi pertanian dan kehutanan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sedangkan untuk kehutanan selain meningkatkan produksi hasil hutan, hal yang lebih penting untuk dilakukan adalah melakukan konservasi dan memelihara fungsi hutan sebagaimana mestinya.

Pelayanan Urusan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2010

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	$(362.286 / 58.318) =$ 62,12 ton/ha
2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2010**)	$(2.688.235 / 28.352.998) \times 100\% =$ 9,5%
3.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	$(164 / 7.929) \times 100\% =$ 2,07%
4.	Kerusakan Kawasan Hutan	$(0 / 4.844) \times 100\% =$ 0%

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Gresik, 2010

2.3.2.5 FOKUS URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Urusan perindustrian dan perdagangan dilaksanakan melalui regulasi dan stimulasi terhadap kegiatan ekonomi khususnya dari perindustrian dan perdagangan. Pembinaan terhadap industri kecil dan menengah menjadi prioritas bagi pemerintah kabupaten. Sedangkan penyediaan sarana perdagangan dan pasar komoditas akan mampu meningkatkan volume perdagangan.



Pelayanan Urusan Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2010

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
1.	Pertumbuhan Industri	$((57 - 101) / 6.237) \times 100\% = 0,7\%$
2.	Ekspor Bersih Perdagangan	US\$ 81.568

Sumber Data : Dinas Koperasi, Perindag dan UKM Kab. Gresik, 2010

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Gresik dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Kabupaten Gresik adalah salah satu dari wilayah penyangga kota Surabaya (*Surabaya Metropolitan Area*). Dimana Kota Surabaya adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur.

Di samping Kabupaten Gresik, daerah lain yang juga dapat dikatakan sebagai kawasan penyangga Kota Surabaya adalah Kabupaten Sidoarjo, Bangkalan, Mojokerto dan Lamongan. Keenam wilayah ini dikenal dengan istilah kawasan Gerbangkertosusila. Fungsi wilayah penyangga bagi Kabupaten Gresik dapat bernilai positif secara ekonomis, jika Kabupaten Gresik dapat mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman Kota Surabaya, yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman yang representatif, kondusif, dan strategis.

Potensi infrastruktur di Kabupaten Gresik yang ada :



- a. Jalan Tol Surabaya – Gresik .
- b. Jalan Nasional sebagai jalan Arteri primer (Surabaya – Gresik – Lamongan)
- c. Jalan Nasional sebagai jalan Kolektor Primer (Gresik – Sadang lewat Pantura / Jl. Daendels).
- d. Jalan Propinsi sebagai jalan Kolektor Primer (Legundi – Bunder, Lakarsantri – Bringkang, Wringinanom – Driyorejo – Surabaya).
- e. Air Bersih PDAM.
- f. Energi Listrik dan gas.
- g. 1 Pelabuhan Umum dan 7 Pelabuhan khusus.

Adapun rencana pengembangan infrastruktur :

- a. Jalan Tol Surabaya- Mojokerto.
- b. Jalan Tol Gresik – Tuban.
- c. Jalan Lingkar Barat Surabaya.
- d. Pengembangan Air Bersih Untuk Kecamatan Kota dari sumber air Umbulan, untuk Wilayah Gresik Utara kebutuhan air baku/bersih dari Bendung Gerak Sembayat.
- e. Pengembangan penyediaan gas untuk wilayah perkotaan, Gresik Utara dan Gresik Selatan.
- f. Pengembangan kawasan Agropolitan dan Minapolitan.
- g. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelabuhan Kali Mireng.
- h. Jalan Lingkar dan Lapangan Terbang Perintis Pulau Bawean.
- i. *Environmental Recycling Park* (ERP) dan Penambahan lahan TPA Regional di wilayah Gresik Selatan.
- j. Pengembangan Gresik Selatan (Perumahan).
- k. Penataan Kawasan Pesisir Terpadu.
- l. Kawasan Permukiman Terpadu Berwawasan Lingkungan di Cerme.



Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik tahun 2010 – 2030 penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan kabupaten yang berbasis industri, budaya, perikanan dan pertanian, yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan.

Daya saing bidang sosial budaya di Kabupaten Gresik, antara lain :

1. Di Kabupaten Gresik wajar dikdas 9 tahun sudah terwujud, sehingga ke depan akan ditingkatkan menjadi wajar pendidikan 12 tahun yang didukung pagu anggaran pendidikan yang sudah melampaui target nasional.
2. Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Gresik relatif tinggi dibandingkan daerah lain di wilayah Provinsi Jawa Timur.
3. Pelestarian dan pengembangan wisata religi, wisata kota lama/bangunan kuno, wisata alam, khususnya di Pulau Bawean.
4. Tersedianya RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang termasuk Rumah Sakit Tipe B dengan seluruh instalasinya berstandar ISO, yang menjadi rujukan pasien di wilayah Pantura, ditunjang dengan 5 Rumah Sakit Swasta, 32 Puskesmas dan 74 Puskesmas Pembantu.

Daya saing bidang perekonomian, keuangan, perijinan dan investasi meliputi :

1. PDRB, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi tinggi.
2. Tersedianya komoditas unggulan, antara lain : sarung, kopyah, busana muslim, makanan khas, dsb.
3. Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi.
4. Pelayanan perijinan investasi melalui sistem satu atap.
5. Pelayanan di bidang perijinan yang berkualitas dan profesional dengan standar ISO.



BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Struktur APBD Kabupaten Gresik terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Selama empat tahun terakhir (2007 -2010) kebijakan pengelolaan keuangan daerah meliputi kebijakan penerimaan keuangan daerah dan pengeluaran keuangan daerah seperti yang digambarkan pada Tabel berikut :

Penjelasan	Realisasi Tahun (jutaan)			
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Daerah	742.498,94	882.770,80	970.214,67	872.013,44
Belanja Daerah	726.726,98	903.570,19	1.009.099,86	768.948,76
Penerimaan Pembiayaan	82.954,15	98.950,08	73.632,40	34.013,24



Pengeluaran Pembiayaan	2.000,00	187,50	4.000,00	8.000,00
---------------------------	----------	--------	----------	----------

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Sebagai gambaran umum berikut ini data perkembangan dan komposisi struktur pendapatan daerah Kabupaten Gresik

Data Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2007 – 2010 (Jutaan)

No.	Komponen Pendapatan Daerah	2007	2008	2009	2010*
1	Pendapatan Asli Daerah	117.461,70	138.756,98	168.302,82	139.541,03
	• Pajak Daerah	54.447,12	60.863,44	63.417,19	59.700,94
	• Retribusi Daerah	43.065,23	54.339,01	19.041,40	16.918,37
	• Bagian Laba Usaha Daerah	21,04	1.124,14	1.338,87	1.633,77
	• Lain-Lain PAD yang sah	19.128,31	22.430,39	84.505,36	61.287,96
2	Dana Perimbangan	578.828,12	689.476,74	710.951,65	602.969,95
	• Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak	105.722,04	134.247,96	137.253,33	124.126,87
	• Dana Alokasi Umum	456.268,08	532.824,78	511.324,32	470.691,72
	• Dana Alokasi Khusus	9.338,00	22.404,00	62.374,00	8.151,36
3	Lain-Lain Pendapatan yang sah	53.709,12	54.537,08	90.960,20	129.502,45
	Jumlah Pendapatan	742.498,94	882.770,80	970.214,67	872.013,44

* realisasi sampai dengan 31 Oktober 2010

Dengan melihat data perkembangan diatas pendapatan daerah masih bertumpu pada Dana Perimbangan khususnya komponen Dana Alokasi Umum (DAU). sedangkan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang dipungut di daerah masih memiliki kontribusi berkisar 6.95% – 9.48% dibanding



seluruh pendapatan. Dari perkembangan selama empat tahun terakhir. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selama periode Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010 mengalami peningkatan hingga mencapai 195.76%. Hal tersebut menunjukkan adanya kemampuan daya bayar masyarakat terhadap pendapatan asli daerah. Di masa datang masih perlu adanya upaya-upaya optimalisasi pembangunan seperti pengembangan sektor pariwisata, agribisnis dan berbagai bidang lainnya yang berakibat langsung pada peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat serta berdampak pada peningkatan penerimaan daerah.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

1) Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam rangka mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mampu memberikan kepuasan. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi dari Pemerintah Pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat selanjutnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

A. Pendapatan Asli Daerah.



Mengingat pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan pusat maka penerimaan daerah yang dapat dipacu dan dapat dikendalikan (*Controllable*) adalah Pendapatan Asli Daerah. Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah guna melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. tuntutan peningkatan PAD semakin besar mengingat pelayanan kepada masyarakat selayaknya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dirumuskan sebagai berikut :

- (1). Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
- (2). Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat. diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya.
- (3). Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencalup jumlah dan potensi terhadap data obyek pajak dan retribusi.
- (4). Meminimalkan kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan. sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi. serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan.
- (5) Mencari obyek bagi sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan. Dalam pemungutan obyek baru tersebut



diupayakan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru tersebut. Pemerintah Kabupaten Gresik akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang kontraproduktif terhadap perekonomian masyarakat maupun nasional.

B. Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan *revenue sharing* harus transparan, demokratis dan adil. Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.



2) Kebijakan Umum Belanja Daerah

Sejak tahun 2007 seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Sistem tersebut berakibat pada perencanaan penganggaran terutama pada sisi belanja daerah yang harus terukur baik kinerja maupun jumlah kebutuhannya.

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Gresik diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja tetap daerah berupa belanja gaji pegawai dan belanja tidak langsung lainnya.
- 2) Meningkatkan proporsi belanja langsung dengan belanja tidak langsung daerah.
- 3) Memenuhi proporsi belanja yang untuk masing-masing urusan pemerintahan sesuai dengan prioritas pembangunan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran Kinerja (*Performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan

efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

Gambaran Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah kabupaten Gresik selama 4 tahun terakhir (2007 – 2010) sebagaimana tabel dibawah ini :

**Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gresik
Tahun 2007-2009**

No.	URAIAN BELANJA	2007	2008	2009	2010*
1	Belanja Tidak Langsung	61,39%	62,30%	64,98%	75,73%
1.1	Belanja Pegawai	39,53%	40,06%	41,71%	55,11%
1.2	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.4	Belanja Hibah	0,00%	1,21%	4,48%	5,90%
1.5	Belanja Bantuan Sosial	11,16%	8,88%	10,20%	7,58%
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	10,55%	11,80%	8,46%	7,03%
1.8	Belanja Tidak Terduga	0,13%	0,33%	0,10%	0,08%
	Sub Jumlah				
2	Belanja Langsung	38,61%	37,70%	35,02%	24,27%
2.1	Belanja Pegawai	9,94%	9,15%	6,22%	5,45%
2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,93%	16,36%	16,72%	13,68%
2.3	Belanja Modal	12,75%	12,19%	12,09%	5,15%

Dari tabel diatas tergambar bahwa belanja pegawai tidak langsung yaitu gaji setiap tahunnya meningkat yang cukup tinggi proporsinya dari total belanja daerah.

Sedangkan gambaran proporsi anggaran Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Gresik selama 3 tahun terakhir (2008 – 2010) sebagaimana tabel dibawah ini:

Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gresik

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x100%
1	Tahun anggaran n-3 (2008)	516.740.929.671,24	903.757.689.568,18	57,18
2	Tahun anggaran n-2 (2009)	559.078.313.523,00	1.013.099.863.786,00	55,18
3	Tahun anggaran n-1 (2010)	594.594.940.970,00	1.093.872.569.140,98	54,36

3.3 KERANGKA PENDANAAN

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Meningkat serta Prioritas Utama

Gambaran Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, tahun 2008 -2010 sebagaimana tabel berikut :



**Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Gresik**

No.	Uraian	2008	2009	2010	Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	Rp	Rp	%
A	Belanja Tidak Langsung	468.768.813.523,24	505.359.935.716,00	534.974.259.170,00	0,11
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	331.066.247.323,00	390.668.875.080,00	419.201.820.517,00	0,21
2	Tambahan Penghasilan PNS	19.619.160.000,00	16.398.532.500,00	16.078.630.000,00	-0,17
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.149.670.000,00	4.068.584.000,00	4.277.500.000,00	0,49
4	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja bagi hasil	178.708.800,00	257.554.200,00	223.200.000,00	0,36
6	Belanja Bantuan Keuangan	106.583.515.382,00	86.168.513.000,00	87.198.955.597,00	-0,19
7	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	7.171.512.018,24	7.797.876.936,00	7.994.153.056,00	0,10
B	Belanja Langsung	47.972.116.148,00	53.718.377.807,00	59.620.681.800,00	0,17
1	Belanja honorarium PNS	30.778.629.920,00	35.554.239.781,00	36.310.974.630,00	0,17
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.656.250.000,00	0,00	54.500.000,00	-0,50
3	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	0,00	0,00	0,00	0,00



5	Belanja sewa sarana mobilitas & alat berat	2.931.211.525,00	340.379.375,00	292.027.400,00	-0,97
C	Pembiayaan Pengeluaran	187.500.000,00	4.000.000.000,00	9.557.291.397,98	20,62
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran pokok utang	0,00	0,00	1.357.291.397,98	0,00
3	Penyertaan Modal	187.500.000,00	4.000.000.000,00	8.200.000.000,00	20,59
	TOTAL (A+B+C)	516.928.429.671,24	563.078.313.523,00	604.152.232.367,98	0,12

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa belanja periodik yang wajib dibayar dan tidak dapat ditunda pembayarannya terealisasi cukup tinggi yakni proporsi rata-rata selama 3 tahun terakhir sebesar 63,68 % Dengan memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama sebagaimana tabel diatas.

Di bawah ini disajikan data perkembangan Belanja Daerah selama empat tahun terakhir setelah dilakukan konversi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 adalah sebagai berikut :

**Data Perkembangan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2007 – 2010
(Jutaan)**

No.	URAIAN BELANJA	2007	2008	2009	2010*
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	726.726,98	903.570,19	1.009.099,86	582.315,06
1.1	Belanja Pegawai	287.266,21	362.006,59	425.076,12	423.802,94
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	-	10.964,02	45.681,00	45.390,57
1.5	Belanja Bantuan Sosial	81.087,40	80.205,52	103.980,86	58.284,36



1.6	Belanja Bagi Hasil Lepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	127,17	178,71	257,55	167,40
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	76.684,85	106.583,52	86.168,51	54.073,60
1.8	Belanja Tidak Terduga	943,39	2.970,66	1.038,28	596,20
	Sub Jumlah	-	-	-	-
		-	-	-	-
2	BELANJA LANGSUNG	280.617,96	340.661,18	356.897,53	186.633,70
2.1	Belanja Pegawai	72.205,18	82.703,42	63.340,06	41.884,76
2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.739,46	147.840,85	170.354,93	105.170,75
2.3	Belanja Modal	92.673,32	110.116,92	123.202,54	39.578,18
	Sub Jumlah	280.617,96	340.661,18	356.897,53	186.633,70
	Jumlah Belanja	726.726,98	903.570,19	1.009.099,86	768.948,76
	SURPLUS/	13.621,41	(25.130,18)	(37.095,58)	103.064,68
	(DEFISIT)	-	-	-	-
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	80.954,15	98.762,58	69.632,40	26.013,24
3.1	Penerimaan Pembiayaan	82.954,15	98.950,08	73.632,40	34.013,24
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	82.954,15	94.704,35	73.632,40	30.772,24
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	3.241,00
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	4.245,73	-	-
3.2	Pengeluaran Daerah	2.000,00	187,50	4.000,00	8.000,00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	2.000,00	187,50	4.000,00	8.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-
		-	-	-	-
3.3	Pembiayaan netto	80.954,15	98.762,58	69.632,40	26.013,24

* realisasi sampai dengan 31 Oktober 2010

Dari perkembangan selama 4 tahun terakhir sebagaimana tabel di atas. belanja daerah mengalami kenaikan mencapai sekitar 142.29%. Namun apabila dilihat dari masing-masing komponen belanja yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung. perkembangannya mengalami fluktuasi.

3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2011- 2015) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut :

maka dapat diproyeksikan anggaran belanja selama 5 tahun kedepan (2010-2015) untuk menghitung kerangka pendanaan pembangunan sebagaimana tabel berikut:

**Proyeksi
Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Tahun 2011-2015 (Jutaan) Kabupaten Gresik**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	582.532,90	607.968,19	621.537,33	635.540,33	649.997,55
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	461.535,15	473.073,52	484.900,36	497.022,87	509.448,44
2	Tambahan Penghasilan PNS	17.663,28	18.104,86	18.557,48	19.021,42	19.496,95



3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.380,00	4.401,90	4.423,91	4.446,03	4.468,26
4	Belanja Bunga	955,37	955,37	955,37	955,37	955,37
5	Belanja bagi hasil	278,50	278,50	278,50	278,50	278,50
6	Belanja Bantuan Keuangan	86.196,35	98.477,35	98.477,35	98.477,35	98.477,35
7	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	11.524,27	12.676,70	13.944,37	15.338,80	16.872,68
B	Belanja Langsung	67.294,76	69.328,24	75.680,77	82.624,33	92.638,53
1	Belanja honorarium PNS	40.857,43	41.640,30	42.373,05	44.305,19	49.669,77
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	66,50	75,00	100,00	125,00	150,00
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	26.370,83	27.612,93	33.207,72	38.194,13	42.818,76
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-	-
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-	-
6	Belanja sewa sarana mobilitas & alat berat	-	-	-	-	-
C	Pembiayaan Pengeluaran	3.550,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00



2	Pembayaran pokok utang	3.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
3	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
	TOTAL (A+B+C)	653.377,66	689.796,43	709.718,10	730.664,66	757.636,08

**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Gresik**

No.	Uraian	Proyeksi (Jutaan Rupiah)				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Pendapatan	1.329.280,60	1.650.603,34	1.845.166,47	2.074.107,10	2.191.809,55
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	30.000,00	32.750,00	27.000,00	28.000,00	30.000,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	19.453,29	465,06	715,06	215,06	715,06
	Total penerimaan	1.231.709,58	1.365.206,13	1.489.658,22	1.602.401,29	1.746.286,08
	Dikurangi:	-	-	-	-	-
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	653.377,66	689.796,43	709.718,10	730.664,66	757.636,08
5	Kapasitas riil kemampuan keuangan	578.331,92	675.409,71	779.940,12	871.736,63	988.650,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2011 -2015 sebagaimana tabel dibawah ini :

**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Gresik**



No.	Uraian	Proyeksi (Jutaan Rupiah)				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	578.331,92	675.409,71	779.940,12	871.736,63	988.650,00
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	431.697,01	552.258,66	664.154,40	763.882,65	856.375,27
II.b	Pengeluaran pembiayaan	3.550,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00
	Dikurangi:					
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	67.294,76	69.328,24	75.680,77	82.624,33	92.638,53
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	364.402,25	482.930,42	588.473,63	681.258,33	763.736,74
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	213.929,66	192.479,28	191.466,49	190.478,30	224.913,26
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
III.a	Belanja Tidak Langsung	795.997,51	799.732,42	812.788,76	825.303,58	874.195,75
	Dikurangi:	-	-	-	-	-
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	582.532,90	607.968,19	621.537,33	635.540,33	649.997,55
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	213.464,60	191.764,22	191.251,43	189.763,24	224.198,20
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	465,06	715,06	215,06	715,06	715,06

Kebijakan mengenai pendapatan daerah (*Revenue Policy*) diharapkan dapat mendukung berbagai kebijakan pemerintah. atau membiayai belanja daerah.

Dengan tetap melanjutkan kebijakan keuangan pada masa yang lalu yang dianggap masih relevan untuk dilaksanakan maka ditetapkan beberapa asumsi yang akan dilaksanakan dalam lima tahun yang akan datang sebagai berikut :



Asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan Tahun Anggaran 2011 – 2015:

1. Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2015 meningkat sebesar 108,11% dari proyeksi penerimaan pajak daerah tahun 2011, asumsi ini sudah termasuk didalamnya pengalihan pengelolaan BPHTB pada tahun 2011 dan pengelolaan PBB pada tahun 2014.
2. Proyeksi pendapatan retribusi daerah untuk tahun 2015 meningkat sebesar 146,41% dari proyeksi pendapatan tahun 2011, atau diperkirakan meningkat rata-rata 10 % setiap tahunnya.
3. Proyeksi pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak diperkirakan meningkat sebesar 15 % setiap tahunnya
4. Proyeksi penerimaan Dana Alokasi umum meningkat sebesar 2,5 % setiap tahunnya.

Berikut ini proyeksi pendapatan daerah untuk lima tahun ke depan. berdasarkan arah kebijakan pendapatan daerah.

**PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH
(JUTAAN)
TAHUN 2011 - 2015**

No.	Komponen Pendapatan Daerah	2011	2012	2013	2014	2015
1	PENDAPATAN DAERAH					



1.1	Pendapatan Asli Daerah	231.698,01	295.441,19	330.792,33	357.893,94	387.406,82
1.1.1	Pajak Daerah	99.755,00	144.730,50	170.703,55	187.773,91	206.551,30
1.1.2	Retribusi Daerah	22.305,31	25.651,11	28.216,22	31.037,84	34.141,62
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.200,00	11.200,00	12.320,00	13.552,00	14.907,20
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	108.437,70	113.859,58	119.552,56	125.530,19	131.806,70
1.2	Dana Perimbangan	734.411,54	798.788,46	869.613,27	928.600,98	1.011.703,75
1.2.1	Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak	126.681,74	145.684,00	167.536,60	173.667,09	199.717,15
1.2.3	Dana Alokasi Umum	561.391,00	606.302,28	654.806,46	707.190,98	763.766,26
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	46.338,80	46.802,19	47.270,21	47.742,91	48.220,34
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang sah	216.146,75	237.761,42	261.537,56	287.691,32	316.460,45
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	57.744,51	63.518,96	69.870,85	76.857,94	84.543,73
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	147.764,87	162.541,35	178.795,49	196.675,04	216.342,54
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	10.637,38	11.701,11	12.871,22	14.158,35	15.574,18
	Jumlah Pendapatan	1.182.256,29	1.331.991,08	1.461.943,16	1.574.186,23	1.715.571,02

Berdasarkan data perkembangan belanja daerah dan pertimbangan-pertimbangan kebijakan belanja daerah seperti tersebut diatas. berikut ini gambaran proyeksi belanja daerah untuk lima tahun ke depan, dengan asumsi sebagai berikut :



- 1) Sistem perencanaan penganggaran menggunakan asumsi anggaran berimbang dimana seluruh pendapatan dialokasikan untuk membiayai seluruh belanja.
- 2) Alokasi belanja diprioritaskan untuk penggunaan belanja gaji dan sisanya dialokasikan kepada belanja lainnya.
- 3) Belanja gaji pegawai meningkat setiap tahun sebesar 2,5%, dengan harapan kondisi jumlah pegawai mengalami pertumbuhan nol (*zero growth*)
- 4) Belanja hibah akan tetap kecuali untuk tahun 2015 meningkat sebagai alokasi biaya pilkada.
- 5) Belanja bantuan sosial secara bertahap akan dikurangi sebesar 2,5% dan dialihkan kepada belanja langsung.
- 6) Belanja langsung dialokasikan kepada belanja pegawai sebesar 10%, belanja barang dan jasa sebesar 40% dan belanja modal sebesar 50% pada tahun 2015.

**PROYEKSI BELANJA DAERAH
(JUTAAN)
TAHUN 2011 – 2015**

No.	URAIAN BELANJA	2011	2012	2013	2014	2015
2.1	Belanja Tidak Langsung	795.997,51	799.732,42	812.788,76	825.303,58	874.195,75
2.1.1	Belanja Pegawai	577.750,00	592.193,75	606.998,59	622.173,56	637.727,90
2.1.2	Belanja Bunga	955,37	955,37	955,37	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	55.684,11	27.887,60	27.887,60	27.887,60	62.887,60
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	71.733,18	69.939,85	68.191,35	66.486,57	64.824,41
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kota/ Kabupaten dan Pemerintahan Desa	278,50	278,50	278,50	278,50	278,50
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada	86.196,35	98.477,35	98.477,35	98.477,35	98.477,35

	Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa					
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2	Belanja Langsung	431.697,01	552.258,66	664.154,40	763.882,65	856.375,27
2.2.1	Belanja Pegawai	70.540,65	71.793,63	73.056,98	76.388,27	85.637,53
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	211.344,36	220.903,46	265.661,76	305.553,06	342.550,11
2.2.3	Belanja Modal	149.812,00	259.561,57	325.435,65	381.941,33	428.187,63
	Jumlah Belanja	1.227.694,52	1.351.991,08	1.476.943,16	1.589.186,23	1.730.571,02
	Surplus/Defisit	(45.438,23)	(20.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)

Berdasarkan data perkembangan pembiayaan daerah dan pertimbangan-pertimbangan kebijakan pembiayaan daerah, berikut ini gambaran proyeksi pembiayaan daerah untuk lima tahun ke depan, dengan asumsi sebagai berikut :

- 1) Defisit anggaran berjalan direncanakan akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah.
- 2) .pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terdapat pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok hutang
- 3) Sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 direncanakan pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan yang diantaranya akan digunakan sebagai investasi atau penyertaan modal daerah.



**PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH
(JUTAAN)
TAHUN 2011 – 2015**

No.	URAIAN PEMBIAYAAN	2011	2012	2013	2014	2015
	Penerimaan Pembiayaan	49.453,29	33.215,06	27.715,06	28.215,06	30.715,06
	SilPA Tahun lalu	19.453,29	465,06	715,06	215,06	715,06
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	30.000,00	32.750,00	27.000,00	28.000,00	30.000,00
	Penerimaan Kembali Pemberi Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	3.550,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00
	Pembentukan Dana Cadangan	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Utang	3.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	45.903,29	20.715,06	15.215,06	15.715,06	15.715,06
	SilPA tahun berjalan	465,06	715,06	215,06	715,06	715,06



BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

4.1.1. KUALITAS KEIMANAN DAN KETAQWAAN

Kabupaten Gresik selain merupakan pintu gerbang masuknya agama islam di tanah Jawa, dikenal sebagai Kota Santri / Kota Wali karena di Gresik terdapat makam para wali dan di semua wilayah kecamatan terdapat pondok pasantren yang diasuh oleh para ulama yang menjadi panutan dan dapat menggerakkan Umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal ini membawa konsekuensi bagi peningkatan kualitas dan kuantitas kehidupan beragama di masyarakat. Namun, untuk kondisi sekarang, pemahaman, penghayatan dan pengamalan kehidupan beragama di Kabupaten Gresik masih belum seluruhnya diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan makin berkembangnya informasi, teknologi dan globalisasi.

4.1.2. RENDAHNYA PEMERATAAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena itu pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu jalan untuk menanggulangi kemiskinan,

meningkatkan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta meningkatkan keadilan sosial.

Berbagai upaya pembangunan pendidikan, termasuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Gresik, dilaksanakan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kabupaten Gresik. Namun, sampai saat ini masalah rendahnya tingkat pendidikan penduduk, dan juga rendahnya kualitas pelayanan, dan kurangnya sarana prasarana pendidikan masih merupakan permasalahan pembangunan bidang pendidikan. Kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global, dan belum mencukupi sebagai landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).

Kualitas pendidikan yang relatif masih rendah, dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik, terutama disebabkan belum memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan tenaga pendidik, masih rendahnya kesejahteraan pendidik, fasilitas belajar-mengajar belum tersedia secara mencukupi, dan biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai. Isu strategis lainnya dalam pembangunan pendidikan adalah masih lebarnya kesenjangan partisipasi pendidikan; belum meratanya fasilitas pendidikan menengah; masih rendahnya kualitas pendidikan, serta belum efektif dan efisiennya manajemen pendidikan.

4.1.3. BELUM OPTIMAL KINERJA BIROKRASI DAN SDM APARATUR

Permasalahan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM aparatur, antara lain meliputi belum optimalnya sistem pengawasan, belum semua jenis pelayanan terstandarisasi, dan masih rendahnya etos kerja pegawai, serta belum optimalnya manajemen SDM aparatur.



4.1.4. KURANGNYA TINGKAT PARTISIPATIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Permasalahan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Gresik, antara lain masih lemahnya ekonomi masyarakat perkotaan dan pedesaan, masih rendahnya daya beli masyarakat, belum optimalnya peran serta masyarakat utamanya perempuan dalam pembangunan, serta belum optimalnya fungsi pemerintahan desa / kelurahan bersama lembaga keswadayaan masyarakat yang ada di desa / kelurahan sebagai mitra kerjanya.

4.1.5. KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN MENURUN

Pertanian, kelautan, maupun perikanan mempunyai kontribusi yang besar terhadap kemajuan maupun pendapatan Kabupaten Gresik, hal ini dibuktikan sektor pertanian. Kelautan, dan perikanan menduduki posisi ketiga setelah industri dan perdagangan. Namun permasalahan yang terjadi dalam pembangunan bidang pertanian, kelautan dan perikanan di Kabupaten Gresik selama ini antara lain meliputi menurunnya peranan sektor pertanian setiap tahunnya, hal ini dikarenakan pengalihan lahan dan tingkat pertumbuhan pertanian yang tidak secepat sektor industri dan perdagangan, kualitas SDM petani yang masih rendah, belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku agrobisnis, masih minimnya sarana dan prasarana pertanian, belum optimalnya penataan wilayah pesisir pantai, serta belum optimalnya fungsi UPT yang ada.

4.1.6. MASIH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN



Permasalahan Kemiskinan di Kabupaten Gresik bahwa dari sejumlah 322.089 keluarga yang ada di Gresik, masih terdapat sejumlah 70.421 keluarga miskin atau sebanyak 241.514 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.237.264 jiwa, maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik tahun 2010 sebesar 19,52 % lebih tinggi Provinsi Jawa Timur sebesar 15 %. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan meningkatnya PDRB kabupaten Gresik dan meningkatnya sektor industri dan perdagangan yang dapat mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Gresik.

4.1.7. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN

Pendapatan per kapita masyarakat mulai tahun 2006-2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan (rata-rata per tahun 5%). Namun, masih terjadi kesenjangan pendapatan per kapita antara masyarakat ekonomi menengah ke atas yang bergerak di sektor industri dan perdagangan dengan masyarakat ekonomi menengah ke bawah (mayoritas) yang bergerak di sektor pertanian, dan juga terlalu bertumpunya kabupaten Gresik terhadap sektor industri, sehingga apabila sektor ini memburuk maka akan berimbas ke sektor lainnya dan sebaliknya jika sektor industri membaik maka sektor yang lain akan ikut membaik, hal ini menimbulkan bahwa kurang optimalnya sektor lain sehingga bila keadaan sektor industri memburuk maka tidak ada sektor penunjang lain yang lebih menguatkan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Gresik.

4.1.8. KURANG OPTIMALNYA PELAYANAN KESEHATAN DAN TINGGINYA KETERGANTUNGAN TERHADAP APBD



Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Gresik saat ini menghadapi masalah masih tingginya angka kesakitan, yaitu merebaknya beberapa jenis penyakit, misalnya polio, kasus gizi buruk, wabah demam berdarah, flu burung, diare / muntaber, dan HIV/ AIDS. Juga banyaknya peralatan kesehatan yang sudah rusak dan ketinggalan zaman, serta sarana dan prasarana penunjang di rumah sakit dan puskesmas yang kurang memadai.

Derajat kesehatan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu keturunan, pelayanan kesehatan, perilaku dan lingkungan. Faktor perilaku dan lingkungan mempunyai andil paling besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karenanya, untuk meningkatkan derajat kesehatan, maka setiap orang memiliki dua kewajiban, yaitu berperilaku sehat dan aktif memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Berperilaku sehat merupakan sebuah kewajiban bagi setiap individu, sebab mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Gangguan kesehatan, seperti penyakit jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya, akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit untuk pengobatannya, serta menurunkan produktivitas kerja. Selanjutnya yaitu tingkat ketergantungan sektor kesehatan terhadap APBD Kabupaten Gresik membuat tingkat kemandirian sektor kesehatan kurang, sehingga pembiayaan dari sektor kesehatan mengalami kenaikan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan sarana prasarana kesehatan.

4.1.9. PENURUNAN SUMBER AIR BERSIH

Pelayanan air bersih di Kabupaten Gresik relatif masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini dapat digambarkan bahwa standart pelayanan kepada masyarakat perkotaan sebesar

70% dan masyarakat pedesaan sebesar 30%. Namun pemenuhan kebutuhan air bersih baru dapat terlayani 20% dari seluruh masyarakat Kabupaten Gresik.

4.1.10. RENDAHNYA PENGEMBANGAN KETERAMPILAN KETENAGAKERJAAN DAN KEPENDUDUKAN

Kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan secara umum masih ditandai relatif rendahnya kualitas tenaga kerja, baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilannya. Akibatnya tingkat produktivitas tenaga kerja menjadi rendah, sehingga posisi tawar (*bargaining position*) menjadi rendah; tingkat upah yang rendah; sering terjadinya perselisihan hubungan industrial, dan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta rendahnya jaminan kesejahteraan purna-kerja.

Pada sisi lain, perkembangan tuntutan pasar kerja dan persaingan industri di pasar global, di mana penggunaan teknologi dan informasi sebagai unggulan di samping faktor ekonomis, menuntut kebutuhan tenaga kerja profesional yang memenuhi standar kualifikasi tenaga kerja berbasis *knowledge, skill* dan *attitude* (KSA), serta keterampilan sosial (*social skill*). Pasar kerja di masa mendatang juga menuntut adanya jaminan kondisi iklim ketenagakerjaan yang kondusif, harmonis dan dialogis, yang melahirkan suasana hubungan industrial yang ramah, dan adanya kepastian hukum dalam usaha dan investasi.

Permasalahan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan kependudukan, antara lain meliputi masalah terbatasnya kesempatan kerja, sehingga jumlah penganggur kaum muda/terdidik terus meningkat, rendahnya kualitas dan



produktivitas sumber daya manusia pencari kerja, belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, serta hubungan industrial, krisis keuangan global yang berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), belum optimalnya implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam perencanaan pembangunan, serta masih tingginya pertumbuhan penduduk.

4.1.11. KURANGNYA INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Permasalahan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, antara lain:

Untuk Gresik Utara, adalah belum selesainya program jalan poros desa, tidak seimbang volume peningkatan kendaraan dengan jumlah jalan yang memadai, belum optimalnya pembangunan dan perbaikan saluran drainase, serta belum terealisasinya Pembangunan Bendung Gerak Sembayat. Masih belum terealisasinya Pembangunan embung di desa Wotan menghambat pengembangan kawasan Agropolitan. Dengan belum terbangunnya Bendung Gerak Sembayat mengakibatkan terhambatnya Pengembangan Kawasan Industri, Agropolitan dan Minapolitan di Gresik Utara. Serta masih seringnya terjadi banjir tahunan karena program pembangunan tanggul dari pusat belum tuntas.

Untuk Gresik perkotaan permasalahan banjir perkotaan masih belum tuntas karena Pembangunan pompa dan system drainase perkotaan dilakukan secara bertahap, juga perlu adanya penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kepadatan lalu lintas di perkotaan terjadi karena kapasitas jalan tidak sebanding dengan volume kendaraan yang ada, sedangkan penambahan jalan-jalan alternatif belum tersedia. Pelayanan air bersih dan air baku untuk industri masih belum bisa optimal karena antara kebutuhan dan ketersediaan air bersih dan air



baku tidak seimbang, serta belum tersedianya infrastruktur pendukung untuk pembangunan Pelabuhan Kali Mireng dan Kawasan Ekonomi Khusus / Kawasan Industri di Kecamatan Manyar.

Untuk Gresik Selatan adalah belum selesainya program jalan poros desa, peningkatan dan kualitas jalan kabupaten dan propinsi, tidak adanya jalan alternatif dari wilayah Gresik Selatan menuju dalam kota, tidak seimbangnya volume peningkatan kendaraan dengan jumlah jalan yang memadai, adanya problem dengan pengolahan limbah baik industri maupun domestik, belum dimanfaatkannya lahan rencana pengolahan limbah B3 di Kecamatan Cerme, belum berkembangnya kawasan perumahan di Gresik Selatan, terutama di daerah perbatasan Gresik – Surabaya, belum optimalnya transportasi antar daerah karena pembangunan Tol SUMO belum terselesaikan. Belum optimalnya penanganan banjir tahunan di wilayah terdampak bencana Kali Lamong dan Sungai Bengawan Solo.

Untuk Pulau Bawean adalah masih belum selesainya program jalan poros desa, Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bawean, kelistrikan masih belum maksimal, belum adanya transportasi udara karena belum selesainya. Pembangunan Lapangan Terbang Perintis di Pulau Bawean, serta belum terwujudnya penyediaan sarana transportasi laut yang memadai antara wilayah daratan Gresik dengan Pulau Bawean.

4.1.12. PEMBANGUNAN YANG KURANG MENEKANKAN SEKTOR LINGKUNGAN

Secara umum, permasalahan pembangunan bidang lingkungan sangat berkaitan dengan potensi sumber daya alam, khususnya dalam pelaksanaan eksploitas yang tidak ramah lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya



ketidakseimbangan lingkungan, penurunan kualitas lingkungan tanah, laut dan udara, terjadinya konflik kepentingan antar pelaku usaha dan masyarakat.

Berkembangnya jumlah permukiman di wilayah perkotaan mengakibatkan meningkatnya volume sampah, sedangkan daya tampung TPA Ngipik sudah tidak memadai dan armada angkutan sampah masih terbatas. Untuk Wilayah Gresik Selatan, sangat diperlukan adanya sarana TPA.

4.1.13. RENDAHNYA FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

Permasalahan pembangunan bidang pariwisata adalah masih kurangnya penataan fasilitas penunjang wisata religi dan wisata alam untuk mewujudkan rasa aman, senang dan nyaman bagi wisatawan domestik maupun luar negeri. Disamping itu potensi alam di Kabupaten Gresik belum seluruhnya dikemas sebagai tempat wisata yang representatif, sebagai contohnya adalah potensi alam wisata pantai Dalegan dan Surowiti di Kecamatan Panceng, wisata Pulau Bawean, dan Goa Gelang Agung di Kecamatan Bungah.

4.1.14. KURANGNYA REGULASI MENGENAI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Permasalahan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Gresik, diantaranya adalah belum tersedianya regulasi terkait dengan peraturan perundangan yang dapat mengakomodasikan kepentingan daerah dan pusat, serta belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pertambangan, baik yang berskala besar maupun kecil dan menengah.

4.1.15. KURANGNYA PENGENALAN TENTANG KESENIAN, KEBUDAYAAN, DAN OLAHRAGA

Permasalahan pembangunan bidang kesenian, kebudayaan dan olahraga diantaranya adalah belum optimalnya inventarisasi dan publikasi ragam dan lokasi budaya yang terdapat di Kabupaten Gresik, minimnya kompetisi kesenian, terbatasnya sarana dan prasarana kesenian, belum adanya *guiden* sejarah Gresik yang punya nilai jual, serta terbatasnya sarana, prasarana dan pembinaan olahraga.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS

ISU- ISU STRATEGIS		
DINAMIKA NASIONAL/ INTERNASIONAL	DINAMIKA REGIONAL	DINAMIKA LOKAL/GRESIK
▪ Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan ▪ Kurangnya distribusi tenaga pendidik	▪ Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan ▪ Kurangnya distribusi tenaga pendidik ▪ Pengentasan Kemiskinan	1. Meningkatnya kegiatan keagamaan 2. Meningkatnya bantuan pembangunan tempat ibadah 3. Kurang perhatiannya terhadap kebudayaan local 4. Rendahnya pengangguran



▪ Tidak meratanya sarana dan prasarana kesehatan ▪ Kurangnya tenaga kesehatan ▪ Perumahan rakyat		5. Berkurangnya sumber air bersih 6. Masih tinggi penyakit TBA, HIV, Diare Balita 7. Masih tingginya prosentase angka kemiskinan 19,52 %. 8. Produksi perikanan meningkat 9. Surplus peningkatan padi 10. Kontribusi PDRB pertanian menurun
▪ Komitmen terhadap penerapan good governance ▪ Komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan supremasi hukum ▪ Peralihan kepemimpinan ▪ Jumlah kendaraan meningkat	▪ Komitmen pemerintahan Jatim Pro Poor, Pro Growth ▪ Pemenuhan terhadap Pelayanan dasar ▪ Jaminan terhadap kesejahteraan sosial	1. Kurangnya pengembangan wisata 2. Penegakan dan pengawasan lingkungan yang konsisten 3. Kurangnya infrastruktur penunjang industry 4. Ketergantungan tinggi kesehatan terhadap APBD 5. Masih rendah ratio tenaga medis terhadap penduduk 6. Capaian realisasi rehabilitasi hutan hanya sebesar 2.07% 7. PKK aktif perlu ditingkatkan 8. Peninjauan kembali fungsi aparatur dengan penempatan kerja



		9. Pemenuhan standarisasi pelayanan 10. Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum 11. Kurikulum yang tidak sesuai dengan kondisi daerah 12. Masih rendahnya pelayanan pendidikan 13. Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan 14. Masih belum meratanya kualitas tenaga pengajar 15. Kerukunan tingkat antar umat beragama 16. Meningkatnya bantuan pembangunan tempat ibadah 17. Meningkatnya kegiatan keagamaan
▪ Nilai tukar petani rendah ▪ Indeks daya saing Indonesia rendah	▪ Jarak ibu kota provinsi dengan kabupaten jauh ▪ Penanaman modal asing meningkat ▪ Ketimpangan ekonomi provinsi daerah utara dan selatan	1. Letak kabupaten gresik yang strategis 2. Salah satu penyanggah perindustrian jatim 3. UMK diatas rata2 jawa timur 4. Tingginya potensi sumber daya mineral 5. Industri pengolahan sebagai tumpuan perekonomian



		6. Kurangnya perhatian terhadap potensi lokal daerah
--	--	--

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014. Terkait permasalahan-permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Gresik dapat disimpulkan bahwa isu-isu strategis yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik adalah:

4.2.1. Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan

Peningkatan bidang kualitas keimanan dan ketaqwaan, dimana dalam hal ini kualitas keimanan dan ketaqwaan yang ditingkatkan mampu mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang berbudaya, beradab dan juga memiliki kualitas hidup maupun menjalin kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Jika melihat data serta kondisi riil yang ada di Kabupaten Gresik, isu-isu sektoral yang berkembang di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kegiatan keagamaan
- b. Meningkatnya bantuan pembangunan tempat ibadah
- c. Kerukunan antar umat beragama.

Dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kegiatan keagamaan, dalam rangka peningkatan kualitas keagamaan, keberpihakan pemerintah dalam pengadaan kegiatan-kegiatan keagamaan merupakan salah satu cermin dari usaha peningkatan kegiatan keagamaan.



- b. Meningkatnya bantuan pembangunan tempat ibadah, untuk mendukung isu sektoral pada poin a, maka diperlukan infrastruktur penunjang kegiatan tersebut salah satunya adalah pembangunan tempat-tempat peribadatan. Agar kegiatan keagamaan berjalan secara kondusif maka diperlukan stimulan-stimulan dalam bentuk bantuan pembangunan tempat peribadatan.
- c. Kerukunan antar umat beragama, untuk memaksimalkan kegiatan keagamaan serta pembangunan tempat ibadah, kondisi sosial yang kondusif dalam hal kerukunan antar umat beragama sangat amat diperlukan, karena kondisi sosial yang kondusif akan sangat berpengaruh pada maksimalnya kebijakan atau kegiatan yang diterapkan.

4.2.2. Peningkatan Eksistensi Budaya Lokal

Seiring perkembangan zaman, arus globalisasi memang sudah memasuki sendi-sendi Indonesia, begitu juga dengan Kabupaten Gresik. Westernisasi merupakan salah satu hasil nyata dari globalisasi. Untuk menjaga jati diri Kabupaten Gresik khususnya budaya berperilaku masyarakat perlu adanya peningkatan eksistensi budaya lokal. Tidak berarti hanya terfokus pada budaya berperilaku, namun juga terhadap pemeliharaan kesenian-kesenian asli daerah. Salah satu tujuannya adalah untuk membentuk Kabupaten Gresik yang berjati diri baik dari perilaku masyarakat maupun kekhasan produk kesenian dan barang serta jasa di daerah.

Salah satu isu sektoral yang berkembang dalam isu strategis ini adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap budaya lokal. Kurangnya perhatian ini tercermin dari minimnya program serta kegiatan yang berbasis atau berorientasi pada kepentingan pelestarian kebudayaan lokal.



4.2.3. Peningkatan Pembangunan Yang Berorientasi Pada Lingkungan

Sustainable development yang selama ini sedang digalakkan pemerintah bukan tanpa alasan, hal ini karena kebanyakan pembangunan yang ada tidak berwawasan lingkungan. Beberapa isu sektoral yang berkembang terkait isu strategis peningkatan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan adalah :

- a. Capaian realisasi rehabilitasi hutan hanya sebesar 2,07%
- b. Penegakan dan pengawasan lingkungan yang konsisten
- c. Berkurangnya sumber air bersih

Dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Capaian realisasi rehabilitasi hutan hanya sebesar 2,07%, dalam perencanaan rehabilitasi hutan yang dapat terealisasi hanya sebesar 2,07% yang berarti keseriusan pemerintah dalam kepedulian terhadap lingkungan terkait rehabilitasi hutan kurang.
- b. Penegakan dan pengawasan lingkungan yang konsisten, ketika program rehabilitasi hutan tidak diawasi secara ketat dan konsisten imbasnya adalah minimnya capaian atau realisasi dalam hal rehabilitasi hutan. Secara langsung akan berimbas pada rendahnya kualitas lingkungan hidup.
- c. Berkurangnya sumber air bersih, pembangunan-pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan khususnya industri-industri pengolahan setempat secara langsung akan mempengaruhi kualitas air pada daerah setempat. Sehingga sumber-sumber air bersih dari waktu ke waktu akan berkurang.

4.2.4. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan dan Kesehatan



Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka penyediaan variabel-variabel pendukung tercapainya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut dengan cara meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan. Isu-isu sektoral pada isu strategis ini adalah distribusi tenaga pengajar yang tidak merata sehingga ada daerah-daerah yang kekurangan tenaga pengajar, tidak meratanya penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang erat kaitannya dengan gedung sekolah yang memadai serta peralatan-peralatan penunjang kegiatan belajar mengajar yang tidak terstandarisasi atau bahkan dibawah standar kelayakan, kurikulum yang tidak sesuai dengan kondisi serta kebutuhan pendidikan daerah, tingginya penderita penyakit TBC, HIV dan Diare Balita.

4.2.5. Peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program nasional dalam rangka meningkatkan kreativitas masyarakat untuk bangun dan berkembang membangun ekonominya. Selain itu belakangan ini sedang ramai digalakkan pemerintah terkait program pengembangan produk unggulan kabupaten (PRUKAB). Hal ini akan senada dengan isu strategis ini terkait peningkatan program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

Isu-isu sektoral dari isu strategis ini adalah perlunya meningkatkan aktivitas PKK serta kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap potensi local daerah. Dalam pengembangan program pemberdayaan diperlukan adanya penggerak yang mampu mnejaring masyarakat salah satunya adalah PKK. Terkait pengembangan PRUKAB dapat diakomodir oleh PKK tadi.

4.2.6. Peningkatan Mutu Pelayanan Umum



Mutu pelayanan umum merupakan suatu aspek yang memiliki peran krusial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan masyarakat, sehingga semua kebutuhan masyarakat terkait pelayannya umum dapat diakomodir secara maksimal. Adapun isu-isu sektoral dari isu strategis ini adalah sebagaimana disebutkan berikut ini :

- a. Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi
- b. Pemenuhan standarisasi pelayanan
- c. Peninjauan kembali fungsi aparatur dengan penempatan kerja

Dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, terkait dengan besarnya peran korupsi terhadap buruknya kualitas pelayanan pemerintah. Jika alokasi dana dimaksimalkan untuk program ataupun kegiatan yang direncanakan mungkin saja program atau kegiatan tersebut dapat berjalan maksimal, namun jika dana tersebut dipotong untuk kepentingan-kepentingan pribadi tentu saja akan menurunkan kualitas pelayannya karena alokasi dana berkurang sehingga kualitas pun turut berkurang
- b. Pemenuhan standarisasi pelayanan, dalam rangka memaksimalkan pelayanan, standarisasi pelayanan harus dipenuhi oleh pemerintah, tujuannya adalah kepuasan masyarakat. Standar-standar yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait perlu dipenuhi.
- c. Peninjauan kembali fungsi aparatur dengan penempatan kerja, kaitanya dengan spesialisasi kerja dalam rangka efisiensi serta efektivitas pelayanan. Dengan demikian pelayanan akan secara serta-merta meningkat secara kualitas.



4.2.7. Produktivitas Pertanian Meningkat Namun Kontribusi PDRB Menurun

Sektor pertanian berdasarkan data yang telah diolah menduduki peringkat ke tiga sebagai penyumbang PDRB terbesar. Sektor pertanian dari tahun-tahun dalam produksinya mengalami surplus namun terjadi suatu ironi yang sedikit membungkun adalah kontribusi sektor pertanian tersebut terhadap PDRB menurun.

4.2.8. Peningkatan Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu yang hamper ada disetiap daerah di Indonesia, bahkan pada skala nasional pun kemiskinan merupakan salah satu isu strategis. Di Kabupaten Gresik sendiri prosentase kemiskinan mencapai 19,52%, termasuk besar dan dapat diasumsikan bahwa hampir seperempat penduduk Kabupaten Gresik masuk katedori miskin.

Program-program pengentasan kemiskinan yang revolusioner serta visioner sangat amat dibutuhkan dalam rangka peningkatan efektivitas program pengentasan kemiskinan ini.

Prosentase kemiskinan di Kabupaten Gresik masih tinggi dibandingkan prosentase kemiskinan di Indonesia. Hal ini dapat diasumikan bahwa meskipun pengangguran di Kabupaten Gresik rendah masih belum mampu mengangkat perekonomian di Kabupaten Gresik khus.unya kontribusi dalam peningkatan pendapatan perkapita.

4.2.9. Peningkatan Sarana Prasarana Sebagai Pendorong Perekonomian

Faktor pendorong pereknomian merupakan varibel-varibal yang mampu mendorong kegiatan perekonomian seperti pasar. Adapun isu sektoral terkait peningkatan sarana dan prasarana pendorong perekonomian antara lain adalah kurangnya infrastruktur penunjang industri. Karena industri khususnya industri



pengolahan merupakan tumpuan perekonomian yang terbukti menjadi penyumbang PDRB terbesar, maka fokus peningkatan sarana-prasarana pendorong perekonomian dapat di fokuskan kepada pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang perindustrian khususnya industri pengolahan.

Fokus perhatian tersebut tidak berarti mengabaikan faktor-faktor atau sektor-sektor pendorong perekonomian yang lain, hanya saja keberpihakan pembangunan infrastruktur tetap mendahulukan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perekonomian.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's* yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah :

GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, MAKMUR DAN BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu.

5.1.1 Perwujudan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, MAKMUR DAN BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS	Gresik	satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya



		dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.
	Agamis	suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam sistem tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah hubungan antar manusia dan lingkungannya.
	Adil	perwujudan kesamaan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan.
	Makmur	kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya.
	Berkehidupan yang Berkualitas	hidup yang sehat dengan berlatarbelakang pendidikan yang sesuai jaman serta pemenuhan pendapatan yang memadai.

5.2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :



- Misi ke-1 :** Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri
- Misi ke-2 :** Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik
- Misi ke-3 :** Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan
- Misi ke-4 :** Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya

5.1.2 Perwujudan Misi

Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri mengandung artian bahwa tindakan atau aktivitas yang senantiasa dalam memberikan keteduhan hati yang dilandasi oleh dasar nilai-nilai agama. Perwujudannya dengan solidaritas penuh antar umat beragama serta menghormati dan menghargai antar masyarakat.

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik mengartikan bahwa pelayanan adil adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administratif tanpa adanya diskriminatif. tata kelola pemerintahan yang baik pengertian mengembangkan



sistem pemerintahan yang baik yang dilandasi dengan profesionalisme untuk mewujudkan good governance. good governance mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi.

Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan mengandung artian bahwa mewujudkan peningkatan pendapatan melalui berbagai sektor ekonomi dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal serta ditujukan untuk masyarakat. Pembangunan didasarkan oleh pembangunan berkelanjutan dimana pembangunan berkonsep pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial tanpa merusak lingkungan

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya mengandung artian kesehatan merupakan peningkatan kualitas keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar masyarakat didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sehingga dengan meningkatnya kesehatan dan pendidikan yang sebagai dasar kebutuhan akan masyarakat mewujudkan kesejahteraan masyarakat



5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan Misi **“Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati yang dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri”**, ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut :

T.1 Meningkatkan perilaku masyarakat yang berbudaya dan beradab serta menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama

Sasaran:

S.1.T.1 Memantapkan pembinaan keagamaan

S.2.T.1 Mengotimalkan bantuan pembangunan tempat beribadah

S.3.T.1 Menurunkan angka kriminalitas sampai pada angka 360

S.4.T.1 Menurunkan angka kejadian gangguan tramtib pada angka 117

Untuk melaksanakan Misi **“Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik”**, ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut :

T.2 Menciptakan tata laksana pelayanan publik sesuai good governance



Sasaran :

- S.1.T.2 Meningkatkan kinerja pelayanan umum
- S.2.T.2 Menyesuaikan fungsi dan kinerja satuan daerah
- S.3.T.2 Meningkatkan pengawasan terhadap sistem pengelolaan pemerintahan

Untuk melaksanakan Misi **“Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan”**, ditetapkan 3 (tiga) tujuan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut :

T.3 Mendorong partisipatif masyarakat dalam mengelola potensi lokal

Sasaran:

- S.1.T.3 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi Daerah
- S.2.T.3 Meningkatkan Kualitas dan daya saing daerah yang mendukung pengembangan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

T.4 “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan Pendekatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan pendapatan masyarakat”.

Sasaran:

- S.1.T.4 Mempertahankan dan meningkatkan produksi perikanan dan pertanian berbasis kawasan inovasi
- S.2.T.4 Meningkatkan ketersediaan aksesibilitas dan infrastruktur sektor industri
- S.3.T.4 Optimalisasi potensi sumberdaya mineral
- S.4.T.4 Menekan Laju Inflasi
- S.5.T.4 Meningkatnya usaha yang inovatif berbasis industri kreatif.

S.6.T.4 Meningkatnya daya saing industri pangan dan hortikultura

T.5 Memantapkan pola kerjasama antar daerah, dan pemerintah dengan swasta dalam mewujudkan peningkatan perluasan pasar

Sasaran:

S.1.T. 5 meningkatkan kerjasama antar daerah yang berbatasan

S.2.T.5 meningkatnya investasi di daerah

Untuk melaksanakan Misi “**Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya**”, ditetapkan 2 (dua) tujuan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut :

T.6 Meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana serta pelayanan pendidikan dan kesehatan

Sasaran:

S.1.T.6 Meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan

S.2.T.6 Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan

S.3.T.6 Mencari alternatif sumber dana kesehatan

S.4.T.6 Meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) sampai pada angka
76.99

T.7 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan KLHS

Sasaran :

S.1.T.7 meningkatkan program rehabilitasi hutan dan konservasi lingkungan

S.1.T.7 meningkatkan pola pembangunan yang berorientasi KHL



GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, MAKMUR DAN BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri	T.1 meningkatkan perilaku masyarakat yang berbudaya dan beradab serta menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama	S.1.T.1 memantapkan pembinaan keagamaan
		S.2.T.1 mengotimalkan bantuan pembangunan tempat beribadah
		S.3.T.1 menurunkan angka kriminalitas sampai pada angka 360
		S.4.T.1 menurunkan angka kejadian gangguan tramtib pada angka 117
Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik	T.2 menciptakan tata laksana pelayanan publik sesuai good governance	S.1.T.2 meningkatkan kinerja pelayanan umum
		S.2.T.2 menyesuaikan fungsi dan kinerja satuan daerah
		S.3.T.2 meningkatkan pengawasan terhadap sistem pengelolaan pemerintahan
Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan	T.3 mendorong partisipatif masyarakat dalam mengelola potensi lokal	S.1.T.3 meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi daerah
		S.2.T.3 Meningkatnya Kualitas dan daya saing daerah yang mendukung pengembangan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
	T.4 "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan Pendekatan Penguatan Sistem	S.1.T.4 mempertahankan dan meningkatkan produksi perikanan dan pertanian berbasis kawasan inovasi



pembangunan yang berwawasan lingkungan	Inovasi Daerah dan pendapatan masyarakat”.	S.2.T.4 meningkatkan ketersediaan aksesibilitas dan infrastruktur sektor industri
		S.3.T.4 optimalisasi potensi sumberdaya mineral
		S.4.T.4 Menekan Laju Inflasi
		S.5.T.4 Meningkatnya usaha yang inovatif berbasis industri kreatif
		S.6.T.4 Meningkatnya daya saing industri pangan dan hortikultura
	T.5 Memantapkan pola kerjasama antar daerah, dan pemerintah dengan swasta dalam mewujudkan peningkatan perluasan pasar	S.1.T. 5 meningkatkan kerjasama antar daerah yang berbatasan
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya	T.6 Meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana serta pelayanan pendidikan dan kesehatan	S.1.T.6 Meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan
		S.2.T.6 Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan
		S.3.T.6 mencari alternatif sumber dana kesehatan
		S.4.T.6 meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) sampai pada angka 76.99
	T.7 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan KLHS	S.1.T.7 meningkatkan program rehabilitasi hutan dan konservasi lingkungan
		S.1.T.7 meningkatkan pola pembangunan yang berorientasi KLHS



BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah penyusunan tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPJMD telah dirumuskan, Untuk mencapai tujuan daerah yang merupakan hasil akhir dari tolok ukur pembangunan lima tahun yang akan datang dalam menjalankan misi guna mendukung terwujudnya visi yang dicita-citakan yaitu menjadikan Gresik Yang Agamis, Adil, Makmur Dan Berkehidupan Yang Berkualitas. Dibutuhkan metodologi atau teknis untuk menentukan program/kegiatan prioritas apa suatu target kinerja akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Metodologi itu berupa perumusan strategi. Sebagai proses yang abstrak dan kompleks, perumusan strategi membutuhkan ketelitian dan kemampuan berpikir bagi anggota tim yang terlibat dalam perumusan. Dibutuhkan pendalaman materi dan analisis data serta diskusi yang berkesinambungan demi menghasilkan strategi terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran, terlebih dahulu melakukan identifikasi SWOT

(strength, weakness, opportunity, dan threats). Adapun identifikasi SWOT disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.1 Identifikasi SWOT

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan - Meningkatnya kegiatan keagamaan - Meningkatnya bantuan pembangunan tempat ibadah - Kerukunan tingkat antar umat beragama - Komitmen terhadap penerapan good governance - Komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan supremasi hukum - Komitmen pemerintahan Jatim Pro Poor, Pro Growth, pro job - Surplus produksi padi - Produksi perikanan meningkat - Industri pengolahan sebagai tumpuan perekonomian - Rendahnya pengangguran - UMK diatas rata-2 jawa timur - Salah satu penyanggah perindustrian jatim - Letak kabupaten gresik yang strategis	(+) Peluang - Kurikulum yang tidak sesuai dengan kondisi daerah - Menyongsong AFTA 2015 - Penegakan dan pengawasan lingkungan yang konsisten - Wisata religi - Tingginya potensi sumber daya mineral
(-) Kelemahan - Masih belum meratanya kualitas tenaga pengajar - Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan - Masih rendahnya pelayanan pendidikan - Rendah pemenuhan standarisasi pelayanan aparatur	(-) Ancaman - Kurangnya perhatian terhadap potensi lokal daerah - Kontribusi pdrb pertanian menurun - Capaian realisasi rehabilitasi hutan hanya sebesar 2.07% - Masih tinggi penyakit TBA, HIV, Diare Balita



- Peninjauan kembali fungsi aparatur dengan penempatan kerja - PKK aktif perlu ditingkatkan - Masih rendah ratio tenaga medis terhadap penduduk - Ketergantungan tinggi kesehatan terhadap APBD - Berkurangnya infrastruktur penunjang industri - Kurangnya pengembangan wisata - Kurangnya sumber air bersih	- Masih tingginya prosentase angka kemiskinan 19,52 %. - Kurang perhatiannya terhadap kebudayaan local
---	--



SW-O T	Opportunity: ▪ Kurikulum yang tidak sesuai dengan kondisi daerah ▪ Menyongsong AFTA 2015 ▪ Menegakan dan pengawasan lingkungan yang konsisten ▪ Wisata religi ▪ Tingginya potensi sumber daya mineral	Treath ▪ Kurangnya perhatian terhadap potensi lokal daerah ▪ Kontribusi pdrb pertanian menurun ▪ Capaian realisasi rehabilitasi hutan hanya sebesar 2.07% ▪ Masih tinggi penyakit TBA, HIV, Diare Balita ▪ Masih tingginya prosentase angka kemiskinan 19,52 %. ▪ Kurang perhatiannya terhadap kebudayaan local
Strength : ▪ Meningkatnya kegiatan keagamaan ▪ Meningkatnya bantuan pembangunan tempat ibadah ▪ Kerukunan tingkat antar umat beragama – ▪ Komitmen terhadap penerapan good governance ▪ Komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan supremasi hukum ▪ Komitmen pemerintahan Jatim Pro Poor, Pro Growth, pro job ▪ Surplus produksi padi ▪ Produksi perikanan meningkat	✓ Meningkatkan pembinaan agama dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ✓ Meningkatkan pembangunan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka menunjang pertumbuhan perekonomian	✓ Penanaman wawasan warisan budaya pada generasi muda dalam rangka menjaga serta memelihara eksistensi kebudayaan local ✓ Memantapkan kualitas pengelolaan pertanian, perikanan, dan kelautan



▪ Industri pengolahan sebagai tumpuan perekonomian ▪ Rendahnya pengangguran ▪ UMK diatas rata2 jawa timur ▪ Salah satu penyanggah perindustrian jatim ▪ Letak kabupaten gresik yang strategis	✓ Meningkatkan kerjasama dan daya saing pembangunan berbagai sektor yang berbasis pembangunan berkelanjutan	
Weakness; • Masih belum meratanya kualitas tenaga pengajar • Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan • Masih rendahnya pelayanan pendidikan • Rendah pemenuhan standarisasi pelayanan aparatur • Peninjauan kembali fungsi aparatur dengan penempatan kerja • PKK aktif perlu ditingkatkan • Masih rendah ratio tenaga medis terhadap penduduk • Ketergantungan tinggi kesehatan terhadap APBD • Berkurangnya infrastruktur penunjang industri • Kurangnya pengembangan wisata	✓ Meningkatkan pemerataan sarana prasarana, tenaga dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ✓ Menyusun program inovasi daerah guna mengoptimalkan potensi wisata dan produk unggulan kabupaten yang berorientasi pada keunggulan local	✓ Meningkatkan kualitas sdm guna menunjang pelayanan prima serta pengawasan pembangunan



• Kurangnya sumber air bersih		
-------------------------------	--	--



6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi yang dipilih adalah sebagai berikut:

- **ST.1** Meningkatkan pembinaan agama dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- **ST.2** Meningkatkan pembangunan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka menunjang pertumbuhan perekonomian
- **ST.3** Meningkatkan kerjasama dan daya saing pembangunan berbagai sektor yang berbasis pembangunan berkelanjutan
- **ST.4** Penanaman wawasan warisan budaya pada generasi muda dalam rangka menjaga serta memelihara eksistensi kebudayaan local
- **ST.5** Memantapkan kualitas pengelolaan pertanian, perikanan, dan kelautan
- **ST.6** Meningkatkan pemerataan sarana prasarana, tenaga dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
- **ST.7** Menyusun program inovasi daerah guna mengoptimalkan potensi wisata dan produk unggulan kabupaten yang berorientasi pada keunggulan local

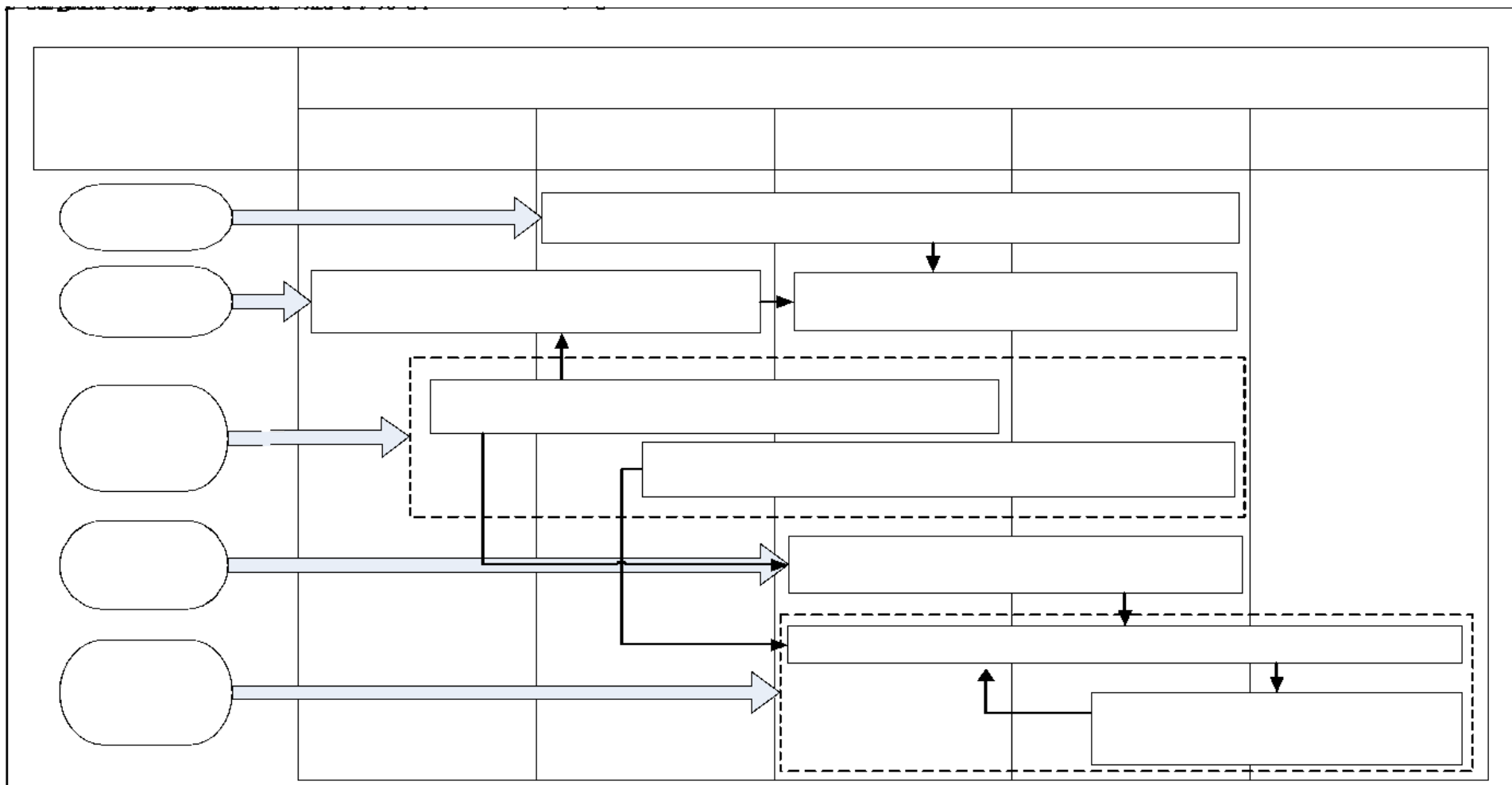


- **ST.8** Meningkatkan kualitas SDM guna menunjang pelayanan prima serta pengawasan pembangunan

Strategi tersebut ditentukan dengan didasarkan pada penerjemahan sasaran kedalam bentuk strategi. Tidak selalu satu sasaran equifalen / memiliki satu strategi, namun dapat beberapa sasaran yang memiliki karakteristik yang sama memiliki satu strategi. Dalam kondisi diatas strategi ditentukan dengan melihat beberapa sasaran yang memiliki karakter sama. Selain itu strategi juga ditentukan dengan melihat analisis pada SWOT isu-isu strategis. Dimana strategi dapat menjawab keempat kombinasi dari kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.



6.2 Arah Kebijakan





BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, yaitu:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan

upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Hubungan antara kebijakan umum dan empat perspektif diatas, sekaligus berdasarkan atas strategi pembangunan daerah, guna menunjang pencapaian Visi dan Misi pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Kebijakan Umum Pembangunan

No.	Perspektif	Strategi 1 : Meningkatkan pembinaan agama dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	
		Kebijakan Umum	Indikator
1	Perspektif Masyarakat	Peningkatan kegiatan pembinaan keagamaan guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan	Terciptanya suasana lingkungan bermasyarakat yang kondusif dan berketuhanan
2	Perspektif Proses Internal	Pengawasan dan pengendalian tata kelola kegiatan pembinaan keagamaan	Berjalannya prosedur pengawasan dan pengendalian
3	Perspektif Kelembagaan	Menyusun perda tentang keagamaan dan ketertiban masyarakat	Tersedianya perda keagamaan dan ketertiban masyarakat
4	Perspektif Keuangan	Optimalisasi alokasi bantuan dana dalam rangka peningkatan pembinaan keagamaan	Teroptimalisasinya penyerapan anggaran terkait alokasi untuk peningkatan kegiatan pembinaan keagamaan
No.	Perspektif	Strategi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur dalam rangka menunjang pertumbuhan perekonomian	
		Kebijakan Umum	Indikator
1	Perspektif Masyarakat	Peningkatan penunjang infrastruktur ekonomi dan pelayanan umum	Meningkatnya roda perekonomian masyarakat
2	Perspektif Proses Internal	Pengawasan serta optimalisasi dana pembangunan dana infrastruktur	Efektivitas dan efisiensi pembangunan infrastruktur
3	Perspektif Kelembagaan	Penyusunan perda terkait pembangunan infrastruktur	Tersedianya perda terkait pembangunan infrastruktur



4	Perspektif Keuangan	Peningkatan keberpihakan anggaran daerah terhadap pembangunan infrastruktur	Terpenuhinya dana untuk kepentingan pembangunan infrastruktur
No.	Perspektif	Strategi 3: Meningkatkan kerjasama dan daya saing pembangunan berbagai sektor yang berbasis pembangunan berkelanjutan	
		Kebijakan Umum	Indikator
1	Perspektif Masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi terkait pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem lingkungan	Luasnya wawasan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan kerjasama dengan daerah sekitar dan menyusun serta mengimplementasikan kajian lingkungan hidup strategis	Terciptanya hubungan kerjasama dengan pemerintah kabupaten sekitar dan terstrukturnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan berdasar kepada kajian lingkungan hidup strategis
3	Perspektif Kelembagaan	Membangun sistem pengawasan pengelolaan berbagai sektor yang ramah lingkungan	Terwujudnya pengendalian yang efektif terhadap pengelolaan berbagai sektor yang ramah lingkungan
4	Perspektif Keuangan	Meningkatkan kualitas serta keberagaman sektor sumber pendapatan asli daerah yang berwawasan lingkungan	Tumbuh dan berkembangnya sumber-sumber pendapatan daerah yang baru
No.	Perspektif	Strategi 4: Penanaman wawasan warisan budaya pada generasi muda dalam rangka menjaga serta memelihara eksistensi kebudayaan lokal	
		Kebijakan Umum	Indikator
1	Perspektif Masyarakat	Peningkatan kegiatan-kegiatan kebudayaan daerah	Terjaganya keberlangsungan dan eksistensi kegiatan-kegiatan kebudayaan
2	Perspektif Proses Internal	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbudaya	Terwujudnya pemerintahan yang mencerminkan eksistensi budaya lokal
3	Perspektif Kelembagaan	Penyusunan perda dalam rangka melindungi serta menjaga eksistensi kebudayaan lokal	Tersedianya perda perlindungan kebudayaan lokal
4	Perspektif Keuangan	Peningkatan alokasi dana anggaran daerah terkait realisasi kegiatan-kegiatan kebudayaan	Terpenuhinya kebutuhan dana terkait realisasi kegiatan kebudayaan



No.	Perspektif	Strategi 5 : Memantapkan kualitas pengelolaan pertanian, perikanan, dan kelautan	
		Kebijakan Umum	Indikator
1	Perspektif Masyarakat	Peningkatan pembinaan serta sosialisasi terkait pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan	Meningkatnya wawasan masyarakat dalam pengelolaan guna meningkatkan kualitas produksi pertanian, perikanan dan kalutan
2	Perspektif Proses Internal	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan	Berjalannya prosedur pengawasan
3	Perspektif Kelembagaan	Membangun sistem pengawasan pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan yang berkualitas	Prosentase petani dan nelayan yang memproduksi hasil tani dan ikan yang berkualitas
4	Perspektif Keuangan	Menyediakan kredit mikro untuk pengembangan sektor pertanian dan perikanan	Meningkatnya penggunaan jasa kredit mikro
No.	Perspektif	Strategi 6 : Meningkatkan pemerataan sarana prasarana, tenaga dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	
		Kebijakan Umum	Indikator
1	Perspektif Masyarakat	Pemerataan distribusi tenaga pengajar dan dokter yang berkualitas serta peningkatan infrastruktur pendidikan yang mendukung efektivitas kegiatan belajar mengajar	Meningkatnya APM, APH, AHH dan pemerataan disreibusi tenaga dibidang pendidikan dan kesehatan
2	Perspektif Proses Internal	Berperan aktif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pemerataan sarana & prasarana serta meningkatkan kualitas layanan tenaga kesehatan dan medis	Terpenuhinya kebutuhan pemerataan sarana prasarana dan meningkatnya jumlah tenaga serta kualitas pelayanan kesehatan dan pndidikan
3	Perspektif Kelembagaan	Meningkatkan kapasitas aparatur pendidikan dan kesehatan melalui pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya profesionalisme pelayanan pendidikan dan kesehatan
4	Perspektif Keuangan	Mempertahankan dan meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD	Terpenuhinya minimal 20% anggaran pendidikan dan meningkatnya anggaran kesehatan
No.	Perspektif	Strategi 7 : Menyusun program inovasi daerah guna mengoptimalkan potensi wisata dan produk unggulan kabupaten (PRUKAB) yang berorientasi pada keunggulan local	



		Kebijakan Umum	Indikator
1	Perspektif Masyarakat	Penyusunan PNPM yang berorientasi pada optimalisasi potensi PRUKAB	Terwujudnya produk unggulan kabupaten yang berdaya saing
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan perhatian pemerintah terhadap pengembangan PRUKAB	Meningkatnya dukungan pemerintah terhadap PRUKAB
3	Perspektif Kelembagaan	Fasilitasi pengembangan PRUKAB	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang efektivitas dan efisiensi produksi PRUKAB
4	Perspektif Keuangan	Peningkatan keberpihakan alokasi anggaran dari APBD terhadap pengembangan PRUKAB	Tersedianya dana untuk pengembangan PRUKAB
No.	Perspektif	Strategi 8 : Meningkatkan kualitas sdm aparatur guna menunjang pelayanan prima serta pengawasan pembangunan	
		Kebijakan Umum	Indikator
1	Perspektif Masyarakat	Peningkatan pelayanan publik cepat, murah dan ramah	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Perspektif Proses Internal	Meningkatkan pelatihan-pelatihan	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur
3	Perspektif Kelembagaan	penyusunan perda terkait standarisasi pelayanan	terstandarisasinya kualitas pelayanan public
4	Perspektif Keuangan	<i>Law enforcement</i> guna mendorong pengawasan dan akuntabilitas keuangan public	menurunnya indeks korupsi dan meningkatnya akuntabilitas

7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun.



Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis. Berdasarkan kebijakan umum yang telah disusun diatas maka program prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai berikut:

1. Program pemeliharaan dan peningkatan kualitas substansi pembinaan keagamaan
2. Program pembinaan keagamaan pada generasi muda
3. Program pembangunan tempat-tempat peribadatan
4. Program pengawasaan pengelolaan pembinaan keagamaan
5. Program pengendalian pengelolaan pembinaan keagamaan
6. Program penataan peraturan perundang-undangan
7. Program optimalisasi alokasi bantuan dana
8. Program pembangunan pasar yang terstandarisasi
9. Program pembangunan dan perbaikan akses-akses jalan arteri perekonomian daerah
10. Program Pembangunan Tanggul Kali Lamong
11. Program pembangunan infrastruktur Bendungan Sembayat
12. Program pembangunan Mega stadion Gunung Lengis
13. Program pembangunan perumahan Gresik Selatan
14. Program pengawasan alokasi dana pembangunan infrastruktur
15. Program optimalisasi alokasi dana pembangunan infrastruktur
16. Program penyusunan peraturan terkait standarisasi tender
17. Program peningkatan kerjasama dengan pihak swasta
18. Program pembangunan dan perbaikan infrastruktur penunjang kegiatan perekonomian



19. Program sosialisasi terkait penanaman wawasan lingkungan hidup
20. Program pengentasan/pengurangan area beresiko sanitasi
21. Program sanitasi terpadu berbasis masyarakat
22. Program kerjasama pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kelautan degan daerah sekitar
23. Program pembangunan sistem pengawasan pengelolaan berbagai sektor yang ramah lingkungan
24. Program kajian ilmiah terkait penggalian potensi-potensi sumber pendapatan daerah
25. Program stimulasi bantuan dana untuk usaha kecil menengah
26. Program realisasi kegiatan-kegiatan kebudayaan daerah pada momen-momen kebudayaan daerah
27. Program penyusunan kode etik (berpakaian, berperilaku, bersosialisasi) ditatanan pemerintahan yang berbasis dan berdasrkan kepada kebudayaan daerah
28. Program pemeliharaan dan pelestarian kebudayaan asli daerah
29. Program penyusunan perda perlindungan dan pemeliharaan situs budaya lokal
30. Program penyusunan rencana pengalokasian dana untuk kegiatan kebudayaan
31. Program sosialisasi dan pembinaan terkait pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan
32. Program pendampingan terkait tata cara pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan yang baik dan benar
33. Program pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan
34. Program perumusan sistem pengawasan pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan



35. Program penyusunan persyaratan kredit usaha mikro yang pro masyarakat, mudah dan cepat
36. Program pemerataan distribusi tenaga pengajar
37. Program pemerataan distribusi tenaga kesehatan
38. Program peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
39. Program pemerataan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan
40. Program peningkatan kualitas pelayanan tenaga medis
41. Program peningkatan standarisasi pelayanan
42. Program monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran
43. Program peningkatan daya saing produk unggulan kabupaten (PRUKAB)
44. Program pendampingan pelatihan
45. Program pembangunan PRUKAB Tanaman Bambu
46. Program penyediaan sarana prasarana pendorong produktivitas PRUKAB
47. Program pengembangan kualitas PRUKAB.
48. Program peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, murah dan ramah
49. Program pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar kepegawaian berdasarkan jabatan dan penempatan kerja pada aparatur pemerintah
50. Program penyetaraan pendidikan aparatur
51. Program peningkatan fungsi legislatif

Untuk melihat lebih jelas hubungan yang saling terkait antara strategi, kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta tolok ukur indikator kinerjanya dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 7.2
Program Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi	Jebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja
----------	----------------	--	-------------------

Strategi 1	Kebijakan Umum P1	1. Program pemeliharaan dan peningkatan kualitas substansi pembinaan keagamaan	Terselenggaranya kegiatan pembinaan agama
		2. Program pembinaan keagamaan pada generasi muda	Terdapat fokus pembinaan keagamaan untuk semua jenjang pendidikan
		3. Program pembangunan tempat-tempat peribadatan	Tempat peribadatan mampu menampung seluruh Jemaah/jemaat
	Kebijakan Umum P2	4. Program pengawasan pengelolaan pembinaan keagamaan	Terdapat metode pengawasan bagi pemerintah daerah
		5. Program pengendalian pengelolaan pembinaan keagamaan	Terdapat metode pengendalian bagi pemerintah daerah
	Kebijakan Umum P3	6. Program penataan peraturan perundang-undangan	Tersusun draf Raperda tentang pembinaan keagamaan
	Kebijakan Umum P4	7. Program optimalisasi alokasi bantuan dana	Target-target pengalokasian dana yang direncanakan tercapai maksimal
Strategi 2	Kebijakan Umum P1	8. Program pembangunan pasar yang terstandarisasi	Terdapat pasar yang mampu menampung seluruh kebutuhan baik produsen maupun konsumen
		9. Program pembangunan dan perbaikan akses-akses jalan arteri perekonomian daerah	Akses jalan penunjang roda perekonomian berkualitas baik
		10. Program Pembangunan Tanggul Kali Lamong	Terbangunnya Tanggul Kali Lamong
		11. Program pembangunan infrastruktur bendungan sembayat	Tersedianya Bendungan Sembayat
		12. Program pembangunan Mega Stadion Gunung Lengis	Terbangunnya Stadion Gunung Lengis
		13. Program pembangunan Perumahan Gresik Selatan	Terealisasinya proyek pembangunan Perumahan Gresik Selatan
	Kebijakan Umum P2	14. Program pengawasan alokasi dana pembangunan infrastruktur	Pengalokasian dana digunakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati

	Kebijakan Umum P3	15. Program optimalisasi alokasi dana pembangunan infrastruktur	Target pengalokasian dana pembangunan infrastruktur yang direncanakan tercapai
		16. Program penyusunan peraturan terkait standarisasi tender	Tersusun draft Raperda tentang standarisasi (syarat-syarat) tender
	Kebijakan Umum P4	17. Program peningkatan kerjasama dengan pihak swasta	Terjalin hubungan kerjasama simbiosis mutualisme antara pemerintah dengan swasta
		18. Program pembangunan dan perbaikan infrastruktur penunjang kegiatan perekonomian	Peningkatan prosentase jalan berkualitas baik
Strategi 3	Kebijakan Umum P1	19. Program sosialisasi terkait penanaman wawasan lingkungan hidup	Tercipta mental masyarakat yang berwawasan lingkungan dan peduli terhadap lingkungan
		20. Program pengentasan area beresiko sanitasi	Berjalannya program-program peningkatan kualitas sanitasi area beresiko sanitasi
		21. Program sanitasi terpadu.	Berjalannya program sanitasi terpadu berbasis masyarakat
	Kebijakan Umum P2	22. Program kerjasama pengembangan nstru pertanian, perikanan dan kelautan dengan daerah sekitar	Terjalin kerjasama saling memenuhi kebutuhan antara Kab. Gresik dengan daerah sekitarnya.
		23. Program pembangunan nstru pengawasan pengelolaan berbagai nstru yang ramah lingkungan	Terstruktur nstru pengawasan pengelolaan berbagai nstru yang ramah lingkungan
	Kebijakan Umum P4	24. Program kajian ilmiah terkait penggalan potensi-potensi sumber pendapatan daerah	Draft ilmiah yang berisi daftar dan penjelasan sumber-sumber pendapatan potensial serta tata kelolanya
		25. Program stimulasi bantuan dana untuk usaha kecil menengah	Motivasi dan kreativitas masyarakat meningkat dalam mengembangkan usaha kecil menengah
Strategi 4	Kebijakan Umum P1	26. Program realisasi kegiatan-kegiatan kebudayaan daerah pada momen-momen kebudayaan daerah	Keseluruhan kegiatan-kegiatan (acara) kebudayaan berlangsung tanpa mengubah keaslian dan substansi kebudayaan tersebut
	Kebijakan Umum P2	27. Program penyusunan kode etik (berpakaian,	Realisasi kode etik pada tatanan pemerintahan

		beperilaku, bersosialisasi) ditatanan pemerintahan yang berbasis dan berdasrkan kepada kebudayaan daerah	
	Kebijakan Umum P3	28. Program pemeliharaan dan pelestarian kebudayaan asli daerah	Batik asli daerah, situs-situs warisan budaya, ritual-ritual kebudayaan terpelihara dan terjaga eksistensinya
		29. Program penyusunan perda perlindungan dan pemeliharaan situs budaya local	Tersusunnya sanksi-sanksi tegas terkait pelanggaran-pelanggaran yang mengancam eksistensi situs budaya lokal
	Kebijakan Umum P4	30. Program penyusunan rencana pengalokasian dana untuk kegiatan kebudayaan	Rencana dan target pengalokasian dana tersusun secara sistematis dan terstruktur.
Strategi 5	Kebijakan Umum P1	31. Program sosialisasi dan pembinaan terkait pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan	Wawasan masyarakat bertambah dalam hal pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan
		32. Program pendampingan terkait tata cara pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan yang baik dan benar	Keahlian masyarakat lebih dalam mengenai tata kelola pertanian, perikanan dan kelautan
	Kebijakan Umum P2	33. Program pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan	Berjalannya prosedur pengawasan dan pengendalian
	Kebijakan Umum P3	34. Program perumusan nstru pengawasan pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan	Sistem pengawasan pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan terstruktur secara sistematis dan dibakukan.
	Kebijakan Umum P4	35. Program penyusunan persyaratan kredit usaha mikro yang pro masyarakat, mudah an cepat	Persyaratan, ketentuan dan perjanjian terkait pengelolaan tersusun dan tidak memberatkan pelaku usaha kecil menengah
Strategi 6	Kebijakan Umum P1	36. Program pemerataan distribusi tenaga pengajar	Tenaga pengajar tersebar secara merata baik kuantitas maupun kualitas
		37. Program pemerataan distribusi tenaga kesehatan	Tenaga kesehatan tersebar secara merata baik kuantitas maupun kualitas

	Kebijakan Umum P2	38. Program peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Sarana dan prasarana, gedung dan ruang kelas terstandarisasi secara maksimal
		39. Program pemerataan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan	Sarana prasarana pendidikan dan kesehatan tersebar secara merata
		40. Program peningkatan kualitas pelayanan tenaga medis	Kepuasan masyarakat meningkat
	Kebijakan Umum P3	41. Program peningkatan standarisasi pelayanan	Kepuasan masyarakat meningkat
	Kebijakan Umum P4	42. Program monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran	Terealisasinya target penggunaan dana yang direncanakan
Strategi 7	Kebijakan Umum P1	43. Program peningkatan daya saing produk unggulan kabupaten (PRUKAB)	PRUKAB mampu bersaing dipasaran
	Kebijakan Umum P2	44. Program pendampingan pelatihan	Keahlian masyarakat meningkat
		45. Program pembangunan PRUKAB Tanaman Bambu	Berjalannya program inovasi daerah Tanaman Bambu
	Kebijakan Umum P3	46. Program penyediaan sarana prasarana pendorong produktivitas PRUKAB	Produktivitas PRUKAB meningkat
		47. Program pengembangan kualitas PRUKAB.	Kualitas PRUKAB meningkat
Strategi 8	Kebijakan Umum P1	48. Program peningkatan kualitas pelayanan nstru yang cepat, murah dan ramah	Indeks kepuasan masyarakat meningkat
	Kebijakan Umum P2	49. Program pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar kepegawaian berdasarkan jabatan dan penempatan kerja pada aparatur pemerintah	Tercipta aparatur pemerintah dengan SDM yang berkualitas dan profesional
		50. Program penyetaraan pendidikan aparatur	Terwujudnya aparatur pemerintah dengan standarisasi minimal sarjana
	Kebijakan Umum P4	51. Program peningkatan fungsi legislatif	Pelayanan pengaduan masyarakat

Keterangan : P1,P2, dst..., menunjukkan perspektif dalam kebijakan umum



BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Program didefinisikan sebagai instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD. Program ditetapkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

Program Teknis, merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Program Teknis disusun berdasarkan:

- a. Kelompok karakteristik SKPD
- b. Program Teknis yang disusun harus dapat mencerminkan tugas dan fungsi unit organisasi.
- c. Nomenklatur Program Teknis bersifat unik/khusus (tidak duplikatif) untuk masing-masing organisasi pelaksanaannya.
- d. Program Teknis harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya berdasarkan periode waktu tertentu; dan
- e. Program Teknis dilaksanakan dalam periode waktu jangka menengah, dengan perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi.

Program Generik / Perangkat Kerja Aparatur, merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Program Generik disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut:



- a. Program Generik dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi SKPD yang bersifat memberikan pelayanan internal;
- b. Nomenklatur Program Generik dibuat unik untuk setiap SKPD dengan ditambahkan nama SKPD dan/atau dengan membedakan kode program; dan
- c. Program Generik ditujukan untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis.

8.1 Program Prioritas

Indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah Kota Gresik adalah penjabaran yang lebih bersifat tegas dan nyata tentang indikasi program yang dapat diadopsi oleh SKPD dalam menentukan prioritas program/ kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun mendatang, keterangan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

NO	Program Pembangunan Daerah Prioritas	Indikasi Program Prioritas Satuan Kerja	Bidang Urusan	Satuan Kerja Penanggung Jawab
1	Program pemeliharaan dan peningkatan kualitas substansi pembinaan keagamaan	terselenggaranya kegiatan pembinaan agama	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	Kantor kesatuan bangsa dan politik
2	Program pembinaan keagamaan pada generasi muda	Terlaksananya pembinaan pendidikan keagamaan pada generasi muda	Pendidikan	Dinas pendidikan
3	Program pembangunan tempat-tempat peribadatan	Tersedianya tempat tempat ibadah untuk menampung seluruh jemaat	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
4	Program pengawasan pengelolaan pembinaan keagamaan	Tersusunnya perda kegiatan agama	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	Setda Bag. Adm Hukum



5	Program pengendalian pengelolaan pembinaan keagamaan	Dokumen pengendalian pengelolaan keagamaan	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	Kantor kesatuan bangsa dan politik
6	Program penataan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pembahasan rancangan peraturan daerah, tersusunnya dokumen peraturan daerah, terselenggaranya koordinasi kerjasama permasalahan perundang undangan	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Setda Bag. Adm Hukum
7	Program optimalisasi alokasi bantuan dana	Program peningkatan kinerja dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	DPPKAD
8	Program pembangunan pasar yang terstandarisasi	program peningkatan kerjasama dengan investor asing	Penanaman modal	Badan PM dan Perijinan
9	Program pembangunan dan perbaikan akses-akses jalan arteri perekonomian daerah	program pengembangan wilayah perbatasan, program perbaikan aksesibilitas perekonomian	Perencanaan pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan dan Daerah
10	Program Pembangunan Tanggul Kali Lamong	Terbangunnya Tanggul Kali Lamong	Pekerjaan Umum	Bagian Pemerintahan dan Dinas Pekerjaam Umum
11	Program pembangunan infrastruktur bendungan sembayat	Tersedianya Bendungan Sembayat	Pekerjaan Umum	Dinas pekerjaan umum



12	Program pembangunan Mega Stadion Gunung Lengis	Terbangunnya Stadion Gunung Lengis	Pekerjaan Umum	Dinas pekerjaan umum
13	Program pembangunan perumahan Gresik selatan	Terealisasinya proyek pembangunan Perumahan Gresik Selatan	Perumahan	Dinas pekerjaan umum
14	Program pengawasan alokasi dana pembangunan infrastruktur	Terlaksananya pengawasan secara berkala dengan skpd yang terkait	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Inspektorat
15	Program optimalisasi alokasi dana pembangunan infrastruktur	Mengotimalkan alokasi dana pembangunan infrastruktur	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan perencanaan pembangunan daerah
16	Program penyusunan peraturan terkait standarisasi tender	Tersedianya perda tentang standarisasi tender	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	



17	Program peningkatan kerjasama dengan pihak swasta	Terselenggaranya kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	
18	Program pembangunan dan perbaikan infrastruktur penunjang kegiatan perekonomian	Program peningkatan dan perbaikan infrastruktur aksesibilitas dan produksi	Pekerjaan Umum	Dinas pekerjaan umum
19	Program sosialisasi terkait penanaman wawasan lingkungan hidup	Dokumen penataan ruang terbuka hijau, program peningkatan kesadaran terhadap lingkungan	Lingkungan Hidup	Setda bag. Adm SDA
20	Program pengentasan area beresiko sanitasi	Berjalannya program-program peningkatan kualitas sanitasi area beresiko sanitasi	Perumahan	Dinas pekerjaan Umum
21	Program sanitasi terpadu	Berjalannya program sanitasi terpadu	Kesehatan	Dinas Kesehatan
22	Program kerjasama pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kelautan dengan daerah sekitar	Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan daerah sekitar terkait produksi pertanian, perikanan dan kelautan	Pertanian	Dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan
23	Program pembangunan sistem pengawasan pengelolaan berbagai sektor yang ramah lingkungan	Perda tentang lingkungan hidup, komitmen penegakan pada perusak lingkungan	Lingkungan Hidup	Setda Bag. Adm SDA, badan lingkungan hidup



24	Program kajian ilmiah terkait penggalan potensi-potensi sumber pendapatan daerah	Pogram perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Perencanaan pembangunan	Badan perencanaan pembangunan
25	Program stimulasi bantuan dana untuk usaha kecil menengah	Bantuan stimulan / permodalan UMKM untuk 100 unit/ orang pertahun sampai tahun 2015	Koperasi dan usaha kecil menengah	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
26	Program realisasi kegiatan-kegiatan kebudayaan daerah pada momen-momen kebudayaan daerah	Program pengembangan kegiatan-kegiatan (acara) kebudayaan berlangsung tanpa mengubah keaslian dan substansi kebudayaan tersebut	Kebudayaan	Dinas BUDPARPORA
27	Program penyusunan kode etik (berpakaian, berperilaku, bersosialisasi) ditatanan pemerintahan yang berbasis dan berdasarakan kepada kebudayaan daerah	Pengawasan realisasi kode etik pada tatanan pemerintah	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Dinas BUDPARPORA
28	Program pemeliharaan dan pelestarian kebudayaan asli daerah	Inovasi untuk menjaga warisan budaya	Kebudayaan	Dinas BUDPARPORA
29	Program penyusunan perda perlindungan dan pemeliharaan situs budaya lokal	Draft perda tentang situs budaya lokal	Kebudayaan	Dinas BUDPARPORA
30	Program penyusunan rencana pengalokasian dana untuk kegiatan kebudayaan	Otimalisasi dana untuk kegiatan kebudayaan	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,	Dinas BUDPARPORA



			kepegawaian dan persandian	
31	Program sosialisasi dan pembinaan terkait pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan	Pengembangan sdm dalam pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan	Pertanian	Dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan
32	Program pendampingan terkait tata cara pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan yang baik dan benar	Program pengembangan diklat sdm pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan	Pertanian, kelautan dan perikanan	Dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan
33	Program pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan	peningkatan pengawasan dan pengendalian pertanian, perikanan dan kelautan	Pertanian, kelautan dan perikanan	Dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan
34	Program perumusan sistem pengawasan pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan	program pengembangan pengawasan pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan	Pertanian, kelautan dan perikanan	Dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan
35	Program penyusunan persyaratan kredit usaha mikro yang pro masyarakat, mudah dan cepat	Terlaksananya program kredit usaha mikro	Koperasi dan usaha kecil menengah	Dinas koperasi, UKM dan perindag
36	Program pemerataan distribusi tenaga pengajar	Terlaksananya pendistribusian guru pada kecamatan yang kekurangan guru	Pendidikan	Dinas Pendidikan
37	Program pemerataan distribusi tenaga kesehatan	Terlaksananya pendistribusian guru pada kecamatan yang kekurangan tenaga kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
38	Program peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan fasilitas mutu pendidikan, program pendidikan usia dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan



39	Program pemerataan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan	Peningkatan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan daerah kecamatan yang kurang terfasilitasi, rehabilitasi gedung sekolah yang sudah mulai rusak	Pendidikan	Dinas Pendidikan
40	Program peningkatan kualitas pelayanan tenaga medis	Peningkatan fasilitas mutu pelayanan tenaga medis, prgram perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
41	Program peningkatan standarisasi pelayanan	Tersusunya SOP yang jelas bagi masyarakat	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	BKD
42	Program monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran	Tersusunya SOP dan POP bagi aparat pengawasan pemerintahan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	BKD
43	Program peningkatan daya saing produk unggulan kabupaten (PRUKAB)	Pengembangan sentra sentra industri potensi unggulan kabupaten	Industri	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
44	Program pendampingan pelatihan	Pengembangan diklat ekonomi kreatif sdm bagi masyarakat	Koperasi dan usaha kecil menengah	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
45	Program pembangunan PRUKAB Tanaman Bambu	Berjalannya program inovasi daerah Tanaman Bambu	Perkebunan dan kehutanan	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan



46	Program penyediaan sarana prasarana pendorong produktivitas PRUKAB	Program peningkatan sarana dan prasarana pendorong produktivitas PRUKAB	Koperasi dan usaha kecil menengah	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
47	Program pengembangan kualitas PRUKAB.	Program peningkatan produk PRUKAB	Koperasi dan usaha kecil menengah	Dinas koperasi, UKM dan perindag
48	Program peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, murah dan ramah	Pengembangan pelayanan publik	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	
49	Program pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar kepegawaian berdasarkan jabatan dan penempatan kerja pada aparatur pemerintah	Peningkatan pelatihan sumber daya manusia aparatur	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Kepegawaian daerah
50	Program penyetaraan pendidikan aparatur	Terselenggaranya penyetaraan pendidikan aparatur	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Badan Kepegawaian daerah
51	Program peningkatan fungsi legislative	engembangan fungsi legislatif	Otonomi daerah, pemerintahan umum,	Badan Kepegawaian daerah



			administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	
--	--	--	--	--



8.1 Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Proyeksi proporsi belanja untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik selama lima tahun kedepan sebagai berikut:

Anggaran dalam Jutaan

No.	Urusan	2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	Urusan Wajib										
01	Pendidikan	422.604,73	34,42%	433.244,46	34,86%	451.257,96	34,18%	466.546,81	33,93%	480.664,04	33,01%
02	Kesehatan	172.335,98	14,04%	176.790,55	14,23%	195.280,87	14,79%	208.013,53	15,13%	218.020,48	14,97%
03	Pekerjaan Umum	84.732,64	6,90%	86.948,86	7,00%	98.546,56	7,46%	106.268,31	7,73%	112.144,33	7,70%
04	Perumahan Rakyat	7.876,26	0,64%	8.083,28	0,65%	9.258,61	0,70%	10.033,10	0,73%	10.616,40	0,73%
05	Penataan Ruang	2.552,35	0,21%	2.619,43	0,21%	3.000,31	0,23%	3.251,28	0,24%	3.440,30	0,24%
06	Perencanaan Pembangunan	7.990,83	0,65%	8.197,68	0,66%	9.084,71	0,69%	9.692,39	0,70%	10.167,70	0,70%
07	Perhubungan	6.744,46	0,55%	6.916,35	0,56%	7.405,12	0,56%	7.766,49	0,56%	8.068,55	0,55%
08	Lingkungan Hidup	12.542,28	1,02%	12.868,36	1,04%	14.395,66	1,09%	15.428,21	1,12%	16.225,76	1,11%
09	Pertanahan	16.686,21	1,36%	17.124,78	1,38%	19.614,78	1,49%	21.255,57	1,55%	22.491,31	1,54%
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	5.028,33	0,41%	5.157,13	0,41%	5.583,34	0,42%	5.888,79	0,43%	6.137,57	0,42%
11	Pemberdayaan Perempuan	296,73	0,02%	304,53	0,02%	348,80	0,03%	377,98	0,03%	399,96	0,03%
12	Keluarga Berencana dan	6.217,99	0,51%	6.374,69	0,51%	6.654,92	0,50%	6.888,73	0,50%	7.102,24	0,49%



	Keluarga Sejahtera										
13	Sosial	1.020,99	0,08%	1.047,83	0,08%	1.200,18	0,09%	1.300,58	0,09%	1.376,19	0,09%
14	Ketenagakerjaan	3.737,05	0,30%	3.832,38	0,31%	4.111,37	0,31%	4.316,35	0,31%	4.486,84	0,31%
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.330,49	0,43%	5.465,23	0,44%	5.743,79	0,44%	5.966,58	0,43%	6.164,23	0,42%
16	Penanaman Modal Daerah	4.625,63	0,38%	4.744,63	0,38%	5.186,82	0,39%	5.497,03	0,40%	5.745,00	0,39%
17	Kebudayaan	2.901,57	0,24%	2.974,96	0,24%	3.131,49	0,24%	3.255,61	0,24%	3.365,06	0,23%
18	Kepemudaan dan Olahraga	436,41	0,04%	447,88	0,04%	513,00	0,04%	555,91	0,04%	588,23	0,04%
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	12.861,57	1,05%	13.191,67	1,06%	14.345,68	1,09%	15.164,20	1,10%	15.824,86	1,09%
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	414.497,55	33,76%	408.820,44	32,90%	424.182,54	32,13%	433.721,40	31,54%	476.950,15	32,76%
21	Ketahanan Pangan	1.834,42	0,15%	1.881,84	0,15%	2.078,81	0,16%	2.214,43	0,16%	2.321,01	0,16%



22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.145,33	0,26%	3.226,97	0,26%	5.783,21	0,27%	7.702,75	0,28%	10.739,100	0,28%
23	Statistik	127,73	0,01%	131,09	0,01%	150,15	0,01%	162,71	0,01%	172,17	0,01%
24	Kearsipan	158,27	0,01%	162,43	0,01%	186,05	0,01%	201,62	0,01%	213,34	0,01%
25	Komunikasi dan Informatika	2.235,72	0,18%	2.294,48	0,18%	2.628,11	0,20%	2.847,95	0,21%	3.013,52	0,21%
26	Perpustakaan	1.797,33	0,15%	1.843,44	0,15%	2.003,19	0,15%	2.116,68	0,15%	2.208,43	0,15%
	Urusan Pilihan										
01	Pertanian	10.963,48	0,89%	11.242,57	0,90%	12.005,42	0,91%	12.574,37	0,91%	13.053,31	0,90%
02	Kehutanan	1.658,87	0,14%	1.702,47	0,14%	1.950,01	0,15%	2.113,13	0,15%	2.235,98	0,15%
03	Energi dan sumber Daya Mineral	182,98	0,01%	187,79	0,02%	215,09	0,02%	233,09	0,02%	246,64	0,02%
04	Pariwisata	356,58	0,03%	365,95	0,03%	419,16	0,03%	454,23	0,03%	480,63	0,03%
05	Kelautan dan Perikanan	13.498,26	1,10%	13.847,53	1,11%	15.331,44	1,16%	16.349,51	1,19%	17.146,90	1,18%
06	Perdagangan	493,31	0,04%	506,28	0,04%	579,89	0,04%	628,40	0,05%	664,94	0,05%
07	Industri	185,86	0,02%	190,75	0,02%	218,48	0,02%	236,76	0,02%	250,52	0,02%
08	Ketransmigrasian	36,32	0,00%	37,28	0,00%	42,70	0,00%	46,27	0,00%	48,96	0,00%
	Jumlah belanja	1.227.694,52	100,00%	1.242.776,02	100,00%	1.320.252,24	100,00%	1.375.216,70	100,00%	1.456.079,36	100,00%



BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

9.1 Indikator Kinerja daerah

Indikator kinerja secara konsisten disusun berdasarkan tiga aspek keberhasilan dalam pembangunan daerah. Ketiga aspek tersebut diantaranya Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Didalam ketiga aspek tersebut di breakdown menjadi beberapa fokus sebagai wadah setiap indikator kinerja daerah. Berikut daftar indikator kinerja daerah Kabupaten Gresik tahun 2011-2015:

1. ASPEK KESEJAHTERAAN

1.1 Perekonomian

1.1.1 Jumlah Pendapatan perkapita

1.1.2 Presentase Penduduk miskin

1.1.3 jumlah lapangan kerja

1.1.4 Presentase pertumbuhan ekonomi

1.1.5 Jumlah penyerapan tenaga kerja

9.1.2 Pendidikan

9.1.2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

9.1.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

9.1.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

9.1.2.4 angka kelulusan

9.1.3 Ketenagakerjaan

9.1.3.1 persentase angkatan kerja

9.2 ASPEK PELAYANAN UMUM

FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

9.2.1 Pendidikan



9.2.1.1 Pendidikan dasar:

1.1.1 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

1.2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

1.2.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.2.2 Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.3. Angka Putus Sekolah:

1.3.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

1.3.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

1.3.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

1.4. Angka Kelulusan:

1.4.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI

1.4.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

1.4.3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

1.4.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

1.4.5 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

1.4.6 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

1.4.7 Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

1.4.8 Guru SM/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

2. *Kesehatan*

2.1 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

2.2 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

2.3 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

2.4 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

2.5 Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat

2.6 Cakupan Peserta KB Aktif

2.7 Cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP

2.8 Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita

2.9 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA



- 2.10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
- 2.11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita Diare
- 2.12 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
- 2.13 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/kota
- 2.14 Cakupan des/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam
- 2.15 Cakupan Desa Siaga Aktif
- 2.16 Cakupan kunjungan bayi
- 2.17 Cakupan kunjungan ibu hamil k4
- 2.18 Cakupan pelayanan nifas
- 2.19 Cakupan rumah tangga sehat
- 2.20 Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani
- 2.21 Cakupan pelayanan anak balita
- 2.22 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan dari keluarga miskin yang BGM

3. *PekerjaanUmum*

- 3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
- 3.2. Rasio Jaringan Irigasi
- 3.3. Persentase rumah tinggal bersanitasi
- 3.4. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
- 3.5. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)
- 3.6. jembatan kabupaten dalam kondisi baik
- 3.7 panjang jalan poros desa yang terbangun
- 3.8 panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik
- 3.9 bendungan gerak sembayat
- 3.10. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

4. *Perumahan*



- 4.1. Rumah tangga pengguna air bersih
- 4.2. Lingkungan pemukiman kumuh
- 4.3. Rumah layak huni
5. Penataan Ruang
 - 5.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
6. Perencanaan Pembangunan
 - 6.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
 - 6.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
 - 6.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
7. *Perhubungan*
 - 7.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum
 - 7.1.1 bis
 - 7.1.2 kapal laut (penyeberangan)
 - 7.2. Rasio ijin trayek
 - 7.3. Jumlah uji kir angkutan umum
 - 7.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
 - 7.5. Angkutan darat
 - 7.6. Kepemilikan KIR angkutan umum
 - 7.7. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
 - 7.8. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
 - 7.8.1 $0 \leq 3500$ ton
 - 7.8.2 $3500 < \text{ton}$
 - 7.9. Pemasangan Rambu-rambu
 - 7.10. Persentase ketersediaan rambu- rambu lalu lintas
 - 7.11. Persentase umum darat dalam kondisi layak jalan
 - 7.12. Pembangunan bandara domestic di pulau bawean
8. *Lingkungan Hidup*
 - 8.1. Persentase penanganan sampah



- 8.2. Persentase jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
- 8.3. Persentase jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara
- 8.4. Luas RTH perkotaan
- 8.5. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air
- 8.6. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.
- 8.7. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
9. *Pertanahan*
 - 9.1. Penyelesaian kasus tanah Negara
 - 9.2. Penyelesaian izin lokasi
10. *Kependudukan dan Catatan Sipil*
 - 10.1. cakupan penerbitan kartu keluarga
 - 10.2. cakupan penerbitan kartu tanda penduduk
 - 10.3. cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran
11. *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
 - 11.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
 - 11.2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta
 - 11.3. Rasio KDRT
 - 11.4. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
 - 11.5. Partisipasi angkatan kerja perempuan
 - 11.6. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
12. *Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*
 - 12.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga
 - 12.2. Rasio akseptor KB
 - 12.3. Cakupan peserta KB aktif
 - 12.4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
13. *Sosial*



Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

13.2. PMKS yg memperoleh bantuan sosial

13.3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

14. Ketenagakerjaan

14.1. Angka partisipasi angkatan kerja

14.2. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

14.3. Tingkat partisipasi angkatan kerja

14.4. Pencari kerja yang ditempatkan

14.5. Tingkat pengangguran terbuka

14.6. Keselamatan dan perlindungan

14.7. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1. Persentase koperasi aktif

15.2. Usaha Mikro dan Kecil

16. Penanaman Modal

16.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

16.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

16.3. Rasio daya serap tenaga kerja

16.4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

17. Kebudayaan

17.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

17.2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

17.3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

18. Kepemudaan dan Olahraga

18.1. Jumlah organisasi pemuda

18.2. Jumlah organisasi olahraga

18.3. Jumlah kegiatan kepemudaan

18.4. Jumlah kegiatan olahraga

18.5. Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

18.6. Lapangan olahraga



19. *Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri*
 - 19.1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
 - 19.2. Jumlah Parpol yang dibina
 - 19.3. Konflik yang dapat diselesaikan
 - 19.4. Kegiatan pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan
20. *Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian*
 - 20.1. Rasio jumlah laporan pertanggungjawaban yang tersusun tepat waktu
 - 20.2. Opini laporan keuangan
 - 20.3. Laporan keuangan tersusun tepat waktu
 - 20.4. APBD ditetapkan tepat waktu
 - 20.5. Keberadaan PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan
 - 20.6. Peningkatan PAD
 - 20.7. Keberadaan kemandirian daerah
 - 20.8. Pemanfaatan aset
 - 20.9. Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (IKK LPPD)
 - 20.10. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
 - 20.11. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
 - 20.12. Jumlah pembinaan anggota linmas yg dilakukan di kabupaten
 - 20.13. Keberadaan PERDA tentang penyelenggaraan trantibum
 - 20.14. Demo/ protes terhadap perda/ perhub
 - 20.15. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
 - 20.16. Petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kabupaten
 - 20.17. Jumlah pns yang direkrut sesuai kebutuhan/ formasi pegawai
 - 20.18. Rasio formasi jabatan structural yang terisi
 - 20.19. Rasio formasi jabatan fungsional (umum dan khusus) yang terisi
 - 20.20. Rasio pejabat structural yg telah mengikuti pendidikan dan pelatihan



kepemimpinan

20.21. Tersedianya system informasi kepegawaian daerah

21. *Ketahanan Pangan*

21.1. Regulasi ketahanan pangan

21.2. Ketersediaan pangan utama

22. *Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

22.1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

22.2. Jumlah LSM

22.3. PKK aktif

22.4. Posyandu aktif

23. *Statistik*

23.1. Buku "kabupaten dalam angka"

23.2. Buku "PDRB kabupaten"

24. *Kearsipan*

24.1. Pengelolaan arsip secara baku

24.2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan

25. *Komunikasi dan Informatika*

25.1. Jumlah jaringan komunikasi

25.2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

25.3. Jumlah media massa nasional/lokal

25.4. Jumlah penyiaran radio/TV lokal

25.5. Web site milik pemerintah daerah

25.6. Pameran/expo

25.7 sistim informasi yang tersedia

25.8 aksesibilitas pemanfaatan internet

25.9 pengunjung website setiap tahun

26. *Perpustakaan*

26.1. Jumlah perpustakaan

26.2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun



26.3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

27. Sanitasi

27.1 keberadaan dokumen bps dan ssk

27.2 keberadaan dokumen MPSS

27.3 Keberadaan UPTD pengelola air limbah

27.4 masterplan drainase

27.5 database drainase

27.6 jumlah IPLT yang dibangun

27.7 keberadaan Perda/ Perbub air limbah

27.8 keberadaan/ jumlah TPA

27.9 keberadaan/ jumlah TPST

27.10 keberadaan perbub persampahan

27.11 monitoring kualitas IPAL komunal

Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

1.1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

1.2. produksi padi

1.3. produktifitas jagung perhektar

1.4. produksi jagung

1.5. produktifitas kedelai perhektar

1.6 produksi kedelai

1.7 luas lahan tebu

1.8 Cakupan bina kelompok tani

2. Kahutanan

2.1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

2.2. Luas lahan hutan dan lahan yang rehabilitasi (pertahun)

2.3. luas lahan hutan dan lahan yang telah direhabilitasi (kumulatif)

2.4 Luas lahan yang perlu di rehabilitasi

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

3.1. Pertambangan tanpa ijin



- 3.2. rasio air bawah tanah (ABT) yang membayar pajak
- 4. *Pariwisata*
 - 4.1. Kunjungan wisata
- 5. *Perdagangan*
 - 6.1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
 - 6.2. Ekspor Bersih Perdagangan
- 7. *Perindustrian*
 - 7.1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
 - 7.2. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
 - 7.3. Pertumbuhan Industri.
 - 7.4. Cakupan bina kelompok pengrajin
- 8. *Ketransmigrasian*
 - 8.1. Transmigran swakarsa
 - 8.2. Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Satuan	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2011	2012	2013	2014	2015	
ASPEK KESEJAHTERAAN									
	Perekonomian								
1	Jumlah Pendapatan perkapita		Rp	11.544.813,73	11.997.560,76	12.468.062,95	12.957.016,57	13.465.145,24	
2	jumlah lapangan kerja	1.575	Perush	1.649	1.054	1.080	1.080	1.080	
3	Jumlah penyerapan tenaga kerja	2.115	Orang	1.687	1.415	3,860	3.000	3.000	
	Pendidikan								
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,90	%	98,74	98,74	99,16	99,58	100	
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	80,15	%	85,12	89,09	93,06	97,03	100	
3	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	56,41	%	63,7	71	78,3	85,6	92,9	
4	angka kelulusan	100	%	100	100	100	100	100	
	Ketenagakerjaan								
1	persentase angkatan kerja	66.17	%	66.53	66.83	62.25	67.51	67.84	



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Satuan	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2011	2012	2013	2014	2015	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Pendidikan								
1.1.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100	%	100	100	100	100	100	
1.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):								
1.2.1	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD)	55,00	%	55,00	64,00	73,00	84,50	93,50	
1.3	Angka Putus Sekolah:								
1.3.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,07	%	0,07	0,06	0,05	0,03	0,01	
1.3.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,25	%	0,25	0,20	0,15	0,10	0,03	



1.3.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,49	%	0,49	0,4	0,3	0,2	0,1	
1.4	AngkaKelulusan:								
1.4.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.4.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.4.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.4.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	93,39	%	93,39	94,79	96,09	97,39	99,90	
1.4.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	87,00	%	87,00	89,60	91,20	93,80	96,40	
1.4.6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	64,74	%	71,84	78,94	86,04	93,14	100,00	
1.4.7	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	78,59	%	82,99	87,39	91,79	96,2	100,00	
1.4.8	Guru SM/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	86,20	%	89,00	91,8	94,6	97,4	100,00	
2	Kesehatan								



2.1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	112,28	%	80,00	80,00	80,00	85,00	90,00	
2.2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86,4	%	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
2.3	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	72,33	%	92	94	96	97	98	
2.4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.5	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	%	100	100	100	100	100	
2.6	Cakupan Peserta KB aktif	65	%	69	69	70	70	75	
2.7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP	100	%	100	100	100	100	100	



2.8	Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita	60	%	60	70	80	90	90	
2.9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	70,4	%	70	70	80	80	80	
2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	%	100	100	100	100	100	
2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita Diare	100	%	100	100	100	100	100	
2.12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	75	%	100	100	100	100	100	
2.13	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/kota	60	%	60	65	70	75	80	



2.14	Cakupan des/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyeledikinan epidemiologi < 24 jam	oke	%	100	100	100	100	100	
2.15	Cakupan desa siaga aktif	oke	%	40	50	60	70	80	
2.16	Cakupan kunjungan bayi	80,5	%	84,00	86,00	90,00	92,00	95,00	
2.17	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4:	71,35	%	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
2.18	Cakupan Pelayanan nifas;	83,12	%	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
2.19	Cakupan Rumah Tangga Sehat;	54	%	91	92	93	94	95	
2.20	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani;	27,36	%	80,00	80,00	80,00	85,00	95,00	
2.21	Cakupan Pelayanan Anak Balita;	59,04	%	61,00	69,00	70,00	80,00	80,00	
2.22	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan dari keluarga miskin yang BGM	100	%	100	100	100	100	100	



3	Pekerjaan Umum								
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		%	70,00	71,00	74,00	77,00	80,00	
3.2	Rasio Jaringan Irigasi	49,87	%	51	52	53	54	55	
3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Bappeda							
3.4	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,27	%	0,27	0,28	0,29	0,30	0,30	
3.5	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	70	%	70	71,60	74,06	77	80	
3.6	Jembatan kabupaten dalam kondisi baik	93,49	%	89,59	98,00	93,70	94,34	94,96	
3.7	Panjang jalan poros desa yang terbangun	60	%	67,66	74,56	90	100	100	
3.8	Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik	54,20	%	56,91	58,41	14,19	24,55	35,95	
3.9	Bendung gerak sembayat	0	%	10,00	40,00	70,00	100,00	100,00	
3.11	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	49,87	%	51,00	52,25	72,40	74,90	78,20	
4	Perumahan								



4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	54,00	%	58,00	72,46	64,27	64,41	64,53	
4.2	Lingkungan pemukiman kumuh	17,50	%	0,863	0,862	5,60	7,60	10,10	
4.3	Rumah layak huni	77,90	%	76,84	87,01	82,89	82,93	83,05	
5	Penataan Ruang								
5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber .HPL/HGB	28,89	%	29,30	29,71	30,12	30,52	30,93	
6	Perencanaan Pembangunan								
6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
6.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
6.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
7	Perhubungan								
7.1	Jumlah arus penumpang								



	angkutan umum								
7.1.1	Bis	3,787,807	Orang	3,787,807	3,871,966	3,956,125	4,404,284	4,124,443	
7.1.2	Kapal laut (penyeberangan)	9,481	Orang	9,481	86,890	78,929	78,929	78,929	
7.2	Rasio ijin trayek	537	Unit	537	537	537	537	537	
			Orang	1,270,351	1,307,995	1,324,777	1,324,777	1,324,777	
7.3	Jumlah uji kir angkutan umum	1916	unit	1916	1818	1827	1827	1827	
7.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	11/0/1	lokasi	11/0/1	11/0/1	11/0/1	11/1/1	11/1/1	
7.5	Persentase ketersediaan Angkutan darat	2,9	%	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	
7.6	Kepemilikan KIR angkutan umum	30,48%	%	30,48	29,70	27,51	23,97	20,44	
7.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	1	Hari kerja	1	1	1	1	1	
7.8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum								
7.8.1	0 ≤ 3500 ton	35,000	Rupiah	35,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
7.8.2	3500 <	55,000	Rupiah	55,000	65,000	65,000	65,000	65,000	
7.9	Pemasangan rambu-rambu	96	Buah	850	946	1134	1297	1467	
		2500	Buah	2500	2500	2500	2500	2500	



7.10	Persentase ketersediaan Rambu-rambu lalu lintas	33	%	34	38	42	45	45	
7.11	Persentase angkutan umum darat dalam kondisi layak jalan	40	%	63	86	80	74	69	
7.12	Pembangunan bandara domestic di pulau bawean	60	%	95	98	95	98	98	
8	Lingkungan Hidup								
8.1	Persentase penanganan sampah	84	%	86	88	90	90	92	
8.2	Persentase jumlah usaha/ kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	47,50	%	50	53	55	57	60	
8.3	Persentase jumlah usaha/ kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	45	%	48	50	51	53	60	
8.4	Luas RTH perkotaan	51	%	57	63	68	70	75	



8.5	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	?	%	71,43	72,2	73,91	74,28	75,00	
8.6	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk		m3	336	348	372	384	396	
			Penduduk	1.225.224	1.249.728	1.274.723	1.300.218	1.326.222	
		0,026	M3/penduduk	0,027	0,029	0,029	0,030	0,030	
9	Pertanahan								
9.1	Penyelesaian kasus tanah Negara	50	%	50	50	25	100	100	
9.2	Penyelesaian izin lokasi	100	%	100	100	100	100	100	
10	Kependudukan dan catatan sipil								
10.1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (Target Th. 2015 = 100%)		%	--	--	100	100	100	100
10.2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (Target Th. 2015 = 100%)		%	--	--	63,87	74,09	84,96	84,96
10.3	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (Target Th. 2020 = 90%)		%	--	--	55,05	56,34	58,03	



11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	3,35	%	3,35	3,39	3,35	3,35	3,34	
11.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	4,04	%	4,04	4,49	4,68	4,68	4,68	
11.3	Rasio KDRT	32,0%	%	32,0%	25,0%	35,50%	30,00%	31,20%	
11.4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	--	%						
11.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	161.025	orang	161.025	159.714	207.380	207.401	205.383	
11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
12.1	Rata- rata jumlah anak perkeluarga	3,62	orang	3,64	3,61	3,59	3,53	3,25	
12.2	Rasio acceptor KB	0,70	Orang	0,70	0,70	0,70	0,7	0,7	
12.3	Cakupan peserta KB aktif	77,28	%	77,90%	77,10%	77,80%	77,85%	77,90%	



12.4	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	98.876	orang	97.677	99.579	98.341	97.587	97.543	
13	Social								
13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi		Unit	18	18	19	19	20	
13.2	PMKS yg memperoleh bantuan social	60	PMKS	60	60	283	351	351	
13.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social	60	PMKS	60	350	401	435	439	
14	Ketenagakerjaan								
14.1	Angka partisipasi angkatan kerja	66.17	%	66.53	66.83	67.25	67.51	67.84	
14.2	Angka sengketa perusahaan-pekerja per tahun	94.75	%	97.98	93.98	100	100	100	
14.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	66.17	%	66,53	66,83	67,25	67,51	67,84	
14.4	Pencari kerja yang ditempatkan	29.24	%	30.75	31.03	32.40	33.33	34.43	
14.5	Tingkat pengangguran terbuka	7.70	%	4.36	6.72	6.50	6.00	5.50	



14.6	Kesehatan dan perlindungan	53.50	%	53.50	62.50	60.06	70.44	70.97	
14.7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	-	Nihil
15	Koperasi usaha kecil menengah								
15.1	Persentase koperasi aktif		%	82	82	85	90	95	
15.2	Usaha mikro dan kecil		%	59	60	62	63	64	
16	Penanaman modal								
16.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		Invest-tor	50	55	58	60	62	
16.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional		Milyar	735,5	772,3	810,9	851,5	894	
16.3	Rasio daya serap tenaga kerja	29.24	%	30.75	31.03	32.40	33.33	34.43	
16.4	Kenaikan/penurunan nilai PMDN		Milyar	735,5	772,3	810,9	851,5	894	
17	Kebudayaan								
17.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Baik	Kejadian	5	6	7	8	9	
17.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Baik	Unit	5	6	7	8	9	



17.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	27,27%	%	36,36%	36,36%	36,36%	36,36%	36,36%	
18	Kepemudaan dan olahraga								
18.1	Jumlah organisasi pemuda	25	organisasi	30	35	40	45	50	
18.2	Jumlah organisasi olahraga	300	organisasi	325	350	375	400	425	
18.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	24	Kegiatan	12	24	36	48	60	
18.4	Jumlah kegiatan olahraga	24	Kegiatan	20	25	30	35	40	
18.5	Gelanggang/balai remaja(selain milik swasta)	1	Unit	1	2	2	2	2	
18.6	Lapangan olahraga	24	Unit	24	26	26	27	27	
19	Kesatuan kebangsaan politik dalam negeri								
19.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	164	Jumlah	164	164	164	164	164	
19.2	Jumlah Parpol yang dibina	11	Jumlah	11	11	11	11	11	
19.3	Konflik yang dapat diselesaikan	100	%	100	100	100	100	100	



19.4	Kegiatan Pemantapan idiologi Negara dan Wawasan Kebangsaan	-	kali	40	50	55	60	70	70
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian								
20.1	Rasio jumlah laporan pertanggungjawaban yang tersusun tepat waktu		%	--	--	--	90	90	
20.2	Opini laporan keuangan		WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
20.3	Laporan keuangan tersusun tepat waktu		Tepat waktu/tdk tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
20.4	APBD ditetapkan tepat waktu		Tepat waktu/tdk tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
20.5	Keberadaan PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan		Ada/Tdk ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
20.6	Peningkatan PAD		%	43,92	5,27	5,51	32,49	12,33	
20.7	Keberadaan kemandirian daerah		%	20,70	20,88	21,03	30,68	32,62	



20.8	Pemanfaatan aset		%	85,29	88,40	92,40	95,95	99,50	
20.9	Hasil Evaluasi Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK LPPD)	100	%	50	50	20	20	20	
20.10	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,013	%	0,02	0,04	1,47	1,47	1,47	
20.11	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	0	orang	0	0	53	53	53	
20.12	Jumlah pembinaan anggota linmas yg dilakukan di kabupaten	0	Kali	0	0	0	2	2	
20.13	Keberadaan PERDA tentang penyelenggaraan Trantibum	Ada	Ada/ tdk ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
20.14	Demo/protes terhadap Perda/Perbub	0	0	96	96	98	98	100	
20.15	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di	49,70%	%	50%	55%	60%	70%	80%	



	Kabupaten								
20.16	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	0	Orang	--	--	--	7320	7320	
20.17	Jumlah PNS yg direkrut sesuai kebutuhan/formasi pegawai	10.618	Orang	550	550	550	575	611	13.454
20.18	Rasio formasi jabatan struktural yang terisi	77,94	%	77,94	83,24	85,36	90,17	94,99	94,99
20.19	Rasio formasi jabatan fungsional (umum dan khusus) yang terisi	83,45	%	83,45	87,43	91,69	95,92	100,00	100,00
20.20	Rasio pejabat struktural yg telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	53,08	%	53,08	68,31	72,06	84,10	94,70	94,70
20.21	Tersediannya system informasi kepegawaian daerah	Ada	Ada/tdk ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21	Ketahanan Pangan								
21.1	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada/tidak	ada	ada	Ada	ada	Ada	
21.2	Ketersediaan pangan	187,89	Kg/kapita/tahun	193,40	197,23	199,18	197,21	200,17	



	utama								
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
22.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	356	Desa	356	356	356	356	356	
22.2	Jumlah LSM	164	LSM/OKP	164	164	164	164	164	
22.4	PKK aktif	78,23	%	81,27	83,23	84,04	85,61	89,70	
22.5	Posyandu aktif	97,42	%	97,90	98,60	98,95	99,30	99,50	
23	Statistic								
23.1	Buku “kabupaten dalam angka”	Ada	Ada/tidak	ada	ada	Ada	ada	Ada	
23.2	Buku “PDRB kabupaten”	Ada	Ada/tidak	ada	ada	Ada	ada	Ada	
24	Kearsipan								
24.1	Pengelolaan arsip secara baku	13,80	%	22,52 %	40,68	80,87	92,98	100	
24.2	Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan	3	Kali	35	75	41	41	41	
25	Komunikasi dan informatika								
25.1	Jumlah jaringan	--	--	--	--	--	--	--	



	komunikasi								
25.2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	6,9515	Rasio	15,6369	15,641	5,2135	2,6068	1,3034	1,3034
25.3	Jumlah media massa nasional/local	22	media	22	22	23	23	23	
25.4	Jumlah penyiaran radio/tv local	1	Radio	1	0	0	0	0	
25.5	Keberadaan Website pemerintah daerah	Ada	Ada atau tidak ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada
25.6	Pameran/expo	--	--	--	--	--	--	--	
25.7	Sistim informasi yang tersedia	WEB	Sistim informasi	23	24	25	26	26	26
25.8	Aksebilitas pemanfaatan internet	23	Jumlah SKPD yang tersedia jaringan internet	42	42	42	42	58	58
25.9	Pengunjung Website setiap tahun	218080	Jumlah pengunjung website	218.080	239.888	260.722	286.794	316.907	316.907
26	Perpustakaan								
26.1	Jumlah perpustakaan	13	Perpustakaan	18	21	35	42	50	
26.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	26.500	Orang	29.000	32.500	37.500	41.500	50.000	
26.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	13.095 80.050	Jdl Jumlah Buku	14.121 85.180	15.201 90.580	16.402 96.335	16.902 101.335	17.402 106.335	



27	Sanitasi								
27.1	Keberadaan dokumen BPS dan SSK	Tdk Ada	Ada/ Tdk ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
27.2	Keberadaan dokumen MPSS	Tdk ada	Ada/tdk ada	Tdk ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
27.3	Keberadaan UPTD Pengelola Air Limbah	Tdk ada	Ada/tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Ada	Ada	Ada
27.4	Master plan drainase	Ada	Ada/Tdk ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
27.5	Database drainase	Tdk ada	Ada/tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Ada	Ada	Ada	Ada
27.6	Jumlah IPLT yang dibangun	1	Unit	1	--	--	--	1	1
27.7	Keberadaan Perda/Perbub Air Limbah	Tdk ada	Ada/tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Ada	Ada	Ada
27.8	Keberadaan/jumlah TPA	1	Lokasi	1	1	1	1	2	2
27.9	Keberadaan/jumlah TPST	--	Lokasi	--	2	2	2	2	2
27.10	Keberadaan Perbub Persampahan	--	Ada/tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Ada	Ada
27.11	Monitoring kualitas IPAL Komunal	Tdk ada	Ada/tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Ada	Ada
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN									



1	Pertanian								
1.1	Produktifitas padi per hektar	62,12	Ton/Ha	55,04	65,32	61,49	62,63	63,25	63,25
1.2	Produksi padi	362.286	Ton	302.230	386.800	377.001	377.081	380.851	380.851
1.3	Produktifitas jagung per hektar	40,32	Ton/Ha	41,80	62,25	58,13	58,71	59,30	59,30
1.4	Produksi jagung	93.358	Ton	76.864	152.274	134.507	145.393	146.847	146.847
1.5	Produktifitas kedelai per hektar	11,33	Ton/Ha	12,06	12,16	16,57	13,00	13,20	13,20
1.6	Produksi kedelai	1.926	Ton	1.394	2.132	1.369	1.378	1.398	1.398
1.7	Luas lahan tebu	2.100	Ha	1.272	2.191	2.134	2.184	2.184	2.184
1.8	Cakupan binaan Kelompok Tani	--	%	--	10,34	20,41	35,34	40,56	40,56
2	Kehutanan								
2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	2,07	%	21,06	26,72	27,70	29,99	31,72	31,72
2.2	Luas lahan hutan dan lahan yang direhabilitasi (per tahun)	164	Ha	1.506	449	77	182	137	137
2.3	Luas lahan hutan dan lahan yang telah direhabilitasi (kumulatif)	164	Ha	1.670	2.119	2.196	2.378	2.515	2.515



2.4	Luas lahan yang perlu direhabilitasi	7.929	Ha	6.423	5.974	5.897	5.715	5.578	5.578
3	Energi dan Sumberdaya mineral								
3.1	Pertambangan tanpa ijin	25	buah	20	18	14	10	5	5
3.2	Rasio Air Bawah Tanah (ABT) yang membayar pajak	70,72	%	75,00	72,00	72,91	74,06	75,20	75,20
4	Pariwisata								
4.1	Kunjungan wisata	1.200.000	Orang	1.250.000	1.325.000	1.400.000	1.460.000	1.530.000	
5	Kelautan dan Perikanan								
5.1	Produksi Peternakan :								
	- Daging		ton	10.335,12	10.401,72	10.460,11	10.610,00	10.770,00	
	- Telur		ton	2.646,38	2.691,73	2.725,26	2.822,61	2.991,97	
	- Susu		ton	299,67	304,8	306,14	470,16	543,36	
5.2	Populasi Ternak :								
	- Sapi Potong		ekor	52.939	58.268	44.270,00	47.103	50.400	
	- Sapi Perah		ekor	587	415	433,00	1.263	1.546	
	- Kerbau		ekor	176	297	198,00	285	334	
	- Kambing		ekor	57.511	65.210	65.270,00	53.355	53.355	
	- Domba		ekor	30.134	30.396	30.396,00	30.499	30.749	
	- Kuda		ekor	236	236	236,00	324	373	
	- Ayam Buras		ekor	640.840	645.838	647.762,00	660.962	667.109	



	- Ayam Ras Petelur		ekor	133.045	133.045	134.700,00	131.000	132.441	
	- Ayam Ras Pedaging		ekor	2.600.000	2.600.000	2.603.500,00	2.558.286	2.558.400	
	- Itik		ekor	26.450	27.990	28.120,00	25.892	26.034	
	- Entok		ekor	13.260	13.260	13.385,00	13.564	13.710	
5.3	Produksi Perikanan :								
a	Budi Daya :								
	- Udang Windu		ton	2.093,34	3.027,66	4.005,80	1.975,00	2.100,00	
	- Udang Vannamae		ton	4.585,89	7.428,71	7.160,62	4.100,00	4.250,00	
	- Bandeng		ton	28.428,06	47.700,30	68.811,44	36.840,00	39.000,00	
	- Kerapu		ton	15,41	9,9	12,00	11,00	12,00	
	- Nila		ton	1.526,70	1.737,18	3.424,59	1.138,00	1.200,00	
b	Penangkapan		ton	19.492,84	16.965,00	18.380,99	17.500,00	17.800,00	
c	Perairan Umum		ton	350,43	420	862,27	675,00	750,00	
5.4	Produktivitas Lahan Tambak :								
	- Payau		Ton/Ha	88,07	92,49	96,11	101,11	106,91	
	- Tawar		Ton//Ha	105,80	111,09	111,07	116,87	123,13	
6	Perdagangan								
6.1	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB		Rp.	409.757.800	1.317.317.600	2.318.129.600	1.318.129.600	1.320.000.000	
6.2	Ekspor bersih perdagangan		Rp. (juta)	254.000	163.700	170.000	200.500	300.000	



7	Perindustrian								
7.1	Kontribusi sektor industry terhadap PDRB	19.736.134,02	Rp.(juta)	22.235.845,54	25.209.557,34	28.486.800,00	32.190.084,00	36.374.795,00	
7.2	Kontribusi industry rumah tangga PDRB sektor industry	1.105.760,65	Rp.(juta)	1.239.720,75	1.371.931,32	1.509.124,00	1.644.945,00	1.776.541,00	
7.3	Pertumbuhan industry	6,56	%	6,76	6,80	6,825	6,85	7,10	
7.4	Cakupan bina kelompok pengrajin	50	klpk	50	65	70	75	80	
8	Ketransmigrasian								
8.1	Transmigrasi swakarsa	0	Orang	0	25	25	30	50	
8.2	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	-	-	-	-	-	-	-	Nihil



BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada Tahun 2016, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 yang harus segera disusun pada Tahun 2015 mempunyai dasar acuan.

Program – program pembangunan pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, maka program pembangunan pada Tahun 2016 tetap melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu setiap SKPD dalam menyusun perencanaan pembangunan pada Tahun 2016 tetap mengacu kepada program-program Kabupaten yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Gresik selama 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Bupati, dengan memperhatikan RPJM Provinsi Jawa Timur serta RPJM Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional.

Dengan adanya Dokumen RPJM ini, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2011-2015 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015.



2. Renstra SKPD sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Kabupaten, sedangkan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD menetapkan program tersendiri dengan mengacu kepada program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, Bappeda Kabupaten Gresik berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD beserta indikatornya ke dalam Renstra SKPD.